

BAB I PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan fase lima tahun pertama RPJPD yang telah dijabarkan dalam dokumen perencanaan lima tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015.

Dengan berakhirnya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2015 dan dilantiknya Bupati terpilih untuk masa bakti 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyusun RPJMD yang memuat prioritas kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Lombok Tengah untuk lima tahun mendatang (2016-2021). Tahun 2016-2021 merupakan tahapan lima tahun kedua RPJPD Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;

- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2106 tentang *RPJMD* Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021. Hal lain yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang *RPJMD* Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah:

1. Amanat Peraturan Perundang-Undangan

- a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengharuskan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk merevisi Dokumen Perencanaan Daerah sesuai Peraturan Daerah No.6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- b. Belum mengakomodir perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sehingga terdapat beberapa OPD yang baru terbentuk belum sepenuhnya terakomodir dan beberapa urusan yang sudah bukan kewenangan kabupaten masih terakomodir

2. Perbaiki Kualitas Dokumen *RPJMD*

Berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh APIP, BPKP, dan Kemendagri bahwa:

- a. Perumusan terhadap indikator keberhasilan *RPJMD* yaitu indikator tujuan dan sasaran belum tertuang didalam *RPJMD* sehingga pengukuran keberhasilan pencapaian *RPJMD* belum bisa terukur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Rumusan tujuan dan sasaran perlu dilakukan reformulasi karena dinilai masih terlalu mikro dan kurang menggambarkan rumusan tujuan dan sasaran *RPJMD* yang strategis.

Perubahan dokumen RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun 2018 dimana masih tersisa 3 periode RKPD di dalamnya, salah satu fokus perubahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode RKPD 2020-2021 sebagai landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

RPJMD Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu dokumen Perencanaan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif. Setiap Perangkat Daerah selanjutnya menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RPJMD Tahun 2016-2021 juga menjadi acuan untuk menyusun RKPD Kabupaten Lombok Tengah Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3466);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 26).
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sebagai sebuah dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD tidak berdiri sendiri namun merupakan dokumen yang memiliki keterpaduan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Lombok Tengah

Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2011-2031. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Visi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031, yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, DAN MAJU BERDAYA SAING," merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yaitu :

- a. Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Religius, Menjunjung Tinggi Hukum dan Berbudaya Luhur Yaitu masyarakat Lombok Tengah yang menjunjung tinggi nilai-nilai serta ajaran agama yang dianutnya, menjunjung tinggi hukum yang berlaku serta nilai-nilai budaya yang merupakan warisan luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah Yang Sejahtera Yaitu masyarakat yang

terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara material dan spiritual, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lapangan kerja yang mantap dan terkendali serta kebutuhan hidup lainnya;

- c. Mewujudkan Pembangunan Yang Merata, Seimbang dan berkelanjutan Yaitu pembangunan yang dilakukan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah. Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan hendaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekarang saja tetapi juga harus dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan juga dimaksudkan agar dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua aspek termasuk kelestarian lingkungan dan resiko kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi;
- d. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah yaitu melalui pertumbuhan ekonomi dan penguatan struktur perekonomian daerah berbasis agrobisnis dan pengembangan pariwisata, mengedepankan pembangunan SDM yang berkualitas berbasis penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pembangunan sarana prasarana yang terpadu, dan terwujudnya pemerintahan yang menerapkan prinsip *good governance*, serta penguatan partisipasi masyarakat, pengembangan kerja sama antar skala wilayah, swasta dan masyarakat.

Tahap kedua RPJPD ini adalah kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD periode pertama dan merupakan hasil evaluasi, pengembangan serta pemantapan pelaksanaan program RPJMD periode sebelumnya. Pemantapan pelaksanaan program sebelumnya antara lain penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah serta upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pada periode kedua ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi telah berjalan dengan baik akan tetapi tingkat pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah, baik akibat kelahiran di dalam warga masyarakat Lombok Tengah itu sendiri maupun akibat terjadinya migrasi penduduk pasca beroperasinya Bandara Internasional Lombok dan menggeliatnya usaha di sektor pariwisata.

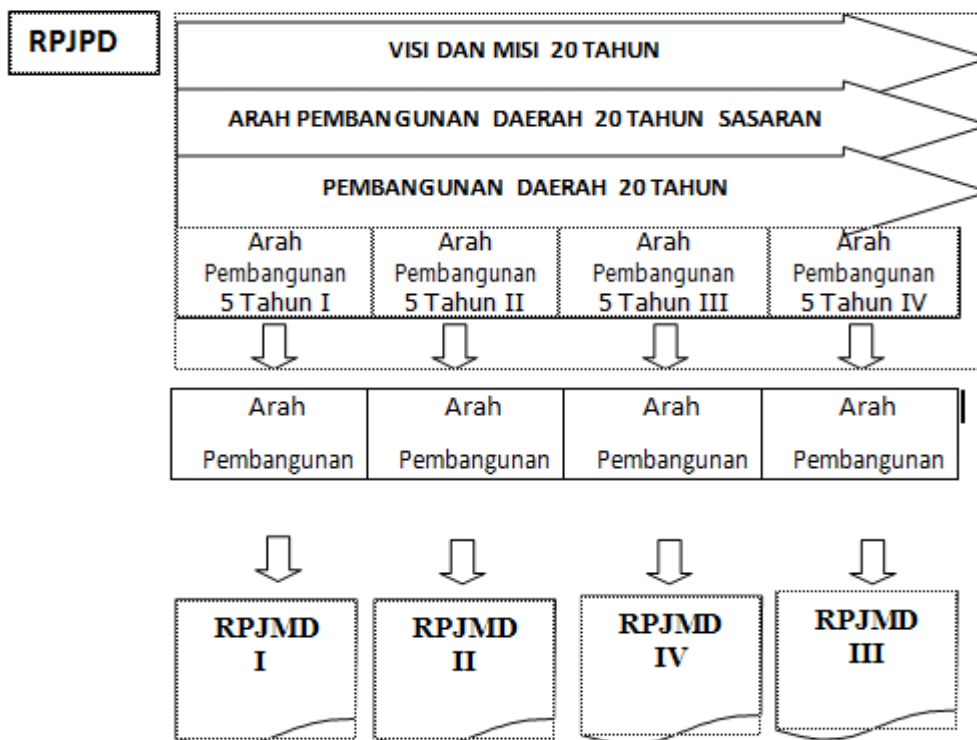
Sekalipun ekonomi Kabupaten Lombok Tengah mulai membaik, akan tetapi bidang pertanian masih mendapat porsi terbesar dalam menyumbangkan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu pengelolaan bidang pertanian

mutlak diperlukan, baik melalui kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi maupun diversifikasi pertanian. Pada periode kedua ini pengembangan agrobisnis diarahkan selain untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Lombok Tengah juga diharapkan dapat menyuplai kebutuhan bagi daerah lainnya. Untuk itu pembangunan agrobisnis harus bersinergi dengan bidang pembangunan lainnya seperti kehutanan dan perkebunan, perikanan dan kelautan agar terjamin kesinambungan pembangunan bidang pertanian.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah terus ditingkatkan mengingat semakin menggeliatnya usaha perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah sehingga harus didukung oleh kondisi infrastruktur yang memadai. Pada periode ini infrastruktur jalan terutama di daerah-daerah perdesaan harus tetap terpelihara dan terus ditingkatkan, demikian juga halnya dengan jaringan irigasi harus tetap terpelihara dengan baik.

Pada periode kedua ini kualitas SDM diprediksi sudah memadai yang ditandai oleh semakin meningkatnya IPM Lombok Tengah seiring perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antara RPJPD dengan RPJMD



2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Lombok Tengah

Penyusunan Perubahan RPJMD 2016-2021, juga harus berpedoman pada pola dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

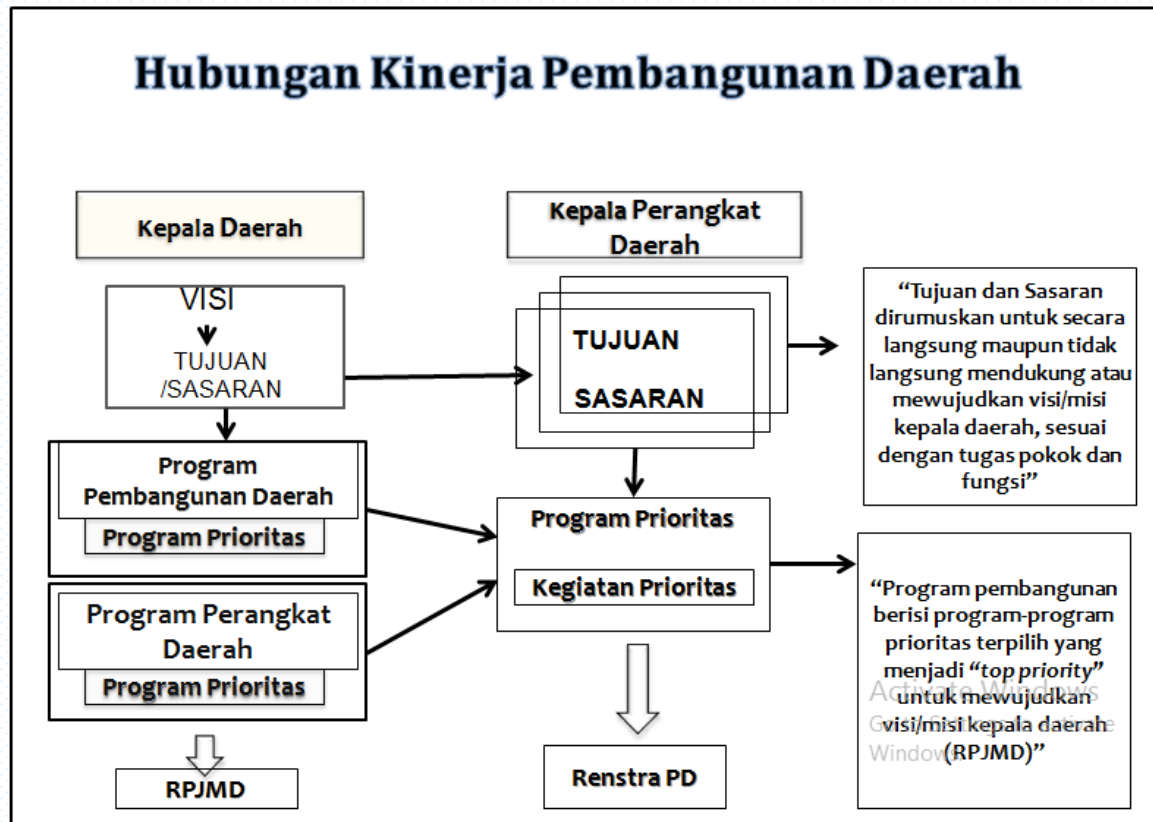
Tujuan Perencanaan Pembangunan dalam RPJMD ini sejalan dengan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Lombok Tengah yaitu *Mewujudkan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pusat dan pintu masuk pariwisata Pulau Lombok yang didukung oleh budaya lokal, pertanian, kelautan dan perikanan dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.*

Di sisi lain dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyalurkan kegiatan antar sector dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

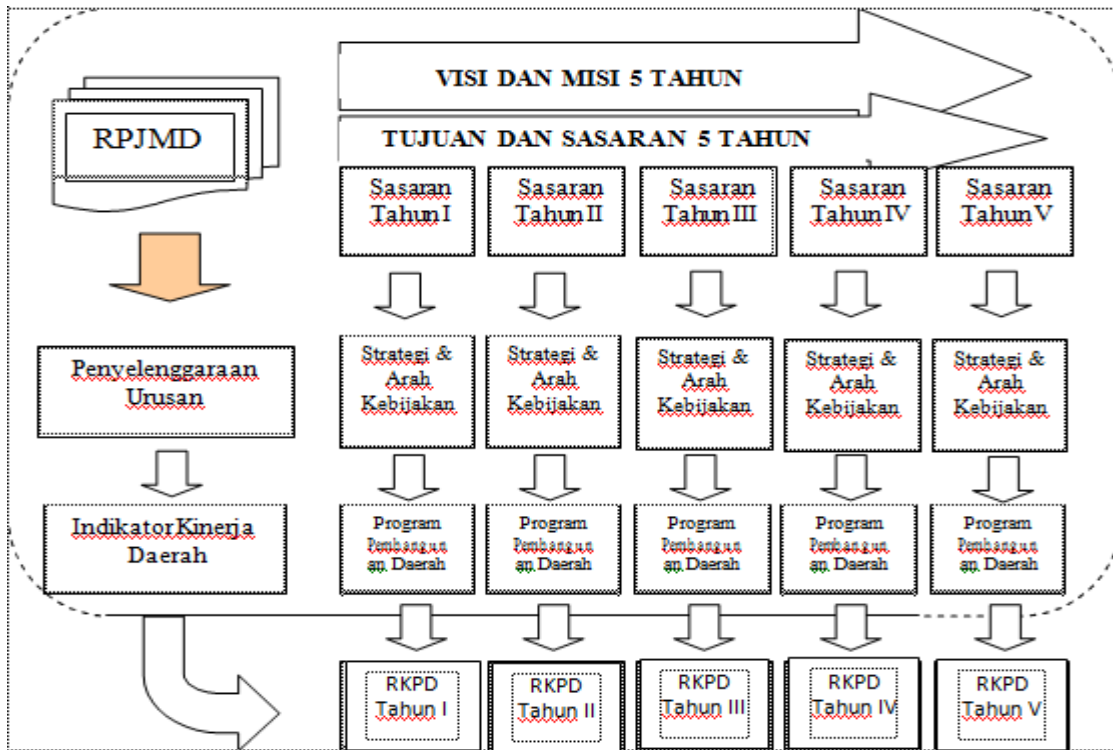
Gambar 1.2
Keterkaitan Antara RPJMD dengan Renstra



4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

Gambar1.3
Keterkaitan Antara RPJMD dengan RKPD



5. RPJMN dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025. RPJMN ini menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 adalah **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”**, dengan agenda Pembangunan nasional yang dijabarkan melalui sembilan prioritas pemerintah atau NAWA CITA. Kesembilan agenda prioritas pembangunan tersebut adalah 1). Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara, 2). Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, 3). Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, 4). Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 5). Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, 6). Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, 7). Mewujudkan kemandirian

ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic, 8). Melakukan revolusi karakter bangsa dan 9). Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi social Indonesia. Kesembilan agenda tersebut dimasukkan dalam aspek pembangunan di RPJMD 2016-2021 Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam visi, misi, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

6. RPJMD Provinsi dengan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah **Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera** dan dijabarkan melalui 7 Misi pembangunan, yakni:

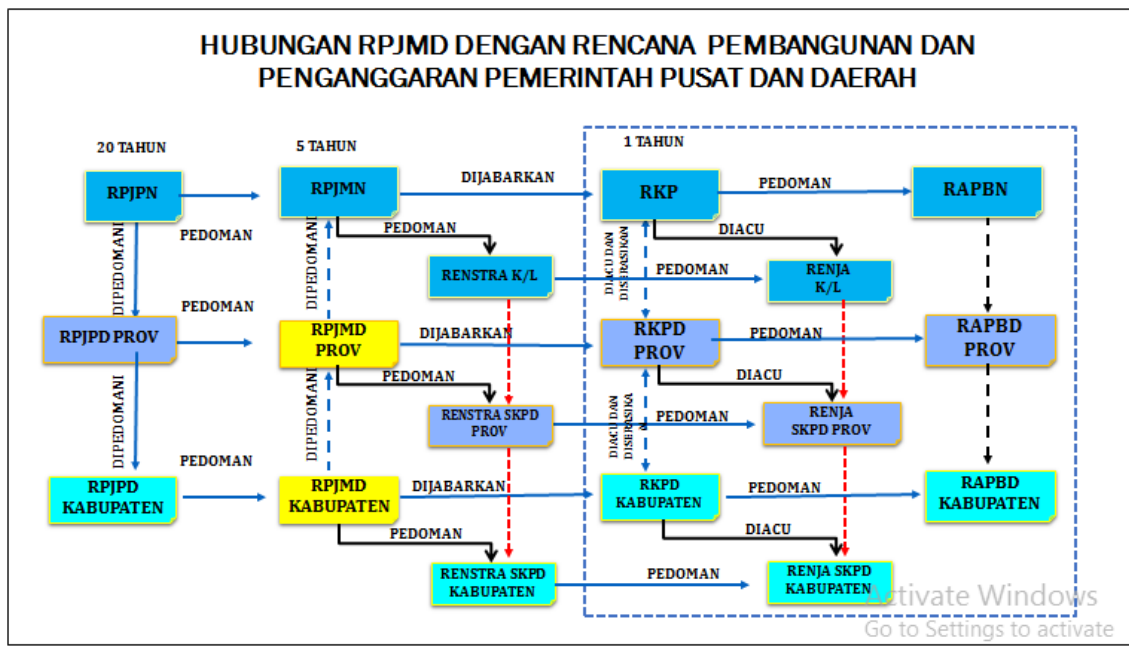
- 1) Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter,
- 2) Mengembangkan budaya dan kearifan lokal,
- 3) Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan,
- 4) Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdayasaing,
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah,
- 6) Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang dan
- 7) Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Ketujuh misi tersebut dimasukkan dalam aspek pembangunan di RPJMD 2016-2021 Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam visi, misi, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan.

Adapun secara umum hubungan RPJMD dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran pusat dan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.4
Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan dan Penganggaran

Pemerintah Pusat dan Daerah



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 adalah :

- Menyesuaikan dengan kebijakan nasional, memperbaiki rumusan tujuan, sasaran serta menentukan indikator dan target kinerja.
- Memberikan arah dan pedoman bagi pengambil kebijakan dalam upaya mewujudkan masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 yaitu :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan penjabaran teknis RPJMD berdasarkan urusan dan kewenangan yang merupakan tugas dan fungsi setiap SKPD.
- Merupakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan monitoring dan evaluasi.

1.5. Sistematika Penyusunan RPJMD

Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 terdiri dari 9 Bab, secara garis besar menguraikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menguraikan kondisi geografis, administratif, sosial kependudukan serta pencapaian pembangunan 5 tahun terakhir di Kabupaten Lombok Tengah yang dikelompokkan ke dalam tinjauan aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Pada bab ini juga diuraikan hasil evaluasi RPJMD tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2017.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menguraikan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan guna menyongsong pembangunan tahun berikutnya.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menguraikan keterkaitan kebijakan prioritas pembangunan nasional dengan beragam isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lombok Tengah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan strategi dan arah kebijakan dari setiap strategi serta menguraikan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menguraikan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra SKPD beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, dan SKPD penanggung jawab berdasarkan urusan.

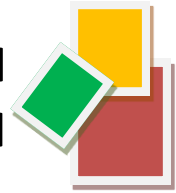
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan penetapan indikator kinerja daerah beserta target capaian indikator kinerja pertahun yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menguraikan aturan untuk mengatasi kekosongan acuan perencanaan pembangunan daerah pada masa peralihan sejak akhir berlakunya RPJMD 2016-2021 sampai dengan ditetapkannya RPJMD 2021-2026 serta menguraikan kaidah pelaksanaan RPJMD ini bilamana terjadi keadaan yang bersifat luar biasa.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2.1. Gambaran Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

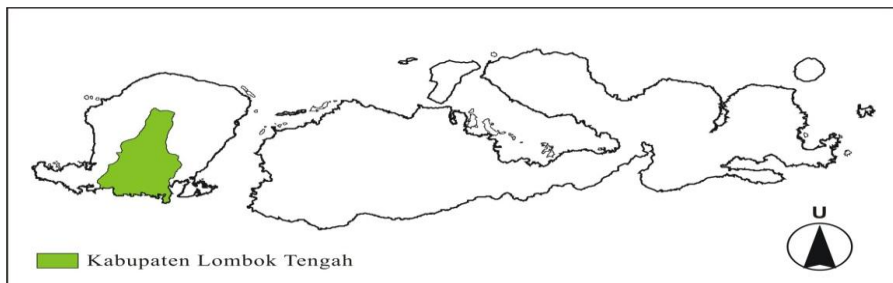
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lombok Tengah dengan Kota Praya sebagai pusat pemerintahannya merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 1.208,39 Km² (120.839 Ha).

Secara administrasi, beberapa wilayah Kabupaten Lombok Tengah berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, di sebelah Selatan terbentang Samudera Indonesia, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Barat dan di sebelah Timur dengan Kabupaten Lombok Timur.

Gambar 2.1

Peta Orientasi Kabupaten Lombok Tengah terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber: Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, 2015

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Lombok Tengah terletak di antara 116°05' sampai 116°24' Bujur Timur dan 8°24' sampai 8°57' Lintang Selatan dan berada di tengah-tengah Pulau Lombok. Keberadaan Bandara Internasional Lombok (Lombok International Airport) menjadikan Lombok Tengah sebagai gerbang Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui jalur udara. Disamping itu, keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Awang yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia menjadikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu masuk lalu lintas komoditas perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kondisi geografis Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya terbagi menjadi tiga. Bagian utara wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan daerah dataran tinggi meliputi Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, Kopang, Pringgarata dan sebagian Kecamatan Jonggat dan sebagian termasuk areal Taman Nasional Gunung Rinjani. Curah

hujan pada wilayah ini relatif tinggi dan merupakan wilayah tangkapan air yang menjadi pendukung bagi kegiatan di sektor pertanian. Selain kawasan hutan, wilayah ini merupakan wilayah potensial pengembangan hortikultura dan wisata alam pegunungan dengan air terjun dan pemandangan yang indah serta udara yang sejuk.

Bagian tengah merupakan wilayah dataran rendah yang didominasi oleh hamparan lahan persawahan dengan potensi komoditas pertanian padi dan palawija meliputi Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Timur, Janapria dan sebagian Kecamatan Jonggat.

Bagian selatan merupakan daerah perbukitan kapur yang berbatasan dengan Samudera Hindia, meliputi wilayah Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Wilayah ini memiliki potensi wisata pantai yang indah dengan gelombang laut yang cukup fantastik, dan merupakan kawasan strategis pengembangan wisata bahari.

c. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Lombok Tengah di setiap kecamatan tidak merata dengan ketinggian dan kemiringan lereng yang variatif. Kondisi tersebut mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh tanah dan kedalaman air tanah serta mempengaruhi besar erosi. Secara umum letak ketinggian Kabupaten Lombok Tengah adalah seperti yang disajikan pada tabel 2.1 dan kelas kemiringan lahan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah menurut ketinggian (Ha)
Di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Ketinggian (dpl)				Jumlah (Ha)
		0-100	100- 500	500-1000	1000+	
1	Praya Barat	5.421	5.715	4.296	1.841	17.273
2	Praya Barat Daya	3.614	3.810	2.864	1.226	11.514
3	Pujut	9.643	6.325	5.305	2.082	23.355
4	Praya Timur	7.679	825	-	-	8.504
5	Janapria	5.064	1.100	293	-	6.457
6	Ko pa n g	763	2.919	1.049	621	5.352
7	Praya	3.971	1.273	124	-	5.368
8	Praya Tengah	5.435	1.743	172	-	7.350
9	Jonggat	6.826	94	235	-	7.155
10	Pringgarata	2.118	1.460	1.700	-	5.278
11	Batukliang	215	2.480	1.717	1.195	5.607
12	Batukliang Utara	673	7.797	5.399	3.757	17.626
	Jumlah	51.422	35.541	23.154	10.722	120.839

Sumber : Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016

Tabel 2.2
Luas Wilayah menurut kemiringan (Ha)

Di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kecamatan	Kelas kemiringan (%)				Jumlah (Ha)
		0 - 2	2 – 15	15 - 40	> 40	
1	Praya Barat	7.274	9.587	412	0	17.273
2	Praya Barat Daya	4.915	6.478	121	0	11.514
3	Pujut	9.733	13.622	0	0	23.355
4	Praya Timur	3.436	5.068	0	0	8.504
5	Janapria	0	6.457	0	0	6.457
6	Ko pa n g	0	4.760	592	0	5.352
7	Praya	719	4.649	0	0	5.368
8	Praya Tengah	1.004	6.346	0	0	7.350
9	Jonggat	3.388	3.767	0	0	7.155
10	Pringgarata	673	4.575	30	0	5.278
11	Batukliang	0	2.623	1.379	1.605	5.607
12	Batukliang Utara	0	8.247	4.336	5.043	17.626
	Jumlah	31.142	76.179	6.870	6.648	120.839

Sumber : Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016

Seperti gambaran data yang disajikan pada tabel di atas, kemiringan lereng Kabupaten Lombok Tengah dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe yaitu:

- 1) Kemiringan lereng 0 – 2%, merupakan daerah datar, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai, rawa dan pantai. Penyebarannya meliputi sebagian kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (kecuali Kecamatan Janapria, Kopang, Batukliang dan Batukliang Utara) dengan luas daerah ± 31.142 Ha atau 25,77% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Pujut yaitu seluas 9.733 Ha atau 31,25% dari luas daerah dengan kemiringan 0 – 2%.
- 2) Kemiringan lereng 2 - 15%, merupakan daerah landai sampai agak miring, umumnya merupakan daerah dataran aluvial sungai. Penyebarannya meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah dengan luas daerah ± 76.179 Ha atau 63,04% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Pujut yaitu seluas 13.522 Ha atau 17,88% dari luas daerah dengan kemiringan 2 - 15%.
- 3) Kemiringan lereng 15 - 40%, merupakan daerah agak miring sampai miring, penyebarannya meliputi sebagian kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (kecuali Kecamatan Pujut, Praya Timur, Janapria, Praya, Praya Tengah dan Jonggat) dengan luas daerah ± 6.870 Ha atau 5,69% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di Kecamatan Batukliang Utara yaitu seluas 4.336 Ha atau 63,11% dari luas daerah dengan kemiringan 15 - 40%.
- 4) Kemiringan lereng >40% merupakan daerah sangat miring sampai curam, penyebarannya meliputi Kecamatan Batukliang dan Batukliang Utara dengan luas daerah ± 6.648 Ha atau 5,50% dari luas daerah, dengan luasan terbesar adalah di

Kecamatan Batukliang Utara yaitu seluas 5.043 Ha atau 75,86% dari luas daerah dengan kemiringan > 40%.

d. Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari kondisi geologi regional Pulau Lombok yang termasuk ke dalam Busur Bergunung Api Nusa Tenggara yang merupakan bagian dari Busur Sunda sebelah timur dan Busur Banda dalam gunung api sebelah barat. Kondisi ini mengakibatkan secara umum Kabupaten Lombok Tengah rentan terhadap bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Khusus di bagian selatan juga rentan terhadap bencana tsunami.

Berdasarkan sejarah pembentukan geologi Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasir dan endapan lahar dengan materi tersusun dari material lepas berukuran pasir hingga bongkah. Hal ini mengakibatkan kondisi tanah di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh jenis Komplek Mediteran Coklat, Gromosol Kelabu, Regosol Coklat dan Litosol yang pada kondisi tertentu labil dan berpotensi mengalami pergerakan tanah.

e. Hidrologi

Secara hidrologi Kabupaten Lombok Tengah berada dalam wilayah SSWS (Sub Satuan Wilayah Sungai) atau Daerah Aliran Sungai (DAS) Dodokan. Sebagian besar sungai terutama yang terletak di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah hanya berair pada musim hujan saja. Adapun air permukaan lain yang dimanfaatkan masyarakat adalah bendungan atau waduk serta embung yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.

Keberadaan dua bendungan besar yaitu Bendungan Batujai dan Bendungan Pengga memiliki peran penting bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah secara umum. Selain berfungsi sebagai penampungan air, kedua bendungan ini dimanfaatkan juga oleh masyarakat sebagai sentra budidaya perikanan air tawar dan sebagai obyek wisata. Sedangkan sebaran air tanah di Kabupaten Lombok Tengah dapat ditemukan hampir di setiap wilayah namun sumber mata air terdapat di bagian utara.

f. Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, Kabupaten Lombok Tengah memiliki iklim D dan E yaitu hujan tropis dengan musim kemarau kering. Musim hujan mulai sekitar Bulan November sampai dengan Bulan April/Mei dengan curah hujan rata-rata tertinggi bulan Januari/Februari dan terendah pada Bulan Juli/Agustus. Rata-rata jumlah hari hujan per bulan di Kabupaten Lombok Tengah berkisar antara 9 hingga 15 hari dengan curah hujan berkisar antara 124 mm hingga 219 mm.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Tengah secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tanah sawah dan tanah bukan sawah (tanah kering) yang terdiri dari pekarangan rumah (permukiman), tegal/kebun, tambak, kolam/empang, tanah sementara tidak diusahakan, hutan lebat, hutan belukar, tanah perkebunan dan tanah lainnya. Adapun perbandingan penggunaan lahan antara tanah sawah dan tanah kering adalah 45% : 55 %. Dalam pemanfaatannya perkembangan rasio pemanfaatan lahan produktif yang terkait penggunaannya untuk budidaya pertanian, permukiman dan sektor-sektor yang menghasilkan produksi diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.3
Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2012-2016
di Kabupaten Lombok Tengah

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Wil Produktif	73.465,00	73.197,00	72.929,00	72.929,00	72.929,00
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	102.650,55	102.650,55	102.650,55	102.650,55	102.650,55
3	Rasio (1/2)	0,716	0,713	0,710	0,710	0,710

Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah, 2017

Dari tabel diatas diperoleh gambaran rata-rata penggunaan wilayah produktif dalam 4 (empat) tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan yang selama ini masih bertumpu pada pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan sektor-sektor lainnya yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam belum mempengaruhi kapasitas keruangan yang tersedia atau dapat dikatakan bahwa proyeksi penyediaan lahan untuk aktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan tidak akan terjadi lonjakan yang signifikan.

Sementara itu perkembangan penggunaan lahan untuk sawah cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011-2015. Luasan penggunaan lahan untuk sawah dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.4
Luas Wilayah Produktif Tahun 2012-2016
di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Lahan	2011	2012	2013	2014	2015
1	Sawah (Ha)	42.645	43.230	40.673	40.673	40.713
2	Tegal/kebun (Ha)	19.735	19.735	23.089	23.089	23.122
3	Ladang/huma (Ha)	0	0	0	0	0
4	Lahan sementara tidak diusahakan (Ha)	0	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka, 2018

h. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan terhadap kejadian bencana, baik bencana yang disebabkan oleh alam maupun bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Terdapat 12 (dua belas) potensi bencana yang bisa terjadi di Kabupaten Lombok Tengah yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang ekstrem dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, dan bencana lainnya. Semua potensi tersebut setidaknya pernah terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dan mungkin akan terjadi lagi di kemudian hari, sehingga diperlukan pencegahan atau mitigasi bencana.

Berdasarkan buku Indeks Rawan Bencana Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2011 disebutkan bahwa Kabupaten Lombok Tengah memiliki kelas rawan dengan kategori tinggi yaitu memiliki skor 80 dan menempati urutan ke 88 dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Berikut disajikan indeks kerawanan pada masing-masing jenis kerawanan di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2.5
Indeks Kerawanan Bencana di Kabupaten Lombok Tengah

No	Jenis Kerawanan	Skor	Kelas	Rangking Nasional
1	Kekeringan	24	Tinggi	1
2	Konflik Sosial	37	Tinggi	4
3	Gelombang pantai dan Abrasi	23	Tinggi	29
4	Gempa bumi	46	Tinggi	45
5	Kebakaran pemukiman	21	Tinggi	130
6	Banjir	35	Tinggi	136
7	Tanah longsor	13	Sedang	134

Sumber : BNPB, 2011

a. Bencana Letusan Gunung Rinjani

Wilayah Kecamatan Batukliang Utara dan Kopang merupakan wilayah yang memiliki potensi rawan bencana alam berupa rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Rinjani termasuk bencana ikutan berupa hujan debu vulkanik, banjir lahar dingin dan tanah longsor. Desa-desanya yang termasuk rawan letusan Gunung Rinjani dan bencana ikutannya adalah sebagai berikut: Kecamatan Batukliang Utara yaitu Desa Karang Sidemen, Desa Tanak Beak, Desa Lantan, Desa Aik Berik, dan Desa Setiling; Kecamatan Kopang yaitu Desa Wajageseng dan Desa Bual. Kecamatan Batukliang Utara dan sebagian Kecamatan Kopang

(bagian utara) merupakan kawasan sumber mata air yang didukung dengan adanya kawasan hutan yang cukup luas.

b. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Berdasarkan data RTRW Kabupaten Lombok Tengah, kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor meliputi Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Jonggat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Pujut, Kecamatan Pringgarata dan Kecamatan Kopang dengan desa-desa yang paling berpotensi meliputi Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata, Desa Montong Sapah, Desa Montong Ajan, Desa Batu Jangkik, Desa Kabul, Desa Serage, dan Desa Pelambik.

c. Kawasan Rawan Tsunami

Berdasarkan peta geologi Indonesia wilayah Lombok terletak sangat dekat dengan zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia (selatan) dan Lempeng Eurasia (utara). Kondisi tersebut menyebabkan pesisir selatan Lombok Tengah sepanjang 97 km rawan dilanda tsunami meliputi Pantai Awang, Bumbang, Gerupuk, Kawasan Pantai Putri Mandalika (Pantai Aan, Sunut, Seger, Serenting dan Kuta), Are Guling, Mawun, Tampah, Rowok dan Semeti, Selong Blanak, Mawi, Tomang-Omang, Serangan, Torok Aik Belik, Pengantap Timur (Kecamatan Pujut, Praya Barat, dan Praya Barat Daya).

d. Kawasan Rawan Kekeringan

Dari data historis, kekeringan di Indonesia termasuk di Kabupaten Lombok Tengah sangat berkaitan dengan fenomena ENSO (*El-Nino Southern Oscillation*). Sebagian besar wilayah Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam daerah rawan bencana kekeringan. Data Lombok Tengah Dalam Angka menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang rawan terhadap bencana kekeringan yaitu Kecamatan Praya Barat Daya, Pujut, Praya Timur, Praya Tengah, Janapria, Jonggat, Kopang, Batukliang, Praya, dan Kecamatan Praya Barat.

e. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Lombok Tengah berada di beberapa lokasi yaitu wilayah perkotaan Praya, Dusun Peras Desa Kidang Kecamatan Praya Timur dan Dusun Pasung Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut. Kedua dusun ini terletak di dekat bantaran sungai dari DAS Renggung dan dekat dengan muara sungai.

f. Gempa Bumi

Propinsi NTB terletak di jalur gunung api dunia (*ring of fire*) yang merupakan pertemuan 3 lempeng besar (India Australia, Euroasia dan Pasifik) yang menimbulkan potensi gempa bumi. Disamping itu di sebelah utara pulau Lombok terdapat patahan Flores yang merupakan salah satu patahan yang aktif. Kejadian gempa bumi mulai tanggal 29 Juli s/d Agustus 2018 telah terjadi sekitar 814 kali gempa yang mengakibatkan kerusakan rumah tinggal 27.039 unit, jaringan jalan 7045 meter, 52 unit fasilitas kesehatan, 1093 unit bangunan fasilitas pendidikan, 47 unit bangunan fasilitas peribadatan dan kerusakan fasilitas-fasilitas umum lainnya dengan nilai kerusakan diperkirakan sebesar Rp.934,002,280,000,- dengan nilai kerugian sebesar Rp.177,741,523,639,- dan total kerugian dan kerusakan Rp.1,111,743,803,639,-.

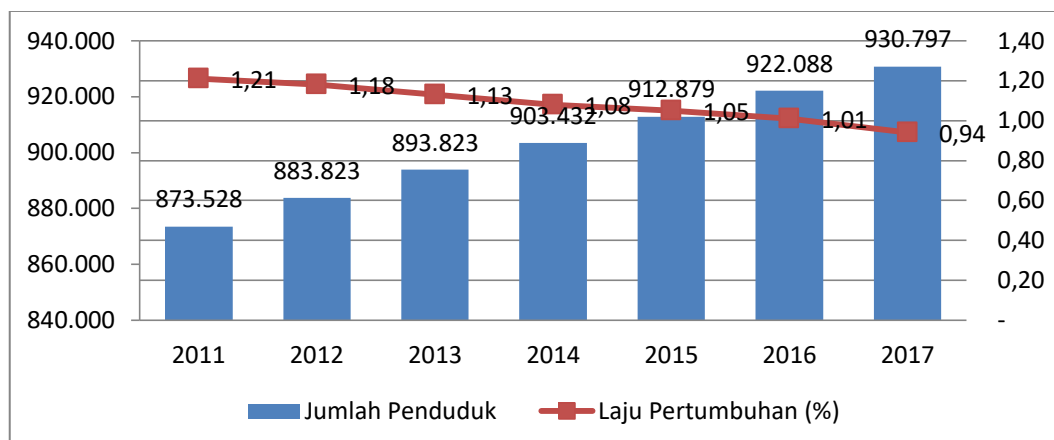
g. Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan rawan kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah berada pada kawasan permukiman terutama kawasan permukiman padat penduduk dan kawasan-kawasan pusat perekonomian.

i. Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik penduduk Kabupaten Lombok Tengah tahun 2017 berjumlah 930.797 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2011-2017 sebesar 1,09%. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan penduduk turun menjadi 1,21% jika dibandingkan dengan tahun 2010 dan tahun 2017 turun lagi menjadi 0,94%. Berikut disajikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Tengah 2011-2017.

Grafik 2.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Lombok Tengah 2011-2017



Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Lombok Tengah rentang waktu tahun 2011-2017 masih didominasi oleh kelompok usia 0-4, 5-9, dan 10-14 tahun. Dari tren yang adatang akan ketersediaan serta pemenuhan pelayanan terhadap penduduk pada rentang usia 0-14 tahun perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam berbagai kebijakan pembangunan. Jika dilihat dari kelompok usia berdasarkan usia kerja maka Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, kelompok usia kerja memiliki proporsi terbesar sebesar 65,53 persen dengan kecenderungan besaran yang tidak berubah jika dibandingkan dengan proporsi tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Lombok Tengah karena memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup sehingga kebutuhan akan tenaga kerja dapat terpenuhi. Namun disisi yang lain pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja justru menimbulkan dampak meningkatnya angka pengangguran. Berikut disajikan penduduk Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan kelompok usia kurun waktu 2011-2017.

Penduduk Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Kelompok Usia
Kurun Waktu 2011-2017

UMUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0-4	96.589	96.923	96.963	96.689	96.007	95.258	94,454
5-9	84.476	85.301	86.343	87.411	88.482	89.196	89,525
10-14	83.937	83.932	83.835	83.883	84.257	84.834	85,626
15-19	80.240	80.652	81.011	81.250	81.407	81.488	81,434
20-24	70.758	71.049	71.334	71.590	71.781	72.072	72,403
25-29	74.050	73.962	73.839	73.801	73.939	74.159	74,464
30-34	69.698	70.161	70.532	70.801	70.824	70.916	70,781

UMUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
35-39	67.474	68.434	69.290	70.001	70.777	71.183	71,628
40-44	56.672	58.197	59.670	60.998	62.130	63.240	64,116
45-49	49.416	50.705	52.063	53.462	54.891	56.397	57,910
50-54	41.600	42.820	43.945	45.087	46.339	47.509	48,756
55-59	31.623	33.087	34.612	36.050	37.313	38.624	39,765
60-64	25.178	25.876	26.676	27.632	28.786	30.041	31,452
65-69	17.574	18.095	18.693	19.352	20.056	20.605	21,197
70-74	12.387	12.601	12.792	12.984	13.206	13.578	14,018
75+	11.856	12.028	12.225	12.441	12.684	12.988	13,268
Jumlah	873.528	883.823	893.823	903.432	912.879	922.088	930,797

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2017

Sex ratio menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Lombok Tengah didominasi perempuan dengan sex ratio pada tahun 2017 sebesar 90 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 90 penduduk laki-laki. Sex ratio ini juga berimplikasi pada angka tingkat partisipasi angkatan kerja dimana perempuan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Persebaran penduduk jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, maka persebaran penduduk di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Hal tersebut diindikasikan dengan meningkatnya jumlah kepadatan penduduk setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk sebesar 770 jiwa/km². Dengan semakin tingginya kepadatan penduduk maka penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah daerah harus semakin ditingkatkan melalui antara lain instrumen penataan ruang dan wilayah sehingga kedepannya mampu mewujudkan tingkat kepadatan penduduk yang proporsional. Berikut disajikan perkembangan sex ratio dan kepadatan penduduk Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2017.

Tabel 2.6
Perkembangan Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2017

Tahun	Jumlah		Total	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Km ²)
	Laki-Laki	Perempuan			
2011	412.705	460.823	873.528	89,56	722,89

2012	417.691	466.132	883.823	89,61	731,41
2013	422.522	471.301	893.823	89,65	739,68
2014	427.134	476.298	903.432	89,68	747,63
2015	431.825	481.054	912.879	89,77	755,45
2016	436.155	485.933	922.088	90	763
2017	440.292	490.505	930.797	90	770

Sumber: BPS Kab. Lombok Tengah, 2018, Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka

2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator untuk mendapatkan gambaran kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya yang digunakan dalam aktivitas ekonomi adalah dengan melihat Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan demikian maka dapat dikatakan nilai PDRB suatu daerah dapat dijadikan tolok ukur kinerja ekonomi masyarakat dan pemerintah di daerah tersebut.

PDRB Kabupaten Lombok Tengah terus mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun baik atas dasar harga berlaku maupun konstan 2010 dimana menurut data tahun 2015, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp.11,71 Triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.9,73 Triliun.

Tabel 2.7
Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 Tahun 2011-2016

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2011	7.787.960,70	13,97	7.577.199,90	10,89
2012	9.154.772,60	17,55	8.616.438,70	13,72
2013	10.236.951,00	11,82	9.155.361,20	6,25
2014	11.665.561,76	13,95	9.728.881,,07	6,26
2015*	13.202.868,47	13,18	10.271.861,90	5,58
2016**	14.675.875,86	13,16	10.853.939,77	5,67
2017**	15.957.730,00	8,73	11.555.950,00	6,42

Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2018

Jika dilihat dari pertumbuhan pertahunnya, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lombok Tengah dalam kurun waktu 2011-2017 mengalami fluktuasi dengan laju

pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 sebesar 17,55% (ADHB) dan 13,72% (ADHK). Hal tersebut disebabkan oleh sub sektor transportasi yang mengalami lonjakan nilai tambah sebagai dampak beroperasinya Bandara Internasional Lombok.

Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah masih didominasi sektor primer yakni sektor pertanian dengan kontribusi pada tahun 2017 sebesar 24,70% (ADHB) dan 25,96% (ADHK). Sektor kedua yang memberikan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sektor transportasi dan pengangkutan sebesar 22,86% (ADHB) dan 17,25% (ADHK). Sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya berkisar antara 0,05% - 12,19%. Berikut adalah kontribusi masing-masing sektor dalam pertumbuhan PDRB di Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2.8
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Lombok Tengah
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2017

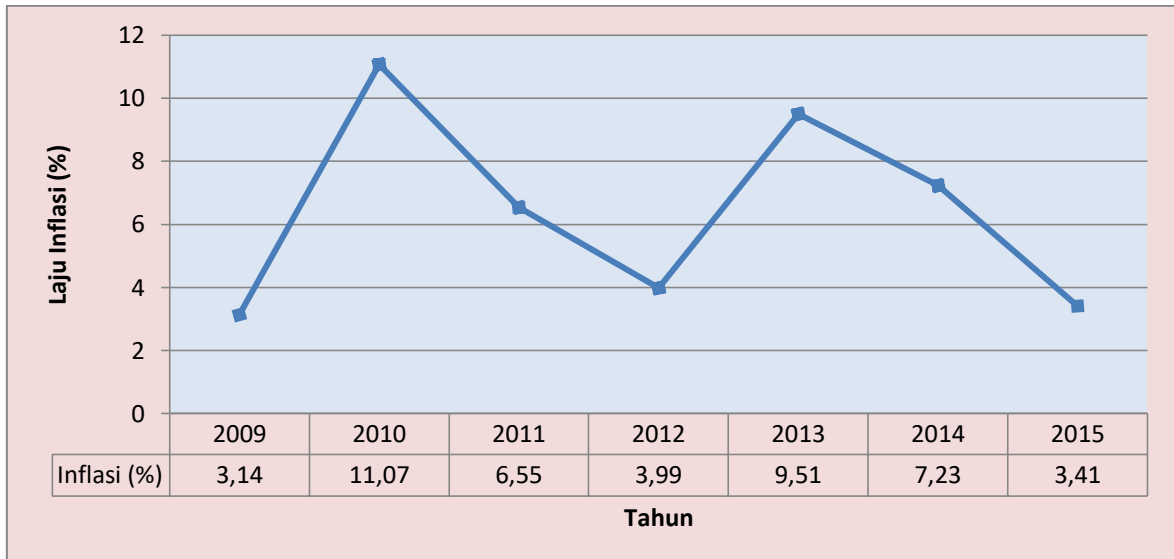
	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**	2017
1.	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	30,49	27,55	26,94	26,62	26,67	25,96	
2.	Pertambangan dan Penggalan	4,25	3,93	4,03	4,13	4,19	4,34	
3.	Industri Pengolahan	7,08	6,33	6,17	6,05	5,86	5,73	
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	
6.	Konstruksi	13,21	12	12,03	12,20	12,38	12,71	
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,93	10,37	10,55	10,71	10,69	10,95	
8.	Transportasi dan Pengangkutan	8,72	16,88	17,42	17,43	17,22	17,25	
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,05	0,99	1,01	1,03	1,03	1,07	
10.	Informasi dan Komunikasi	1,68	1,59	1,63	1,69	1,74	1,80	
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,97	1,8	1,86	1,88	1,93	2,00	
12.	Real Estate	3,57	3,3	3,34	3,37	3,41	3,44	
13.	Jasa Perusahaan	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,6	5,82	5,63	5,52	5,41	5,24	
15.	Jasa Pendidikan	4,96	4,48	4,38	4,31	4,37	4,38	
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,66	2,42	2,44	2,46	2,48	2,49	
17.	Jasa Lainnya	2,48	2,22	2,24	2,26	2,27	2,29	
	P D R B	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Statistik dan Spasial Kabupaten Lombok Tengah, 2017

b. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Lombok Tengah pada kurun waktu tahun 2009-2015 mengalami fluktuasi sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2.2
Laju Inflasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 - 2015

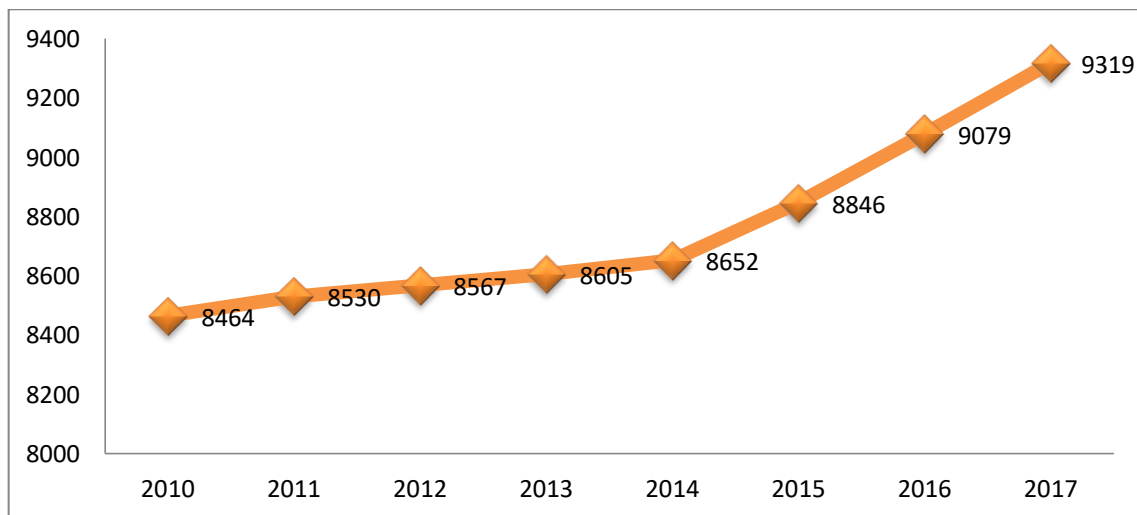


Sumber : BPS NTB, 2016

c. Daya Beli

Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli. Dengan demikian kemampuan daya beli masyarakat antar satu wilayah dengan wilayah lain berbeda. Daya beli juga menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi penduduk. Berikut perkembangan daya beli masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2017.

Grafik 2.2
Perkembangan Daya Beli Masyarakat Pertahun Selama Kurun Waktu 2010-2017 (Ribu Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi NTB

d. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Lombok Tengah atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan positif pada kurun waktu 2011-2017 dari Rp.8.720.501 pada tahun 2011 menjadi Rp 12.415.113 pada tahun 2017. Adapun perkembangan setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9

PDRB Perkapita Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2017

Tahun	PDRB Perkapita (Rp)	
	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan 2010
2011	8.963.063	8.720.501
2012	10.358.152	9.844.760
2013	11.460.342	10.241.302
2014	12.912.496	10.768.803
2015*	14.462.890	11.252.161
2016**	15.915.917	11.771.045
2017**	17.144.157	12.415.113

Keterangan: *)Data Sementara, **) Data Sangat Sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2018

e. Kemiskinan

Penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan pada kurun waktu 2011-2017 baik secara absolut maupun relatif. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2011-2017

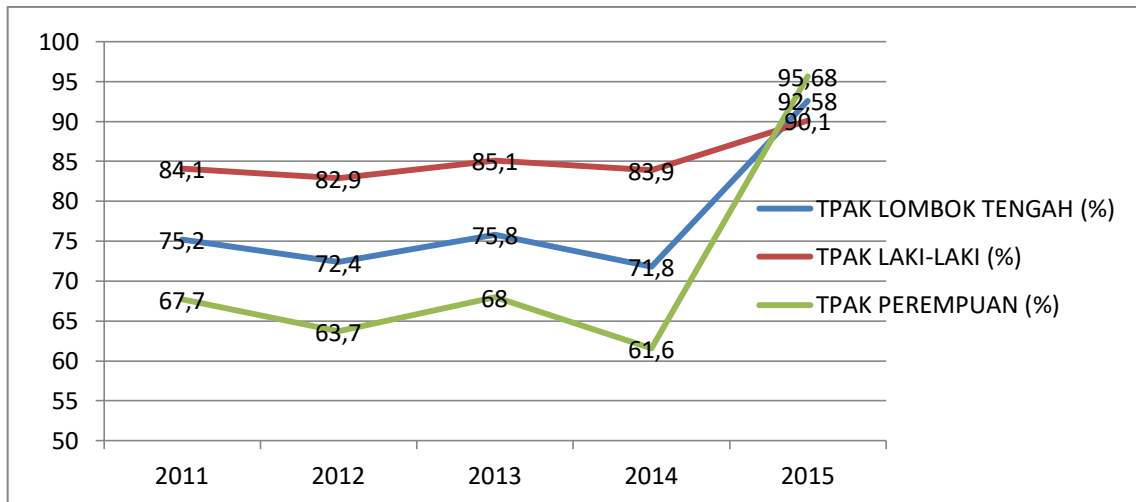
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase
2011	159.046	18,14
2012	148.153	16,72
2013	145.151	16,20
2014	141.334	16,03
2015	147.940	16,26
2016	145.370	15,80
2017	142.412	15,31

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2018

f. Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran

Partisipasi angkatan kerja merupakan indikator yang menggambarkan besaran persentase penduduk yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi baik bekerja maupun mencari kerja atau mempersiapkan usaha. Jika melihat perkembangannya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Lombok Tengah dari tahun 2011 ke tahun 2015 berfluktuatif. TPAK terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 71,8% sebagaimana bisa dilihat pada grafik berikut. Tahun 2015 total TPAK 92,58 %, perempuan 95,68%, laki-laki 96,64%.

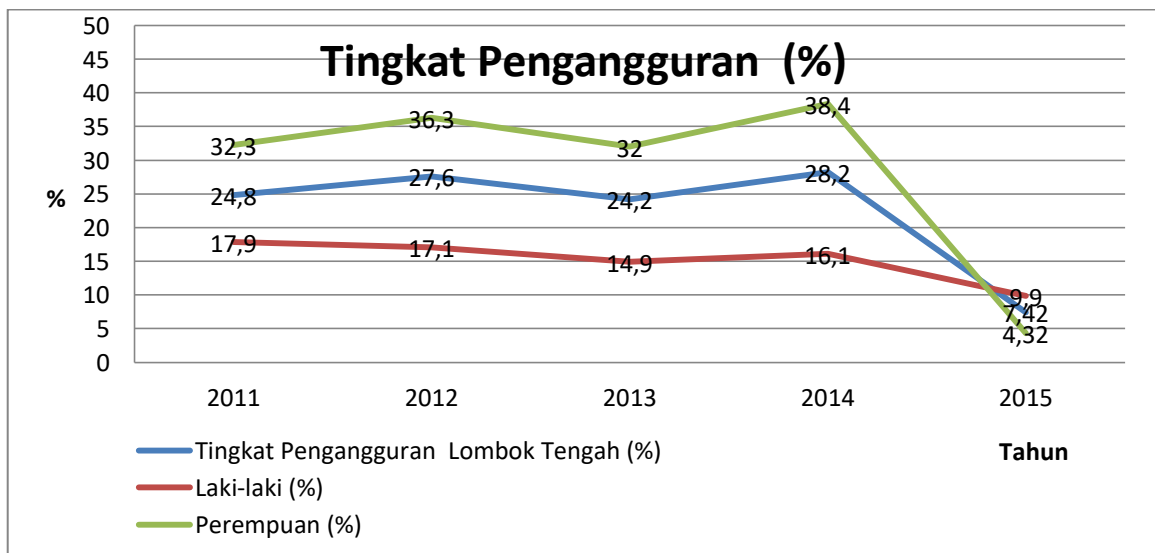
Perkembangan TPAK di Kabupaten Lombok Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011-2015



Sumber: Lombok Tengah Dalam Data, Tahun 2017

Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, angka pengangguran laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran perempuan. Ini berarti perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi memiliki kecenderungan untuk terserap di lapangan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perkembangan tingkat pengangguran menurut jenis kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015 sebagaimana gambar berikut.

Grafik 2.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015



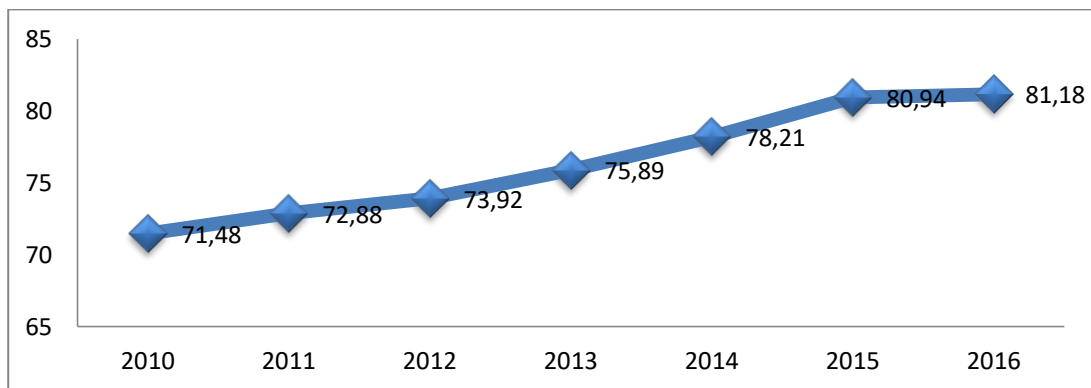
Sumber: Inkesra Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015

2.1.3.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

Angka Melek Huruf (AMH) penduduk 15 tahun keatas menunjukkan keadaan yang meningkat dari tahun 2010-2016. AMH pada tahun 2010 sebesar 71,48% dan pada tahun 2016 mencapai 81,81%. Rata-rata kenaikan angka melek huruf tiap tahunnya sebesar 1,62%. Berikut disajikan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas tahun 2010-2016.

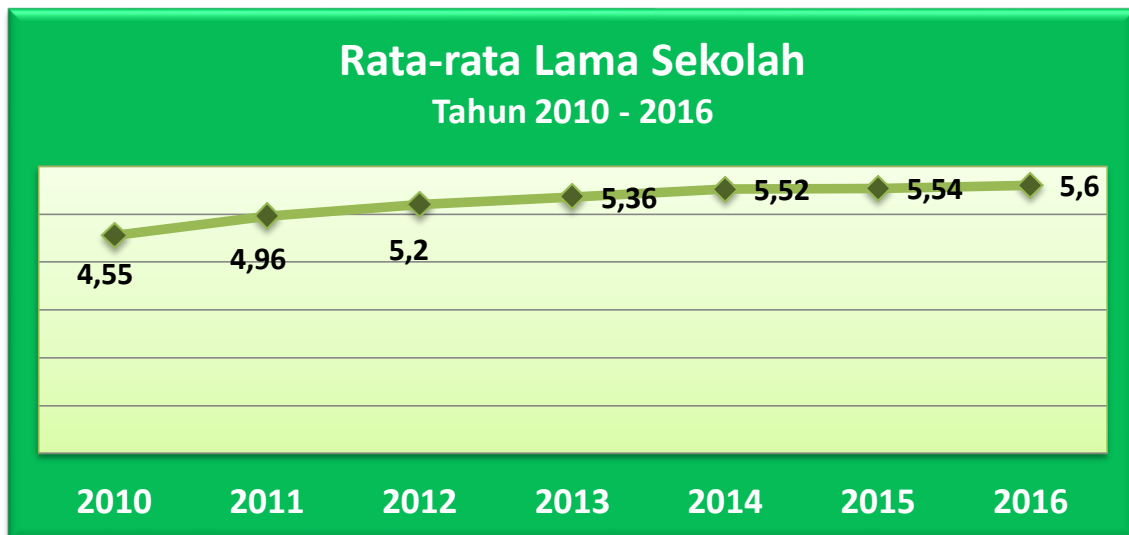
Grafik 2.4
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Tahun 2010-2016



Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2017

Indikator pendidikan lainnya yakni rata-rata lama sekolah. Selama periode 2010-2016, rata-rata lama sekolah penduduk Lombok Tengah mengalami peningkatan. Rata-rata lama sekolah naik dari 4,55 tahun pada tahun 2010 menjadi 5,95 tahun pada tahun 2017 dan rata-rata lama sekolah di Lombok Tengah masih di bawah angka Provinsi NTB.

Grafik 2.5
Rata-rata Lama sekolah Tahun 2010-2016



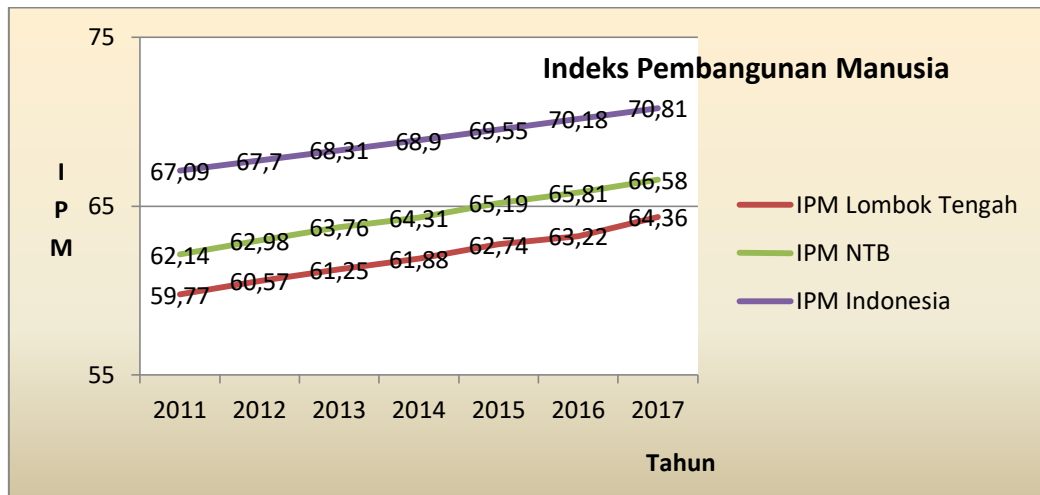
Sumber: Inkesra Lombok Tengah, 2017

B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum pembangunan manusia di Lombok Tengah selama periode 2011-2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, IPM Lombok Tengah tercatat sebesar

59,77 dan terus meningkat hingga mencapai 64,36 pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk Lombok Tengah semakin membaik.

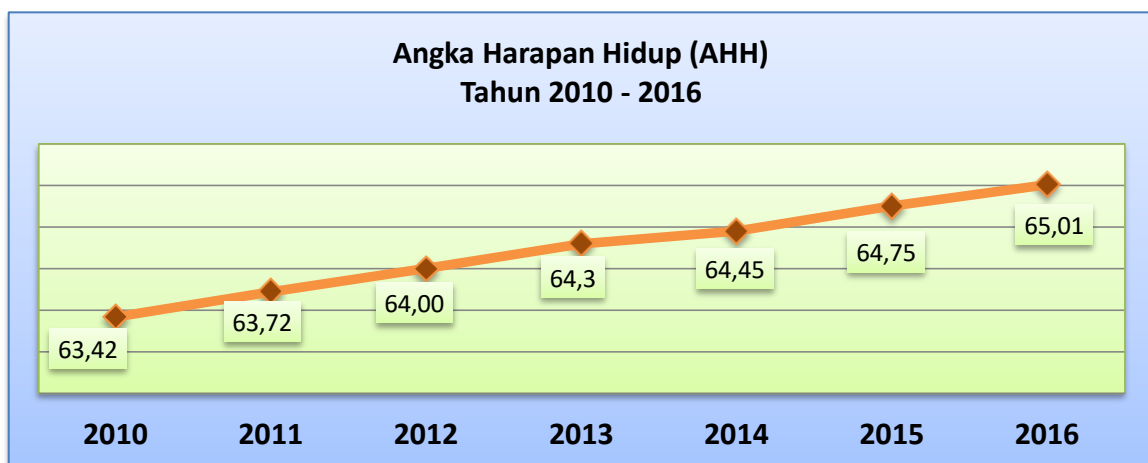
Grafik 2.6
IPM Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2017



C. Kesehatan

Dalam kurun waktu 2010-2016 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, Angka Harapan Hidup Lombok Tengah mencapai 63,42 tahun yang berarti anak yang lahir di Lombok Tengah berpeluang untuk hidup hingga berusia 63 tahun. Angka harapan hidup tersebut terus meningkat hingga mencapai 65,01 pada tahun 2016. Peningkatan terendah terlihat pada periode 2013 – 2014 dimana angka harapan hidup hanya meningkat 0,15 poin.

Grafik 2.7
Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010-2016



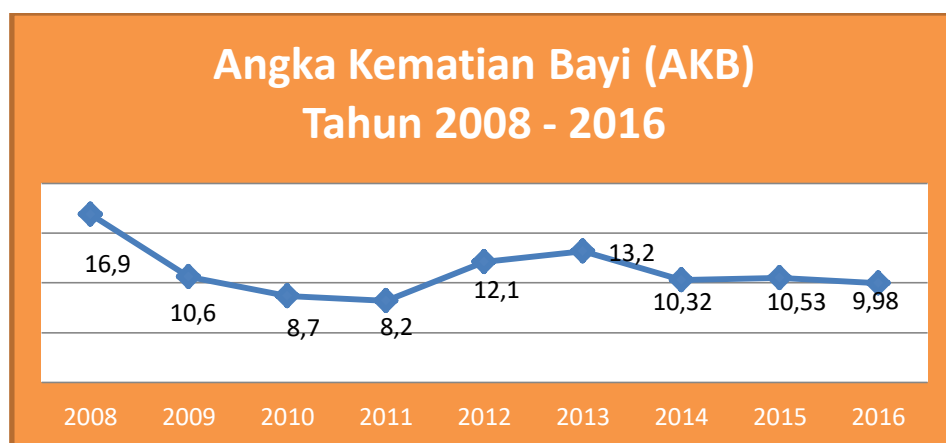
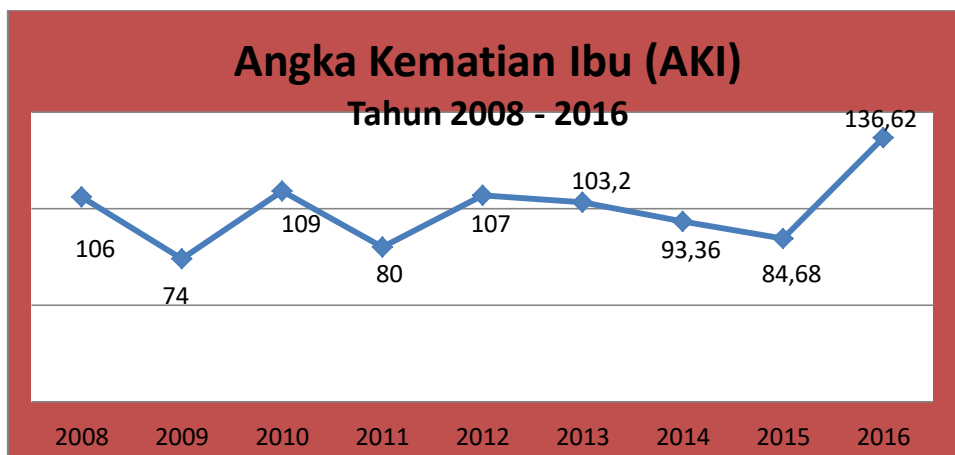
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2017

Salah satu pembentuk angka harapan hidup adalah angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Angka kematian ibu merupakan perbandingan antara jumlah kematian ibu

sampai dengan 42 hari sejak melahirkan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup dikali 100.000, sedangkan angka kematian bayi merupakan perbandingan antara jumlah kematian bayi dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup dikali 1.000.

Dalam kurun waktu delapan tahun (2008-2016) angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Lombok Tengah mengalami fluktuasi. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 136,62, sedangkan angka kematian bayi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 16,9. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan ibu dan bayi menjadi faktor utama yang sangat berpengaruh sehingga hal ini perlu menjadi perhatian (prioritas) dalam perencanaan program kegiatan kesehatan khususnya dalam rangka penurunan AKI dan AKB. Perkembangan kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat di bawah ini.

Angka kematian ibu dan bayi dalam kurun waktu 2008-2016



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lombok Tengah, Tahun 2017

2.1.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kabupaten Lombok Tengah tetap menjadi penekanan oleh pemerintah sebab merupakan sektor pendukung untuk fokus-

fokus pembangunan utama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan tersebut dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2010-2017

No	Capaian Pembangunan	Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah atraksi budaya yang memadukan keanekaragaman	2	2	3	3	4	4	5	5
2	Benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	16	16	16	16	16	16	16	16
3	Sanggar seni yang aktif	2	2	2	2	5	8	11	14

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, 2018

Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, Kabupaten Lombok Tengah telah mengembangkan pembinaan terhadap kesenian/budaya daerah yang meliputi atraksi budaya, pelestarian situs dan cagar budaya serta sanggar seni yang aktif. Atraksi budaya dan sanggar seni yang aktif mengalami peningkatan kuantitas yang ditunjukkan dengan tumbuhnya sanggar-sanggar seni. Sedangkan untuk benda situs dan kawasan cagar budaya mengalami peningkatan kuantitas dan kualitasnya ditingkatkan terus menerus secara bertahap.

Pada fokus pembangunan bidang keolahragaan Pemerintah Daerah telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: (1). Pembinaan dan pengembangan olahraga pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten melalui kegiatan olimpiade olahraga dan seni nasional (O2SN); (2). Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten. (3). Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; (4). Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten. Untuk pelaksanaan point 2, 3 dan 4 melalui program kerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Tengah.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

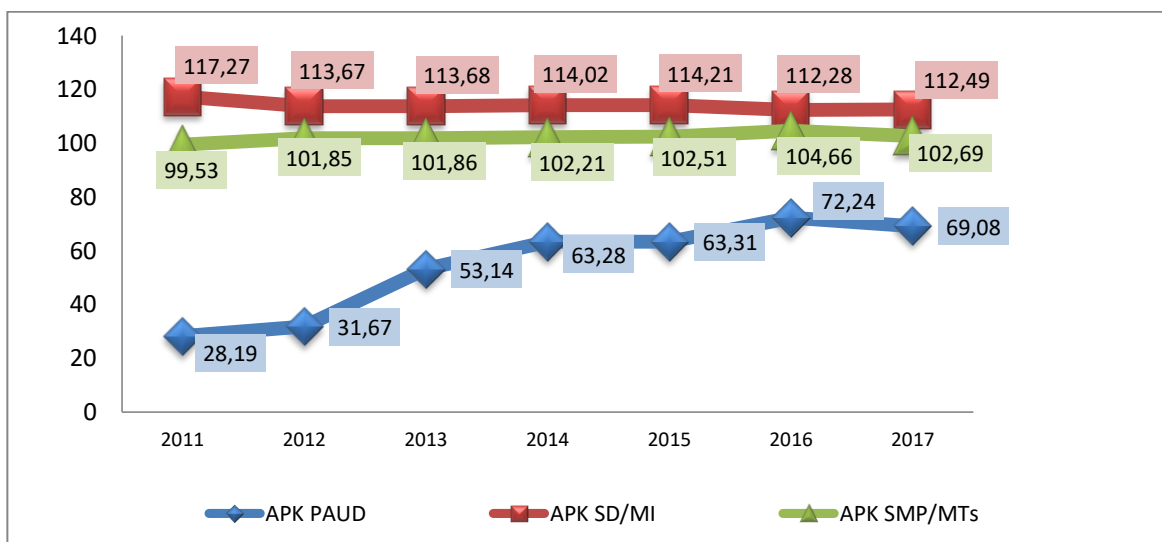
1. PENDIDIKAN

Hasil penyelenggaraan urusan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro. Secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka putus sekolah.

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar menunjukkan tren fluktuatif selama kurun waktu 2011-2017. APK PAUD mengalami peningkatan paling signifikan pada tahun 2016 yaitu 72,24%. Sedangkan APK SD/MI/MTs dari tahun 2011-2015 meningkat, namun terjadi penurunan pada tahun 2016. Untuk APK SMP/MTs mengalami peningkatan dari 99,53% pada tahun 2011 menjadi 102,69 pada tahun 2017

Grafik 2.8
APK PAUD dan Pendidikan Dasar
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2017

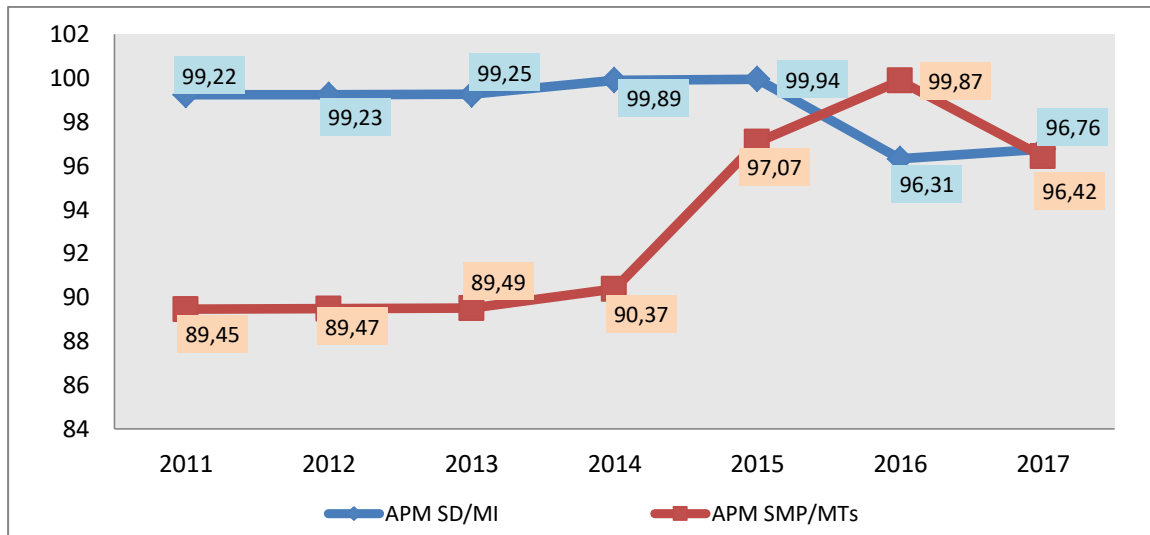


Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah, 2018

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2011-2017. APM SMP/MTs mengalami peningkatan paling tinggi yaitu 89,45% pada tahun 2011 menjadi 99,87% pada tahun 2016 sebagaimana grafik berikut.

**APM Pendidikan Dasar
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2017**

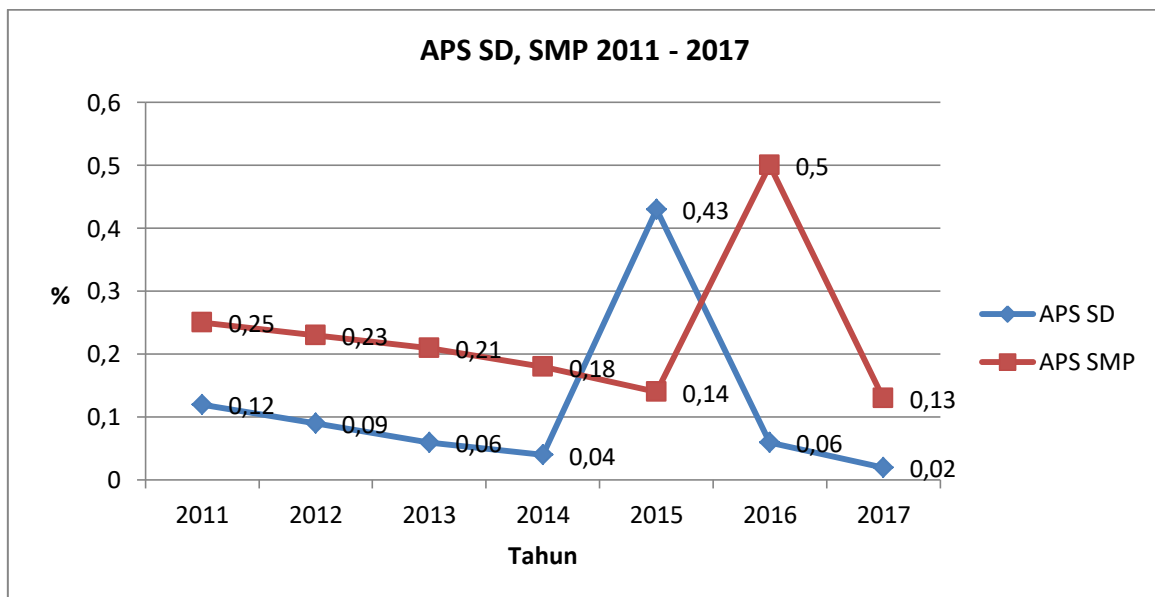


Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

c. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah SD meningkat tajam dari tahun 2014 sebesar 0,04% menjadi 0,43% pada tahun 2015. Sementara itu angka putus sekolah SMP menunjukkan tren menurun. Berikut disajikan perkembangan angka putus sekolah tahun 2011-2017.

**Grafik 2.9
Angka Putus Sekolah Tahun 2011-2017 (%)**



Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

Dinamika capaian pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah terkait APM, APS dan APK di atas dilaksanakan dengan dukungan peningkatan jumlah sekolah, murid dan guru sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012-2016

No	Tingkat Pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
1	TK	317	15030	1423
2	SD	595	88431	6198
3	SLTP	154	25679	2402
4	SMU	52	15165	1071
5	SMK	58	10054	894
Jumlah 2016		1176	154359	11988
2015		1148	152097	6684
2014		1.075	148.174	13378
2013		1.071	148.295	14428
2012		1.061	148.308	12705

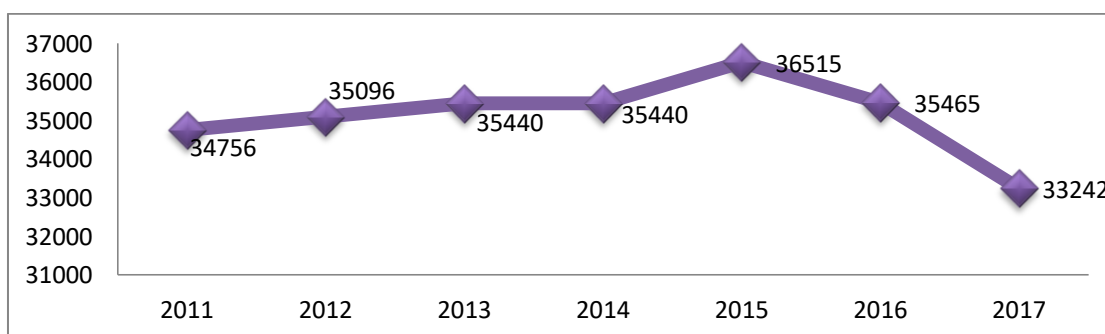
Sumber: Lombok Tengah Dalam Angka, 2017

2. KESEHATAN

a. Rasio Puskesmas

Jumlah puskesmas sampai dengan tahun 2015 sebanyak 25 unit. Pada tahun 2017 jumlah puskesmas meningkat menjadi 28 unit. Rasio puskesmas terhadap penduduk sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah. Perkembangan rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk sampai dengan tahun 2017 disajikan pada grafik berikut.

Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2017

Untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan, perlu ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Sejumlah fasilitas kesehatan mengalami peningkatan pada tahun 2014 diantaranya adalah pukesmas pembantu,

polindes dan posyandu. Berikut disajikan perkembangan jumlah sarana kesehatan tahun 2012-2016.

Tabel 2.13
Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2012-2016

Kecamatan	Puskesmas*	Puskesmas Keliling	Puskesmas Pembantu	Polindes*	Posyandu**
1. Praya Barat	3	2	9	9	124
2. Praya Barat Daya	2	2	8	9	123
3. P u j u t	3	3	15	16	203
4. Praya Timur	2	3	8	8	169
5. Janapria	2	2	8	11	133
6. K o p a n g	3	3	8	10	126
7. P r a y a	2	3	6	13	145
8. Praya Tengah	2	2	6	10	116
9. Jonggat	3	3	10	12	147
10. Pringgarata	2	2	4	10	121
11. Batukliang	2	2	8	9	132
12. Batukliang Utara	2	1	7	7	85
Jumlah 2016	28	28	97	124	1.624
2015	25	28	97	124	1,586
2014	25	28	97	124	1,586
2013	25	30	95	120	1,575
2012	25	27	94	119	1,506

Sumber: *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, 2017

** Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2017

Unsur penunjang fasilitas kesehatan lainnya yang tidak kalah penting adalah tenaga kesehatan. Pada tahun 2016 jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di Puskesmas yang ada di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 44 orang tenaga medis/dokter, 763 orang tenaga paramedis, dan 322 orang tenaga non medis.

Tabel 2.14
Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis Tahun 2012-2016

Kecamatan	Medis/Dokter	Paramedis	NonMedis
1. Praya Barat	5	67	24
2. Praya Barat Daya	3	46	24
3. Pujut	7	105	28
4. Praya Timur	5	67	26
5. Janapria	4	53	28
6. Kopang	2	68	31
7. Praya	4	79	34
8. Praya Tengah	3	52	23
9. Jonggat	3	58	36
10. Pringgarata	2	78	27

Kecamatan	Medis/Dokter	Paramedis	NonMedis
11.Batukliang	3	51	25
12.BatukliangUtara	3	39	16
2016	44	763	322
2015	47	753	322
2014	47	491	172
2013	33	491	135
2012	42	556	180

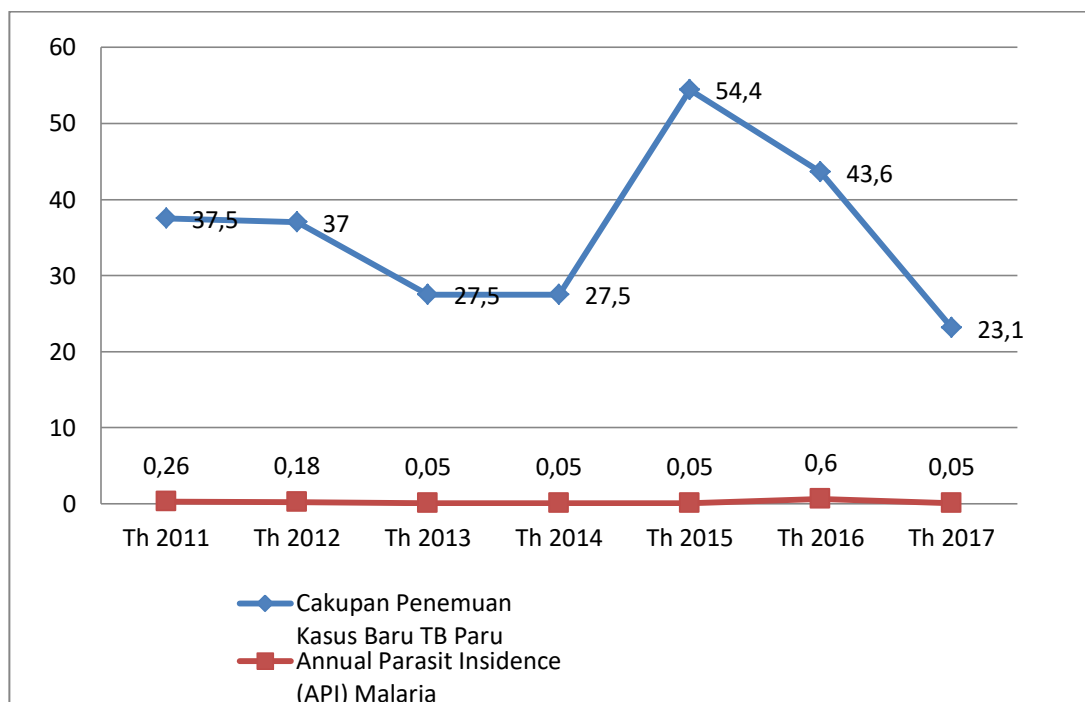
Sumber: Lombok Tengah Dalam Data, 2017

b. Prevalensi Penyakit Menular

Penemuan kasus TB yang dihitung menurut CDR (*Case Detection Rate*) yang ditargetkan sebesar 70%. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 target penemuan kasus TB belum pernah mencapai target. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya rasa malu di masyarakat untuk memeriksakan diri ke unit pelayanan kesehatan.

Untuk penyakit menular lainnya seperti malaria, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 API (*Annual Parasite Incidens*) kurang dari 1 per mil. Hal tersebut berarti bahwa hanya boleh ada 1 kasus setiap seribu penduduk serta tidak ada laporan kematian karena malaria.

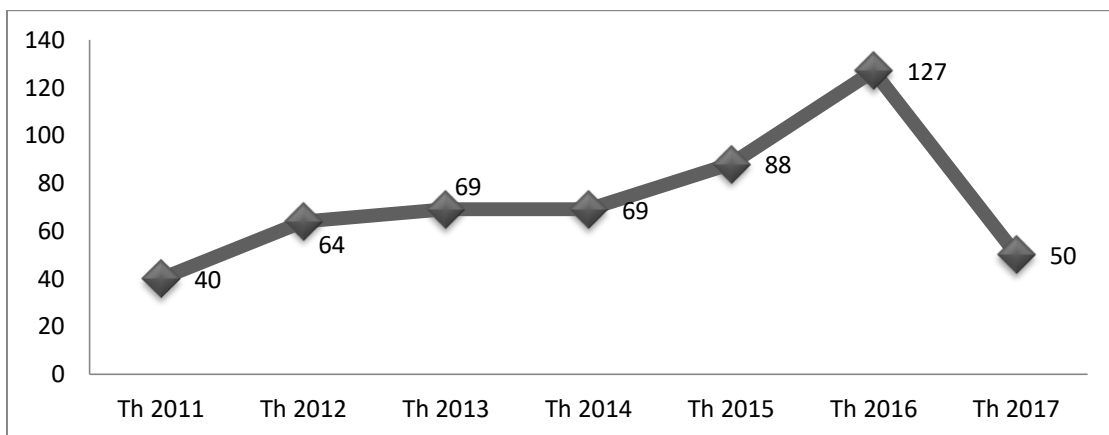
Grafik 2.10
Kejadian Penyakit Menular Tahun 2011-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2017

Kasus demam berdarah dengue (DBD) yang terjadi pada tahun 2011 sebanyak 40 kasus. Pada tahun 2012 DBD meningkat menjadi 64 kasus dan pada tahun 2013 DBD sebesar 69 kasus dan terus meningkat sampai tahun 2016 sebanyak 127 kasus dan menurun pada tahun 2017 menjadi 50 kasus.

Grafik 2.11
Jumlah Penyakit DBD Tahun 2011-2017

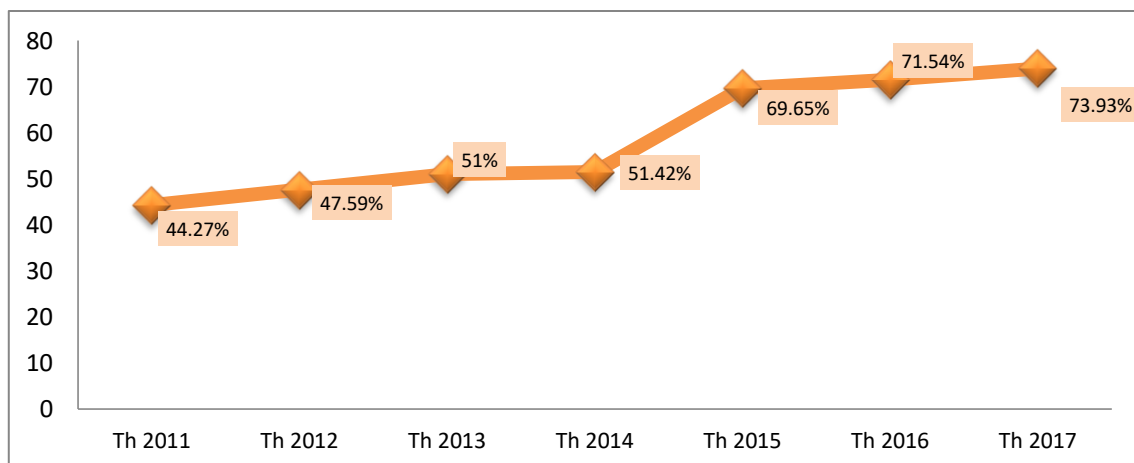


Sumber: Dikes Kabupaten Lombok Tengah, 2018

c. Persentase Rumah Sehat

Dari tahun 2011 sampai tahun 2017 persentase rumah sehat terus meningkat, berturut-turut 44,27% (tahun 2011); 47,59% (tahun 2012); 51% (tahun 2013); 51,42% (tahun 2014); 69,65% (tahun 2015); 71,54% (tahun 2016); dan 73,93% (tahun 2017) sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2.12
Prosentase Rumah Sehat Tahun 2011-2017



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2018

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penyelenggaraan urusandapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator antara lain panjang jalan mantap, rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga bersanitasi, dan irigasi.

a. Panjang Jalan Mantap

Jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2012 sepanjang 325,35 Km atau 44% dari 739,44 Km keseluruhan panjang jalan kabupaten. Peningkatan panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2017 menjadi 552,66 Km atau 68,24% dari total panjang jalan kabupaten.

Tabel 2.15
Perkembangan Jalan Mantap Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 – 2017

Tahun	Jalan Mantap		Jalan Tidak Mantap		Panjang jalan Kabupaten
	Km	%	Km	%	Km
2012	325,35	44,00	414,09	56,00	739,44
2013	407,95	55,17	331,49	44,83	739,44
2014	444,48	60,11	294,96	39,89	739,44
2015	477,31	64,55	262,13	35,45	739,44
2016	535,85	72,5	203,59	27,5	739,44
2017	552,66	68,24	257,22	31,76	809,88

Sumber: Dinas PUPR, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara kuantitas terjadi peningkatan panjang jalan mantap dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, namun secara prosentase terjadi penurunan pada tahun 2017 yang disebabkan oleh penambahan ruas jalan kabupaten sebagai akibat pengalihan status 70,44 Km jalan desa menjadi jalan kabupaten sehingga jalan kabupaten bertambah dari 739,44 Km menjadi 809,88 Km.

b. Irigasi

Luasan areal Daerah Irigasi terdiri 3 kewenangan yakni untuk luas areal diatas 3.000 Ha adalah kewenangan pusat sebesar 24.495 Ha, luas areal 1.000 s/d 3.000 Ha adalah kewenangan propinsi sebesar 12.911 Ha dan luas areal dibawah 1.000 Ha adalah kewenangan kabupaten yakni sebesar 12.403,35 Ha. Cakupan layanan jaringan irigasi mengalami penurunan, sampai dengan tahun 2014, cakupan layanan seluas 49.517 Ha. Pengurangan areal irigasi tersebut terjadi akibat alih fungsi lahan seperti pada pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), pembangunan pemukiman, perdagangan, jasa, dan lain-lain.

Kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten pada tahun 2010 dalam kondisi baik sepanjang 73.493,25 meter (57,73%) sedangkan kondisi rusak sepanjang 53.819,75 meter (42,27%). Kondisi tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2014, yaitu yang baik menjadi 93.502,25 meter (73,44%) dan yang rusak sepanjang 33.810,75 meter (26,56%).

Tabel 2.16
Luas Areal Irigasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014

No	Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)		Panjang Saluran (meter)		
		Potensial	Irigasi	Induk	Sekunder	Total
1	>3.000 Ha kewenangan Pusat	24.828	24.495	60.601	191.065	251.666
2	1.000 – 3.000 Ha kewenangan Propinsi	13.933	12.911	30.654	108.724	139.378
3	<1.000 Ha kewenangan Kabupaten	12.706	12.403,35	37.720	89.593	127.313
	Total	51.467	49.809.81	128.975	389.382	518.357

Sumber: Dinas PU dan ESDM, 2015

c. Tata Ruang

Perencanaan spasial wilayah terdiri dari rencana umum berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan rencana rinci berupa Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagai rencana umum tata ruang telah ditetapkan pada tahun 2011 sebagai pijakan umum pembangunan spasial di kabupaten. Sebagai tindak lanjut operasionalnya diamanatkan untuk menyusun rencana rinci berupa kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten. Tahun 2015 Pemerintah Lombok Tengah telah menetapkan sejumlah dokumen rencana tata ruang antara lain RTRW yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 tahun 2011; RDTR Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2006; Rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Praya dan Rancangan RDTR Kawasan Perkotaan Kopang. Selain itu telah disusun pula RTBL Kawasan Strategis Perkotaan Praya berdasarkan Perbup Nomor 80 Tahun 2015 dan RTBL Kawasan Strategis Kuta melalui Perbup Nomor 81 Tahun 2015.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Dalam kurun waktu 2011-2015 telah dipugar rumah tidak layak huni sebanyak 4.839 unit , yang didanai dari APBN sebanyak 2.696 unit, APBD I sebanyak 1.608 unit dan APBD II sebanyak 535 unit. Jumlah tersebut lebih kecil jika dibandingkan jumlah usulan

pada tahun 2010 sebanyak 72.194 unit. Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 berturut-turut telah dipugar rumah tidak layak huni sebanyak 67.374 unit, 531 unit, dan 1.532 unit

Untuk penyediaan layanan air bersih dalam kurun waktu 2011-2015 jumlah rumah tangga pengguna air bersih terus mengalami peningkatan. Persentase cakupan rumah tangga pengguna air bersih sampai tahun 2014 terakumulasi sebanyak 168.370 KK (71,15%) dan pada tahun 2015 bertambah sejumlah 2.315 KK sehingga terakumulasi pada akhir 2015 sejumlah 71,42%.

Grafik 2.13
Cakupan Layanan Pengguna Air Bersih Tahun 2010-2015

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan layanan air minum	60,77	63,15	65,42	67,5	74,5

Sumber: Dinas PU dan ESDM, 2015

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Konflik antar warga cenderung bersifat insidental dan semakin besar potensinya ketika ada acara-acara yang mengundang partisipasi dan konsentrasi massa. Jumlah kejadian kriminal pada tahun 2015 sebanyak 293 kejadian, tahun 2016 sebanyak 137 kejadian, tahun 2017 sebanyak 214 kejadian.

6. SOSIAL

Pelaksanaan Urusan sosial memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan dibidang sosial. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai indikator pelaksanaan pelayanan sosial tersebut dapat dilihat pada tabel yang disajikan di bawah ini yaitu terkait dengan program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dan program daerah sendiri.

Program pusat yang dilaksanakan di daerah dalam rangka perlindungan sosial diantaranya adalah program keluarga harapan (PKH), program beras miskin, jaminan kesehatan, dan beasiswa bagi masyarakat miskin. Selain itu ada juga program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Program ini memberikan dampak pada peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung pencapaian target pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Indikator pelaksanaan program tersebut secara umum dapat terlihat dari data dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.17
Jumlah RTSM Penerima Bantuan Tahun 2011-2017

KEC.	TAHUN													
	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	Jumlah RTSM Penerima (KK)	Jumlah Bantuan (Rp.000)	Jumlah RTSM Penerima (KK)	Jumlah Bantuan (Rp.000)	Jumlah RTSM Penerima (KK)	Jumlah Bantuan (Rp.000)	Jumlah RTSM Penerima (KK)	Jumlah Bantuan (Rp.000)	Jumlah RTSM Penerima (KK)	Jumlah Bantuan (Rp.000)	Jumlah RTSM Penerima (KK)	Jumlah Bantuan (Rp.000)	Jumlah RTSM Penerima (KK)	Jumlah Bantuan (Rp.000)
Batukliang	1.409	474.800	1.768	2.361.700	1.698	2.689.775	1.601	2.480.260	1.588	464.875	1.545	971.250	1.514	2.861.460
Batukliang Utara	762	292.220	751	1.102.130	754	1.228.235	1.997	3.211.202	1.992	649.250	1.929	1.239.575	2.047	3.868.830
Janapria	663	228.645	957	1.438.870	952	1.683.525	932	1.632.210	932	327.500	917	666.450	2.287	4.322.430
Jonggat	839	290.250	852	1.178.470	827	1.339.975	2.170	3.677.180	2.166	671.625	2.100	1.367.375	2.485	4.696.650
Kopang	2.172	605.340	2.312	2.824.550	2.221	3.323.712	2.135	3.169.600	2.124	630.000	2.068	1.221.975	2.331	4.405.590
Praya	2.829	927.750	2.908	3.788.980	2.870	4.591.480	2.733	4.415.580	2.720	837.125	2.654	1.784.375	2.670	5.046.300
Praya Barat	2.839	972.850	2.884	3.911.150	2.814	4.532.370	2.713	4.431.190	2.688	848.637	2.565	1.660.080	2.149	4.061.610
Praya Barat Daya	628	204.700	645	862.500	629	1.009.505	1.570	2.359.445	1.566	462.025	1.524	889.475	1.624	3.069.360
Praya Tengah	1.060	327.210	1.061	1.422.650	1.008	1.606.895	952	1.476.305	940	285.000	919	572.625	1.032	1.950.480
Praya Timur	718	241.700	735	1.017.600	728	1.169.070	699	1.092.970	696	209.000	687	423.925	1.459	2.757.510
Pringgarata	1.072	362.550	1.052	1.430.150	1.044	1.653.947	2.271	3.515.475	2.240	685.875	2.141	1.296.325	2.088	3.946.320
Pujut	2.003	706.280	2.038	3.052.140	2.002	3.579.995	4.269	7.312.220	4.213	1.479.375	4.025	2.861.900	3.740	7.068.600
TOTAL	16.994	5.634.295	17.963	24.390.890	17.547	28.408.485	24.042	38.773.637	23.865	7.550.287	23.074	14.955.330	25.426	48.055.140

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

Program daerah yang dilaksanakan mengacu pada target-target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dilihat capaian kinerjanya dalam tabel dibawah ini. Indikatornya terkait dengan PMKS yang memperoleh Bantuan sosial terkait pemenuhan kebutuhan dasar, PMKS yang menerima program pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Layanan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia, Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan penyandang cacat yang dilatih. Program-program pokok tersebut bersama pendukungnya memiliki dampak langsung untuk mengatasi persoalan dibidang sosial. Datanya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2011-2017

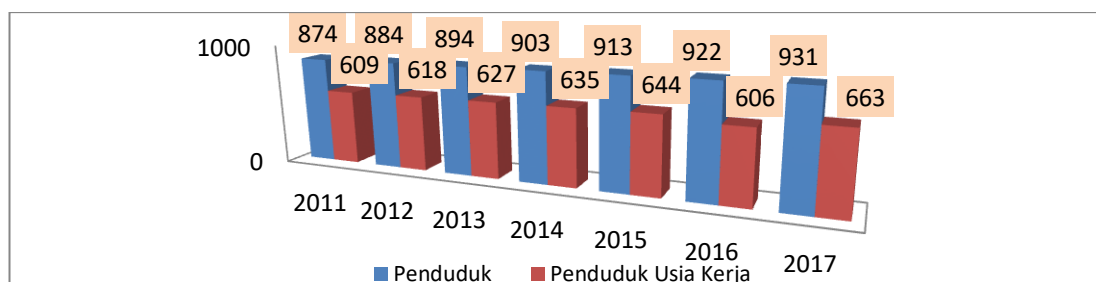
No	Uraian Indikator kinerja	TAHUN						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase PMKS Skala Kabupaten yg memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar	1,85	7,89	0,54	25,66	42,20	47,38	40,00
2	Persentase PMKS Skala Kabupaten yg menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE	0,88	1,90	1,37	0,64	38,98	1,87	4,32
3	Prosentase Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tdk potensial yg telah menerima jaminan sosial	2,51	2,51	2,30	1,6	5,05	5,05	5,05
4	Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	51 klpk	22 klpk	49 klpk	42 klpk	539 klpk	75 klpk	173 klpk
5	Jumlah Penyandang cacat yang dilatih	NA	NA	12 orang	20 orang	25 orang	16 orang	32 orang

Sumber: Dinas Sosial Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

7. TENAGA KERJA

Jumlah penduduk usia kerja meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk usia kerja, maka pemerintah daerah perlu memperluas kesempatan kerja untuk menyerap tambahan penduduk usia kerja. Jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2017 sebanyak 663.060 orang dari total jumlah penduduk 930.797orang (BPS Propinsi NTB, Keadaan Angkatan Kerja 2017).

Grafik 2.14
Perkembangan Jumlah Penduduk dan Penduduk Usia Kerja Tahun 2011-2017 (ribu jiwa)



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rasio partisipasi murid perempuan SD dan SMP di Kabupaten Lombok Tengah sudah mencapai diatas 90%. Rasio partisipasi murid perempuan SD dari tahun 2010-2013 mengalami peningkatan hingga mencapai 98,96%. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 93,74%, begitu juga halnya dengan rasio murid perempuan SMP mengalami penurunan dari 100,87% tahun 2013 menjadi 97,00% tahun 2014. Indikator lainnya yaitu kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor pertanian mengalami penurunan dari 51,80% tahun 2010-2013 menjadi 31,82% tahun 2014.

Tingkat partisipasi perempuan dalam kepengurusan partai politik dan ORSOS cenderung stabil seperti tersaji pada tabel di bawah ini. Persentase peserta KB perempuan dibanding pria mengalami peningkatan menjadi 97,48% tahun 2015. Ini artinya jumlah pria yang menggunakan alat kontrasepsi belum mengalami peningkatan yang signifikan dengan beberapa penyebab, antara lain jenis alat kontrasepsi bagi pria terbatas pada kondom dan Medis Operatif Pria (MOP).

Tabel 2.19
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio partisipasi murid perempuan SD	98,24	99,06	98,96	93,74	90,79
2	Rasio partisipasi murid perempuan SMP	98,07	99,01	100,87	97	88,67
3	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor non pertanian	28,06	31,31	23,1	31,82	21,74
4	Proporsi lurah/kepala desa perempuan	0	0,71	0	0	0
5	Persentase camat perempuan	8,3	8,3	8,3	8,3	0
6	Proporsi pejabat perempuan di lingkungan Pemda	44,75	18,89	17,46	17,68	17,09
7	Proporsi anggota parlemen perempuan	6,6	6,6	8,88	8	8
8	Persentase perempuan sebagai pengurus Organisasi Sosial (ORSOS)	30	31	36,05	36,05	22,55
9	Persentase peserta KB perempuan dibanding Laki - Laki	97,7	97,4	97,29	97,41	97,48

Sumber: Laporan Capaian MDGs Kabupaten Lombok Tengah, 2015

Khusus mengenai perlindungan terhadap anak, Pemerintah kabupaten Lombok Tengah bersama DPRD telah menetapkan regulasi lokal yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

Tabel 2.20
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Tertangani

Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

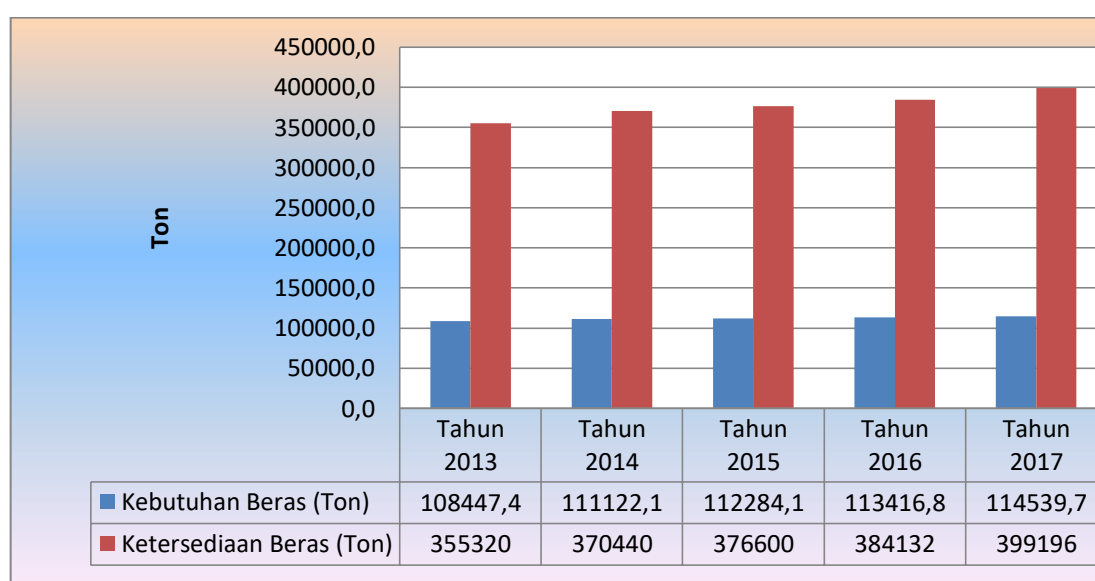
Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani
2013	88	88	30	30
2014	76	76	29	29
2015	51	51	48	48
2016	72	72	80	80
2017	53	53	59	59

Sumber : DP3AP2KB Kab. Lombok Tengah, 2018

9. PANGAN

Indikator penting yang menunjukkan ketahanan pangan daerah adalah ketersediaan pangan utama. Ketersediaan pangan utama tersebut harus terpenuhi dengan cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka menjamin ketersediaan pangan telah melaksanakan program peningkatan produksi pangan melalui intensifikasi, diversifikasi maupun revitalisasi pertanian. Kinerja ketahanan pangan menunjukkan kinerja baik yang diindikasikan dengan tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat. Gambaran kondisi kebutuhan dan ketersediaan pangan utama (beras) dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

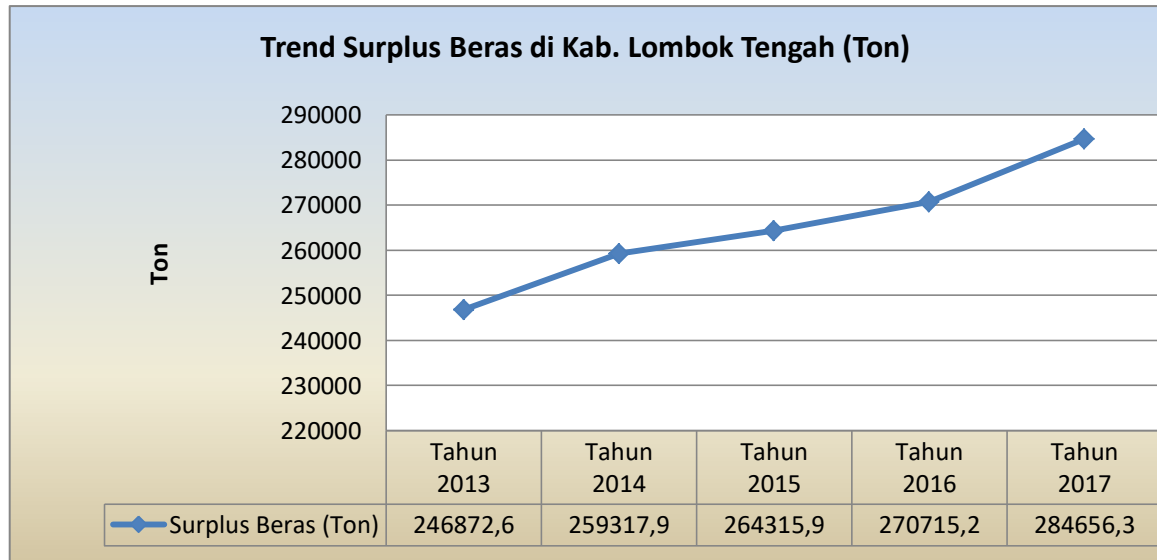
Grafik 2.15
Perkembangan ketersediaan pangan (beras) di Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2013 - 2017



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2018

Grafik diatas menunjukkan Kabupaten Lombok Tengah memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik dimana ketersediaan pangan melebihi kebutuhan pangan masyarakat. Data menunjukkan angka ketersediaan pangan beras rata-rata sebesar 336,84% dari kebutuhan. Angka aktual surplus beras dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.16
Tren Surplus Beras di Kabupaten Lombok Tengah (ton)



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2018

Angka kecukupan konsumsi energi dan protein juga menunjukkan capaian yang baik, dimana tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat Lombok Tengah melebihi standar konsumsi energi protein dan energi yang telah ditetapkan. Pada aspek keragaman konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan kinerja yang baik pula dengan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Perkembangan konsumsi energi, konsumsi protein dan skor PPH dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Perkembangan capaian Pola Pangan Harapan (PPH)
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2017

No	Komponen	Target/ Standar	Capaian PPh Lombok Tengah				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Konsumsi energi (Kkal/kap/hr)	2.000 Kkal/kap/Hari	2.304,0	2.863,0	2.452,0	2.317,0	2.518,9
2	Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	52 gr/kap/Hari	67,4	90,6	95,0	96,6	128,3
3	Skor PPH	85	83,5	84,8	85,6	85,9	86,2

10. PERTANAHAN

Kegiatan pengadaan tanah pada Tahun 2011-2014 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dan usulan dari SKPD. Selain itu pengadaan tanah juga difokuskan pada partisipasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memfasilitasi pembangunan akses jalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Pada tahun 2011, pemerintah daerah telah menyediakan tanah bagi pembangunan fasilitas dan atau penyelenggaraan kepentingan umum seperti pembangunan prasarana kesehatan, prasarana pertanian, prasarana pendidikan dan jalan umum.

Pada tahun 2012, Pelaksanaan urusan pertanahan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan usulan dari SKPD terkait serta untuk memfasilitasi pembangunan akses jalan Bandara Internasional Lombok (BIL). Pada tahun 2013, pengadaan tanah dilaksanakan untuk pembangunan prasarana kesehatan, prasarana pertanian, prasarana pendidikan dan jalan umum. Pada tahun 2013 dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pembangunan akses jalan untuk kepentingan umum di Kampus IPDN Regional NTB yang berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun legalitas status tanah di Kabupaten Lombok Tengah tiap tahun mengalami kenaikan seperti bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.22
Proporsi Rumah Tangga dengan Sertifikat Kepemilikan Tanah (%)
Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Proporsi rumah tangga dengan sertifikat kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)	2,8	3,1	33,66	52	52,37

Sumber: Laporan Capaian MDGs Kabupaten Lombok Tengah, 2015

11. LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Perlindungan Mata Air (PERMATA) berhasil menyelamatkan mata air sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 176 titik meningkat dari tahun 2010 yang hanya berjumlah 95 titik.

Pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yaitu tindak lanjut laporan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Di Bidang Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, telah dilakukan pemantauan,

inventarisasi dan indentifikasi terhadap perusahaan atau kegiatan industri yang berpotensi menghasilkan limbah dan telah mengolah air limbah serta membuang air limbah ke media lingkungan. Perkembangan ijin lingkungan yang diterbitkan disajikan pada table berikut.

Tabel 2.23
Data Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2017

Uraian	Tahun/ Kasus						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laporan Kasus Lingkungan Hidup	3	7	3	10	10	6	11
Jumlah Ijin Lingkungan yang Diterbitkan (SPPL/UKL/UPL/Amdal)	40	74	768	1073	1069	1192	905

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Disamping melaksanakan upaya-upaya di atas, pemerintah daerah juga telah melaksanakan kegiatan pemulihan lahan kritis dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. Berdasarkan data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 2015 Luas lahan kritis yang dipulihkan sampai dengan Tahun 2015 seluas 2.000 Ha dan dilakukan secara bertahap selama 5 Tahun atau tiap tahun 400 Ha Lahan yang dikonservasi dengan cara penanaman pohon, sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait.

12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa pelayanan pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Pada kurun waktu 2013-2017 Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melayani pembuatan kartu penduduk sebanyak 574.193 orang atau 76,93% dari 746.396 penduduk wajib KTP. Perkembangan pelayanan administrasi kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Kepemilikan KTP di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

Tahun	Penduduk			
	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Yang sudah punya KTP	Persentase yang punya KTP
2013	1.173.149	861.758	656.006	76,12
2014	1.027.883	760.404	599.464	78,83
2015	1.028.436	741.380	482.810	65,12
2016	1.029.170	752.808	534.223	70,96
2017	1.033.619	746.396	574.193	76,93

Sumber :Dinas Kependudukan dan CatatanSipilKab. Lombok Tengah, 2018

Disamping pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan pelayanan pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Pada tahun 2016, jumlah penduduk yang membuat Kartu Keluarga sebanyak 217.516 keluarga atau sebanyak 71,21% dari jumlah kepala keluarga. Kepemilikan kartu keluarga meningkat sebanyak 20,87% pada tahun 2017 menjadi 262.916 KK atau 78,10% dari jumlah kepala keluarga. Sedangkan yang membuat Akta Kelahiran pada tahun 2017 berjumlah 758.730 jiwa, meningkat sebanyak 15,74% dibandingkan tahun 2016. Data kepemilikan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25
Kepemilikan Kartu Keluarga
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Keluarga Sudah Cetak KK	% Keluarga Sudah Cetak KK	Keluarga Sudah Cetak KK	% Keluarga Sudah Cetak KK
1	Praya	30.299	90,31	33.052	84,19
2	Jonggat	24.219	84,31	26.834	83,67
3	Batukliang	18.059	78,78	22.443	81,64
4	Pujut	26.132	81,82	33.424	92,72
5	Praya Barat	16.441	66,53	18.132	67,93
6	Praya Timur	15.432	65,92	21.373	85,69
7	Janapria	17.164	63,72	20.052	68,21
8	Pringgarata	15.945	67,08	21.034	83,73
9	Kopang	16.386	56,46	21.431	69,34
10	Praya Tengah	15.576	68,21	20.147	83,48
11	Praya Barat Daya	11.279	62,88	12.442	63,87
12	Batukliang Utara	10.584	53,86	12.552	59,54
	TOTAL	217.516	71,21	262.916	78,10

Sumber : DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Tengah, 2018

Kepemilikan Akta Kelahiran
Di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2017

No.	Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Persentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Persentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran

No.	Kecamatan	Tahun 2016			Tahun 2017		
		Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Persentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk	Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Persentase Penduduk Memiliki Akta Kelahiran
1	Praya	118.315	71.064	60,06	121.871	80.201	65,81
2	Jonggat	95.975	60.769	63,32	97.104	69.812	71,89
3	Batukliang	78.370	54.759	69,87	83.460	64.976	77,85
4	Pujut	112.665	57.906	51,40	116.212	69.502	59,81
5	Praya Barat	84.896	52.519	61,86	84.094	64.423	76,61
6	Praya Timur	75.790	47.367	62,50	74.868	55.599	74,26
7	Janapria	87.342	55.629	63,69	87.121	63.953	73,41
8	Pringgarata	78.370	54.759	69,87	76.968	61.713	80,18
9	Kopang	96.839	58.872	60,79	95.153	66.537	69,93
10	Praya Tengah	76.129	52.684	69,20	74.289	58.785	79,13
11	Praya Barat Daya	58.845	40.683	69,14	58.143	46.763	80,43
12	Batukliang Utara	64.893	46.038	70,94	64336	56.466	87,77
	Total	1.029.170	655.548	63,70	1.033.619	758.730	73,41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lombok Tengah, 2018

13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah desa telah dilakukan peningkatan pada aspek SDM, kelembagaan dan system. Untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur telah dilaksanakan berbagai jenis pelatihan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.26
Jenis Pelatihan Bagi Aparatur Desa Tahun 2013-2017

No	Jenis Pelatihan	Tahun Pelaksanaan				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pelatihan pengelolaan keuangan dan asset desa	V	V	V	V	V
2	Pelatihan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan			V		
3	Pelatihan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa			V		V
4	Pelatihan administrasi umum dan pengelolaan keuangan desa bagi Sekretaris Desa		V	V	V	
5	Pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi Kepala Desa	V	V	V	V	V
6	Pelatihan manajemen pemerintahan desa bagi anggota BPD			V	V	V
7	Pelatihan administrasi kependudukan bagi Kepala Dusun			V		
8	Pelatihan administrasi desa bagi Kepala Urusan		V	V		V
9	Pelatihan penyusunan dan pendayagunaan profil desa (SAID)				V	V
10	Pelatihan pengelolaan keuangan bagi pengelola BUMDes				V	V
11	Pelatihan pamsimas				V	V

Sumber: DPMD Kab. Lombok Tengah, 2018

Untuk peningkatan kapasitas keuangan pemerintah desa telah dialokasikan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Lainnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.27
Jumlah ADD, DD dan Bantuan Keuangan Lainnya untuk Desa
di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2017

NO	TAHUN	ADD dan DD	BANTUAN KEUANGAN LAINNYA	TOTAL
1	2013	21.901.985.176	16.299.600.000	38.201.585.176
2	2014	22.743.185.176	17.999.400.000	40,742,585,176
3	2015	141.531.850.297	7.011.416.600	148.543.266.897
4	2016	200.704.825.700	3.359.800.000	204.064.625.700
5	2017	224.955.767.464,90	4.987.000.000	229.942.767.464,90
6	2018	261.938.694.400	1.692.000.000	263.630.694.400

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah, 2018

Untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa telah ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan daerah tentang pemerintahan desa yakni:

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemilihan Kepala Desa
2. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDes yang ditetapkan setiap tahun.
3. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan setiap tahun.
4. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan ADD yang ditetapkan setiap tahun
5. Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa
6. Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Adat di setiap desa
7. Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
8. Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Masyarakat Desa
9. Peraturan Bupati tentang Pilkades Serentak Tahun 2018
10. Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan Berbasis Ekowisata
11. Rancangan Peraturan Bupati tentang Bumdes
12. Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa
13. Peraturan Bupati tentang Perangkat Desa
14. Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Pemdes dan BPD
15. Peraturan Bupati tentang BPD

14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Perbandingan antara jumlah akseptor aktif dan pasangan usia subur di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat sejak tahun 2012 sampai 2015 dari 73,31% menjadi 74,13%, namun turun pada tahun 2017 menjadi 71,44%. Adapun perkembangan pasangan usia subur dan akseptor aktif tahun 2012-2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.28
Tingkat Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012-2017

Tahun	Pasangan Usia Subur	Akseptor Aktif	% Akseptor Aktif Terhadap PUS
2012	213,190	156,299	73,31
2013	224.750	157.632	70,14
2014	225.564	172.354	76,41
2015	233.914	173.404	74,13
2016	234.065	166.967	71,44
2017	234.065	166.967	71,44

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Tengah, 2018

15. PERHUBUNGAN

Sampai dengan tahun 2018 jumlah rambu jalan yang dimiliki sebanyak 1.3114 buah. Pagar pengaman jalan telah terpasang di 5137.37 m², dan patok tikungan sebanyak 156. Hal tersebut diharapkan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Tabel 2.29
Fasilitas Keselamatan LLAJ (Rambu / RPPJ) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

No	Nama Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah (Unit)	Lokasi	Kondisi	Status Jalan	Keterangan
----	----------------------------------	---------------	--------	---------	--------------	------------

No	Nama Fasilitas Keselamatan Jalan	Jumlah (Unit)	Lokasi	Kondisi	Status Jalan	Keterangan
1	Traffic Light	11	Simpang 4 Mantang, Simpang 4 Kopang, Simpang 4 Montong Gamang, Simpang 4 Biao, Simpang 4 Balungadang, Simpang 4 Rabitah, Simpang 4 Pertokoan Praya, Simpang 4 Kodim, Simpang 4 Puyung, Simpang 4 SPBU Praya	Baik Baik Mati Mati Baik Baik Baik Baik Baik Baik	Jalan Nasional Jalan Nasional Jalan Nasional Jalan Propinsi Jalan Propinsi Jalan Nasional Jalan Nasional Jalan Propinsi Jalan Perkotaan Jalan Perkotaan	Diperlukan pemeliharaan
2	Warning Light	4		Kurang Baik	Jalan Perkotaan	Diperlukan pemeliharaan
3	RPPJ	109		Baik	Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten	Di kawasan wisata
4	Marka Jalan	5137,3 7 m ²	Jalan Kabupaten	Baik	Jalan Kabupaten, Jalan Propinsi, Jalan Nasional	Sebagian rambu hilang, rusak.
5	Pagar Pengaman Jalan	130	Jalan Kabupaten	Baik	Jalan Kabupaten	
6	Rambu Jalan	1274	Jalan Kabupaten	Baik	Jalan Kabupaten	
7	Patok Tikungan	156	Pringgarata	Baik	Jalan Kabupaten	
8	Cermin Tikungan	4	Batukliang Utara		Jalan Kabupaten	
9	Traffic Count	20				
10	Halte	5	Awang, Kuta, Mawun, Selong Belanak, dan Teratak			

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah 2018

Selain itu untuk mendukung kelancaran sarana transportasi untuk masyarakat sampai dengan tahun 2015 pemerintah daerah telah membuka 8 jalur perintis yang tersebar di beberapa kecamatan baik di wilayah selatan, tengah maupun utara. Pembukaan trayek perintis ini diharapkan mampu mendukung aktifitas ekonomi masyarakat khususnya masyarakat perdesaan.

Tabel 2.30
Trayek dan Trayek Perintis

No	Trayek Lama	Trayek Perintis
1	Renteng- Mantang – Aik Bukak	Mantang – Aik Bukak-Setiling
2	Renteng- Mantang – Pancor Dao	Mantang – Pancor Dao- Tratak
3	Renteng- Kopang – Mt. Gamang-Janapria-Ganti	Renteng –Darek-Batujangkih

No	Trayek Lama	Trayek Perintis
4	Renteng-Kopang-Wajegeseng	Renteng-Pemepek-Rarung
5	Renteng- Mujur – Awang	Selong Blanak-Kuta –Awang
6	Renteng- Mujur – Janapria	Renteng- Sengkol-Kuta Gerupuk
7	Renteng- Mujur – Kruak	Sengkol-Teruwai-Awang
8	Renteng-Batunyale-Sengkol- Kuta	Puyung-KODIM-KPPRD-Pendopo-Banjar-Biao-Jontlak-RSUD-Rabitah-Toyang-Tengari-Tebero-Renteng-Puyung. (Bus angkot dalam Kota/angkutan Pelajar)
9	Renteng-Penujak-Sengkol- Kuta	
10	Renteng-Penujak-Mangkung- Selong Blanak	
11	Renteng-Darek- Pelambik	
12	Renteng- Puyung- Bunjeruk	

Sumber: Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Lombok Tengah Tahun 2015

16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah telah dipasangnya peralatan infrastruktur jaringan pada semua SKPD dan Kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah dan telah dapat dilakukan komunikasi data serta telah dibangun situs resmi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yakni www.lomboktengahkab.go.id dengan rata-rata kunjungan 808 pengunjung per bulan.

Di bidang pengelolaan *e-government* telah dimanfaatkan beberapa sistem informasi yang mendukung pelaksanaan urusan umum pemerintahan diantaranya SIPD-SIMDA Penganggaran, e-MONEV, SIMTASKIN, SIMPBB, SIMPEG, SIMKESDA, e-AUDIT, SIAK, e-PROUCEMENT dan SIM pengadaan barang dan jasa serta dalam proses pelaksanaan SIMDA Perencanaan.

17. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH

Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan khususnya terhadap UMKM kategori usaha Mikro. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Bupati Lombok Tengah untuk menciptakan 10.000 wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pelatihan serta bantuan sarana usaha bagi para wirausaha baru.

Tabel 2.31
Jumlah UMKM di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

Tahun	Kategori Usaha			Jumlah
	Mikro	Kecil	Menengah	
2013	4.943	1.398	30	6.371
2014	5.308	1.399	36	6.743
2015	155.477	1.464	30	156.971

2016	155.997	1.476	34	157.498
2017	157.224	1.484	36	158.744

Sumber: Dinas Koperasi UKM Kab. Lombok Tengah, 2018

18. PENANAMAN MODAL

Capaian kinerja urusan penanaman modal daerah selama kurun waktu 2011-2015 secara umum mengalami perkembangan yang signifikan. Kondisi ini antara lain didukung oleh dinamika perizinan dan penanaman modal secara regional dan nasional serta adanya berbagai perbaikan dari sistem pelayanan dan proses penerbitan ijin investasi. Juga didukung oleh pengembangan system informasi penanaman modal, quick respon pengaduan masyarakat terkait perijinan serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan perijinan. Hal tersebut berdampak positif terhadap jumlah ijin investasi yang diterbitkan serta terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah.

Capaian tersebut telah didukung dengan telah ditetapkannya beberapa peraturan terkait penanaman modal antara lain:

1. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah .
2. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan.
3. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Paten.
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah.
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Lombok Tengah.
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.

Selain itu telah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal, Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan. Juga Peraturan Bupati tentang Insentif dan Disinsentif Penanaman Modal serta Peraturan Bupati tentang Perijinan Online.

19. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Dalam rangka pembinaan kepemudaan dan olahraga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pembinaan melalui organisasi-organisasi induk, seperti PRAMUKA, KNPI, Karang Taruna, OSIS dan KONI dalam bidang keolahragaan. Pembinaan yang dilakukan berupa pemberian dana hibah dan pelaksanaankompetisi-kompetisi untuk meningkatkan prestasi dalam kedua bidang tersebut.

Dalam kurun lima tahun terakhir bidang kepemudaan Kabupaten Lombok Tengah sering kali mengirimkan duta-dutanya dalam ajang pemuda pelopor dan karang taruna teladan tingkat nasional yang berhasil meraih juara I, II dan III.

Dalam bidang olahraga untuk kalangan pelajar pembinaan dan penjarangan bibit-bibit atlet potensial pada tingkat SD, SMP, SMA dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN). Selanjutnya untuk olahraga prestasi pembinaan dilaksanakan melalui KONI Kabupaten dengan tolok ukur kegiatan melalui pekan olahraga berjenjang yaitu Pekan Olahraga Kabupaten, Pekan Olahraga Provinsi dan Pekan Olahraga Nasional.

Dalam rangka menunjang pola-pola pembinaan keolahragaan tersebut, untuk kalangan pelajar di masing-masing sekolah telah disediakan fasilitas olahraga minimal. Sedangkan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Pemerintah Daerah telah menyediakan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Gedung olahraga sebanyak 2 unit di Kelurahan Praya dan Desa Puyung;
2. Lapangan dan fasilitas olahraga skala Kabupaten untuk cabang-cabang olahraga sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, bola basket, bola volly, sepak takraw dan panjat tebing;
3. Lapangan olahraga skala kecamatan sebanyak 12 unit di 12 Kecamatan.

Dengan pembinaan yang didukung oleh sarana prasarana yang dimiliki, prestasi yang diraih oleh atlet-atlet Kabupaten Lombok Tengah secara perorangan maupun beregu dari beberapa cabang olahraga pada setiap multi event olahraga mengalami peningkatan, baik di level daerah, nasional dan internasional. Perkembangan prestasi olahraga di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Prestasi Olah Raga

No.	Cabang	Prestasi
-----	--------	----------

	Olahraga	Daerah (PORPROV/Kejur Prov)	Nasional (PON/Kejurnas)	Internasional
1	Pencak Silat	- Emas (2010)/Porprov		
2	Kempo	- 2 Emas (2010)/Porprov - 3 Emas (2014)/Porprov - 3 Perak (2014)/Porprov - 5 Perunggu (2014) Porprov - 5 Emas (2017)/Kejuaraan Invitasi Kempo Antar Pelajar dan Mahasiswa - 1 Perunggu (2017)/Kejuaraan Invitasi Kempo Antar Pelajar dan Mahasiswa		
3	Karate	- 2 Emas (2014)/Porprov - 2 Perak (2014)/Porprov - 5 Perunggu (2014)/Porprov		
4	Taekwondo	- 2 Emas (2010)/Porprov - 2 Emas (2014)/Porprov - 2 Perak (2014)/Porprov - 4 Perunggu (2014)/Porprov - 4 Emas (2017) Kejur Prov - 2 Perak (2017) Kejur Prov - 3 Perunggu (2017) Kejur Prov	1 Emas (2017)/Kejurnas	- 1 Emas (2017) Bandung Taekwondo Internasional - 1 Perak (2017) Bandung Taekwondo Internasional
5	Tarung Derajat	- 1 Emas, 3 Perak dan 4 Perunggu (2014)	- 1 Emas (2016)	
6	Billiard	- 2 Emas (2010)/Porprov - 2 Emas (2014)/Porprov - 3 Perak, 3 Perunggu (2014)/Porprov	1 Emas, 1 Perak, 8 Perunggu (2017) POPNAS	
7	Panjat Tebing	- 2 Emas (2010)/Porprov - 2 Perak, 3 Perunggu (2014)/Porprov	1 Emas (2017)/Kejurnas FPTI	1 Emas (2017)/Open Turnamen Singapura
8	Futsal	- 2 Emas (2010)/Porprov - 1 Emas (2014)/Porprov		
9	Atletik	- 1 Emas, 1 Perak (2014)/Porprov	- 1 Emas (2017)/POMNas XV - 1 Emas (2017) Kejurnas	
10	Renang	- 4 Perak, 5 Perunggu (2014) Porprov	-	
11	Senam	- 3 Perak, 5 Perunggu (2014) Porprov	-	
12	Tinju	- 4 Perunggu (2014)/Porprov	-	
13	Bola Basket	- 2 Perunggu (2014)/Porprov	-	
14	Bridge	- 1 Perunggu (2014)/Porprov - 1 Perak (Beregu,2017)/HUT RI ke 72	-	
15	Bola Volly	- 2 Perak (2017)/Kejurda NTB	-	

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kab. Lombok Tengah, 2018

20. STATISTIK

Dalam rangka penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Lombok Tengah telah dilakukan berbagai program dan kerjasama penyediaan data dan informasi pembangunan daerah seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33
Jenis Kegiatan Urusan Statistik di Kabupaten Lombok Tengah

No	Kegiatan	Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kerjasama Penyusunan Lombok Tengah Dalam Angka/ Statistik dan Spasial kabupaten Lombok Tengah	V	V	V	V	V	V
2	Kerjasama penyusunan analisa PDRB Kab. Lombok Tengah	V	V	V	V	V	V
3	Kerjasama Penyusunan Kecamatan Dalam Angka/Statistik dan Spasial Kecamatan	V	V	V	V	V	V
4	Kerjasama Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lombok Tengah	-	V	V	V	V	V
5	Koordinasi, Konsolidasi, dan Validasi Data	V	V	V	V	V	V
6	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Lombok Tengah	-	V	V	V	V	V
7	Koordinasi dan Konsolidasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	V	V	V	V	V	V
8	Penyusunan Statistik Sektoral (Profil Pendidikan, Kesehatan, Bencana, Infrastruktur, Statistik Lingkungan Hidup Daerah, Ketersediaan Pangan)	V	V	V	V	V	V
9	Inisiasi Forum Data Daerah	-	-	-	V	-	V

Sumber: Bappeda Kabupaten Lombok Tengah, 2017

21. PERSANDIAN

Dalam rangka percepatan penyampaian informasi kebijakan kepala daerah telah dibangun SMS *gateway* sebagai media informasi dan komunikasi internal kepala daerah dengan para pemangku kepentingan dan media komunikasi eksternal kepala daerah dengan masyarakat.

22. KEBUDAYAAN

Event seni dan budaya yang diselenggarakan setiap tahunnya di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Penyelenggaraan Event Seni dan Budaya

Event Seni dan Budaya	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Waktu Pelaksanaan
Bau Nyale	v	V	v	v	v	v	v	Februari-Maret
Perang Timbung	v	V	v	v	v	v	v	Setelah Idul Fitri
Nedde	v	v	v	v	v	v	v	Menjelang Musim Tanam
Lebaran Topat	v	v	v	v	v	V	v	Setelah Idul Fitri

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah, 2017

23. PERPUSTAKAAN

Dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca, Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki satu unit Perpustakaan Daerah dan dilengkapi dengan dua unit perpustakaan keliling. Disamping itu pembinaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat (Masjid dan Desa) terus dilakukan secara intensif. Untuk mengetahui tingkat kunjungan dan minat baca masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Jumlah Pengunjung dan Koleksi Buku Perpustakaan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 - 2017

No	Tahun	Jumlah Pengunjung (Orang)	Jumlah Koleksi Buku (Eksemplar)
1	2013	1.399	45.319
2	2014	1.401	50.319
3	2015	1.433	60.529
4	2016	22.169	74.567
5	2017	22.950	79.841

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah, 2018

24. KEARSIPAN

Untuk meningkatkan kualitas kearsipan di Kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan data yang ada jumlah tenaga arsiparis di Kabupaten Lombok Tengah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 stagnan, dimana jumlah tenaga arsiparis hanya 1 (satu) orang. Jumlah ini baru mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 11 orang dan menurun kembali menjadi 2 orang di tahun 2016 dikarenakan mutasi dan sedang dalam proses pengusulan legalitas arsiparis sebanyak 5 orang, sehingga kinerja dalam hal pemilihan arsip inaktif dari tahun 2011 sampai tahun 2017 belum optimal.

Tabel 2.36
Jumlah Arsiparis dan Arsip Inaktif Yang dipilah

No	Tahun	Jumlah Arsiparis	Arsip Inaktif Yang Dipilah
1	2013	1	100.000
2	2014	1	100.000
3	2015	11	100.000
4	2016	2	150.750
5	2017	2	138.672

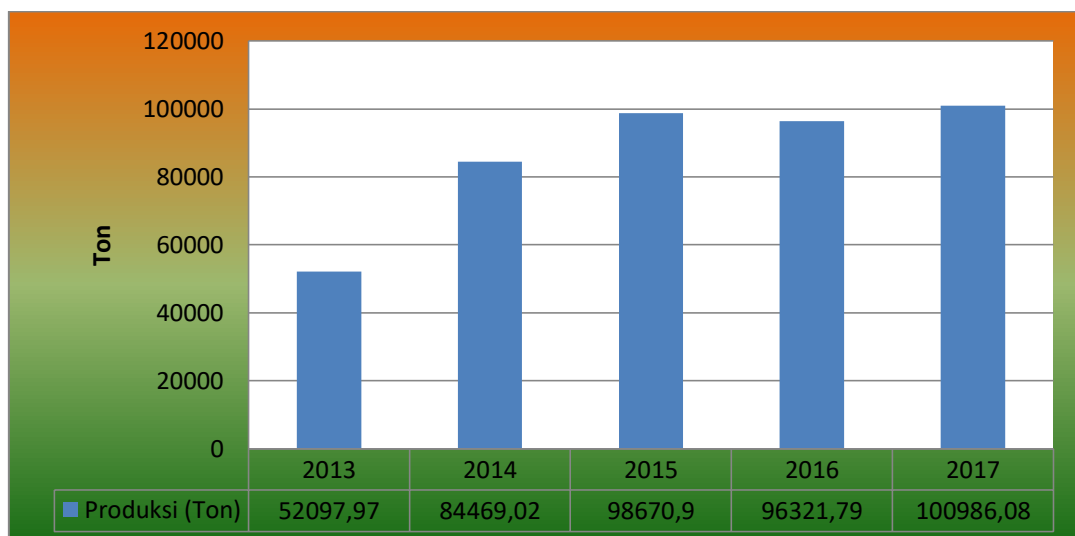
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lombok Tengah, 2018

2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. PERIKANAN

Produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Lombok Tengah bersumber dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya, namun perikanan budidaya berkembang lebih baik dibandingkan dengan perikanan tangkap. Produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perikanan budidaya yang dikembangkan yaitu budidaya air tawar, air payau dan budidaya laut. Sedangkan perikanan tangkap, baik penangkapan di laut maupun di perairan umum kontribusinya relatif kecil terhadap total produksi perikanan dan kelautan. Pada tahun 2013 produksi perikanan budidaya sebesar 49,422,59 ton, tahun 2014 sebesar 82.185,92 ton, tahun 2015 sebesar 96.336,90 ton tahun 2016 sebanyak 93.957,99 ton dan tahun 2017 sebesar 98.594,08 ton. Perkembangan produksi perikanan dan kelautan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.17
Perkembangan Produksi Perikanan dan Kelautan Tahun 2013 - 2017



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Tengah, 2018

2. PARIWISATA

Pembangunan pariwisata menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Intervensi pembangunan pariwisata yang telah dilaksanakan melalui penataan dan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan sumberdaya manusia kepariwisataan, peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata dan promosi wisata telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pariwisata. Didukung pula dengan terpilihnya Pulau Lombok sebagai destinasi berlabel *halal tourism destination* dan *honeymoon destination*. Kondisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Secara total jumlah kunjungan wisatawan khususnya

wisatawan kategori *overnight visitor* meningkat sebesar 144,79% di tahun 2017 dari kondisi tahun 2012. Jumlah wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Jumlah Wisatawan dan Rata-rata Lama Tinggal Tahun 2012-2017

Tahun	Jumlah Wisatawan Kategori <i>Overnight Visitor</i> (Orang)		Total	Rata -Rata Lama Tinggal (Hari)
	Asing	Domestik		
2012	58.364	23.535	81.899	2,71
2013	77.278	25.150	102.428	3,55
2014	54.954	49.766	104.720	3,43
2015	46.908	53.820	100.728	3,08
2016	49.769	59.148	108.917	3,25
2017	86.524	113.959	200.483	3,50

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lombok Tengah Tahun 2018

3. PERTANIAN

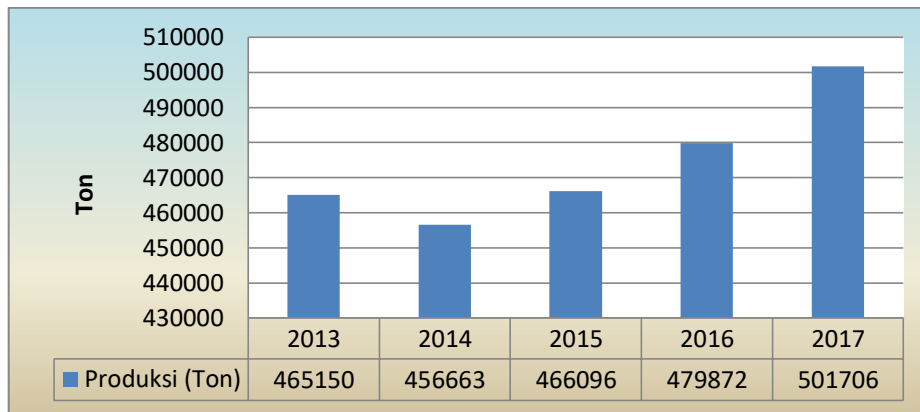
Pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah. Peran sektor pertanian tergambarkan dari kontribusinya terhadap PDRB. Pada periode tahun 2013-2016 sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi terhadap PDRB meskipun terdapat kecenderungan penurunan *share* nya terhadap PDRB. Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 26,94 persen, tahun 2014 sebesar 26,62 persen, tahun 2015 sebesar 26,67 persen dan tahun 2016 sebesar 25,96 persen.

Adapun Perkembangan produksi pertanian unggulan daerah adalah sebagai berikut:

(1). Padi

Produksi padi meningkat dalam lima tahun terakhir, tercatat pada tahun 2013 produksi padi sebesar 465.150 ton, tahun 2017 produksinya mencapai 501.706 ton atau meningkat sebesar 7,29%. Produktivitas tanaman padi juga menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2013 produktivitas padi sebesar 49,71 Kw/Ha, tahun 2017 produktivitasnya meningkat menjadi sebesar 50,13 Kw/Ha. Perkembangan produksi padi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.18
Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

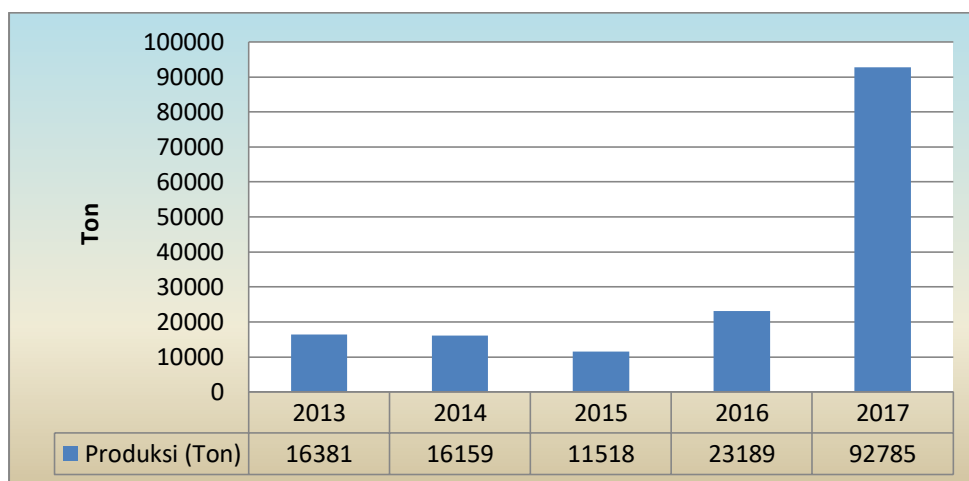


Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2018

(2). Jagung

Produksi jagung pada tahun 2013 sebesar 16.381 ton, di tahun 2017 produksinya mencapai 92.785 ton. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi penurunan produksi, dimana produksi jagung sebesar 11.518 ton sebagai penurunan luas areal tanam jagung pada musim tanam tahun tersebut. Produktivitas jagung juga menunjukkan peningkatan; pada tahun 2013 produktivitas jagung sebesar 43,89 Kw/Ha, tahun 2014 sebesar 47,68 Kw/Ha, tahun 2015 sebesar 50,32 Kw/Ha, tahun 2016 sebesar 40,01 Kw/Ha dan tahun 2017 sebesar 57,76 Kw/Ha. Perkembangan produksi jagung dapat dilihat grafik berikut

Grafik 2.19
Produksi Jagung Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

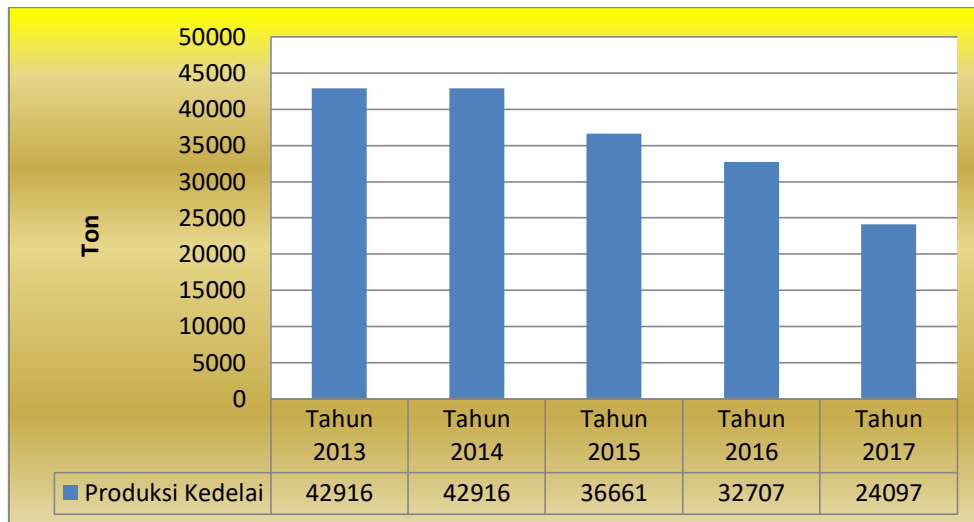


Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2018

(3). Kedelai

Produksi kedelai menurun dalam lima tahun terakhir, pada tahun 2013 produksi kedelai hanya sebesar 42.916 ton, di tahun 2017 produksinya hanya mencapai 24.097 ton atau menurun sebesar 43,85 persen. Penurunan produksi disebabkan berkurangnya luasan areal tanam dan produktivitas tanaman kedelai yang stagnan setiap tahunnya. Produktivitas tanaman kedelai sepanjang tahun 2013 -2017 sebesar 10 Kw/Ha/tahun. Perkembangan produksi kedelai sebagai berikut.

Grafik 2.21
Produksi Kedelai di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013– 2017



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2018

(4). Sapi, Kambing, Ayam Buras dan Itik

Perkembangan peternakan khususnya ternak sapi, kambing, ayam buras dan itik menunjukkan kinerja yang positif dalam periode tahun 2013-2017. Jumlah populasi ternak sapi meningkat sebesar 11,10 persen, ternak kambing meningkat sebesar 19,97 persen. Sedangkan ternak itik dan ayam buras populasinya fluktuatif. Perkembangan populasi ternak dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.22
Populasi Ternak Sapi, Kambing, Itik dan Ayam Buras di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 – 2017

No	Jenis Ternak	Jumlah Populasi (Ekor)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sapi	149.543	157.048	162.250	164.921	168.220
2	Kambing	89.026	96.157	102.315	109.589	111.245
3	Itik	549.172	71.881	714.349	712.772	594.524
4	Ayam Buras	2.000.871	2.491.520	1.204.138	2.879.456	2.951.444

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2018

4. PERKEBUNAN

Pembangunan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan komoditas tanaman bernilai ekonomi. Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi untuk pengembangan komoditas tanaman perkebunan baik tanaman tahunan maupun tanaman semusim. Beberapa komoditas tanaman perkebunan yang berpotensi menjadi unggulan diantaranya adalah tembakau, kopi, kakao, kelapa dan jambumete. Terhadap komoditas tembakau khususnya tembakau virginia, pengembangan komoditas ini telah dilaksanakan secara baik yang menerapkan konsep

agribisnis yang ditandai dengan adanya pola kemitraan antara *private sector* dan petani sehingga komoditas tembakau virginia telah berkembang menjadi unggulan daerah dan berkontribusi secara nasional. Perkembangan produksi beberapa tanaman perkebunan dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.23
Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

No	Tanaman	Jumlah Produksi (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Tembakau Virginia	17.450	13.901	14.190	12.577	18.641
2.	Tembakau Rajangan/Rakyat	226	226	422	1.275	1.006
3.	Kopi	478	346	399	434	357
4.	Jambu Mete	836	902	908	918	773
5.	Kelapa	14.882	14.829	9.983	7.059	6.562
6.	Kakao	52	117	149	183	65

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lombok Tengah, 2018

5. PERDAGANGAN

Peran sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah sangat strategis yang dapat dilihat dari kontribusinya/share terhadap PDRB. Data BPS menunjukkan adanya peningkatan *share* sektor perdagangan terhadap PDRB dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, perdagangan menyumbang 10,55% terhadap PDRB, tahun 2014 sebesar 10,71%, tahun 2015 sebesar 10,69% dan di tahun 2016 berkontribusi sebesar 10,96%.

Salah satu yang mendukung peningkatan *share* perdagangan terhadap PDRB adalah meningkatnya jumlah sarana distribusi perdagangan baik pasar, toko maupun kios. Ketersediaan sarana distribusi perdagangan yang berkualitas khususnya pasar sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian daerah, untuk itu rehabilitasi dan revitalisasi pasar menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing pasar. Adapun perkembangan sarana distribusi perdagangan dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.24
Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Menurut Jenis
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2015

Tahun	Pasar	Toko	Kios
2011	43	386	1.653
2012	43	386	1.659
2013	45	393	1.666
2014	45	393	1.666

2015	45	393	1.666
------	----	-----	-------

Sumber: Lombok Tengah Dalam Data (2017)

6. INDUSTRI

Industri yang banyak berkembang di Kabupaten Lombok Tengah didominasi oleh industri kecil yang terkonsentrasi pada olahan pangan dan kerajinan. Industri kecil khususnya kerajinan merupakan unggulan daerah, dengan produk unggulannya diantaranya tenun dan songket, anyaman bambu dan roket, perak dan gerabah. Perkembangan industri kecil dan serapan tenaga kerja dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.25
Jumlah Industri Kecil dan Serapan Tenaga Kerja
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2016

Tahun	Jumlah Perusahaan	Tenaga Kerja
2011	34.009	56.012
2012	34.215	54.862
2013	32.984	178.002
2014	33.088	53.628
2015	33.088	53.628
2016	33.047	53.468

Sumber: Lombok Tengah Dalam Data, 2017

7. TRANSMIGRASI

Dalam rangka penataan persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan RWPT dan RTSP di rencana Pemukiman Transmigrasi Baru (PTB) Desa Plambik dan Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya termasuk Kegiatan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi seluas 300 Ha dengan jumlah sasaran 300 KK.

Sedangkan untuk kawasan transmigrasi yang sudah ada yakni Desa Batu Jangkih dan Mekar Sari masih diarahkan pada pemberdayaan keluarga transmigran dengan rumah tangga sasaran sejumlah 270 KK dengan luas kawasan 270 ha.

2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitasi wilayah atau infrastruktur, iklim dan sumberdaya manusia.

a. Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

RTRW sebagai salah satu rencana tata ruang merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang serta penetapan kawasan strategis yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana struktur dan polaruang wilayah daerah serta dalam menetapkan kawasan strategis. Kabupaten Lombok Tengah telah memiliki RTRW melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 2011- 2031.

Dari tahun 2011 hingga 2017 tidak terjadi perubahan realisasi luasan kawasan lindung di Kabupaten Lombok Tengah yaitu seluas 18.188,45 hektar. Luasan ini telah mendekati rencana peruntukan kawasan lindung dalam RTRW sebesar 18.198,45 hektar dengan rasio realisasi mencapai 99 persen.

Tabel 2.26
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2012-2017 di Kabupaten Lombok Tengah

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi RTRW (Kawasan Lindung)	16.982,45	16.982,45	16.982,45	16.982,45	16.982,45	16.982,45
2	Rencana Peruntukan Ruang (Kawasan Lindung)	16.992,45	16.992,45	16.992,45	16.992,45	16.992,45	16.992,45
3	Rasio (1/2)	0,99941	0,99941	0,99941	0,99941	0,99941	0,99941

Sumber: Bappeda Kab. Lombok Tengah, 2018

Luas wilayah produktif di Kabupaten Lombok Tengah semakin menyusut dari tahun tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2011 ratio lahan produktif sebesar 71,8 persen menjadi 71,0 persen di tahun 2016. Penyusutan luasan ini disebabkan banyak faktor diantaranya kondisi fisik alamiah maupun sosial. Kondisi fisik alamiah terkait dengan kondisi geografis, hidrologis, dan klimatologis yang secara langsung dapat mempengaruhi produktifitas lahan. Adapun kondisi sosial yang berpengaruh dalam penyusutan luasan lahan produktif antara lain pola tanam, peralihan fungsi lahan, dan perilaku manusia lainnya.

Tabel 2.27
Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2011-2016 di Kabupaten Lombok Tengah

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Luas Wil Produktif	73.733,00	73.465,00	73.197,00	72.929,00	72.929,00	72.929,00
2	Luas Seluruh Wil. Budidaya	102.650,55	102.650,55	102.650,55	102.650,55	102.650,55	102.650,55
3	Rasio (1/2)	0,718	0,716	0,713	0,710	0,710	0,710

Sumber : Bappeda Kab. Lombok tengah, 2017

b. Fokus Iklim Berinvestasi

Kejahatan yang dilaporkan yang dalam beberapa tahun terakhir terlihat mengalami kenaikan (khususnya kejahatan konvensional). Pada tahun 2013 menjadi 68 kasus jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 13 kasus. Sedangkan untuk jenis kejahatan lainnya seperti kontijensi, kejahatan terhadap kekayaan negara dan transnasional cenderung tetap. Tetapi kita semua tetap berharap agar jenis kejahatan mengalami penurunan.

Tabel 2.28
Angka kriminalitas Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 – 2017

Jenis Kejahatan	Tahun								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penculikan	2	1	1	2	19	19	3	0	0
Pengrusakan	4	7	4	0	0	0	5	17	0
Perkelahian	9	6	7	11	29	29	0	0	0
Pencurian	321	180	438	471	474	463	308	306	535

Sumber : Kesbangpoldagri dan Pol PP, 2018

Tabel 2.29
Jumlah Unjuk Rasa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 – 2017

No.	Uraian	Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bidang Politik	3	22	4	6	27	8	14	6
2	Ekonomi	9	3	1	5	3	21	23	16

2.2 Capaian Program RPJMD Periode 2011-2015

Dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah, RPJMD Kabupaten Tengah Tahun 2011-2015 memuat 14 (empat belas) tujuan, 30 (tiga puluh) sasaran dan 210 indikator kinerja program pembangunan daerah. Ketercapaian target RPJMD diukur berdasarkan persentase capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan.

Sampai dengan kondisi tahap akhir pencapaian, terdapat 13 (tiga belas) indikator yang hampir dan belum tercapai. Dalam urusan pendidikan, indikator Jumlah Pengawas SD yang sudah S-2 belum tercapai sedangkan pada urusan kesehatan terdapat 3 (tiga) indikator yang hampir dan belum tercapai yaitu: 1) Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan per kapita; 2) Prosentase SDM kesehatan yang sudah D-III ke atas; dan 3) Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup. Pada urusan pekerjaan umum, indikator Jumlah KK yang memiliki akses air bersih yang berkualitas memperoleh tingkat ketercapaian sebesar 66,5 persen. Pada urusan penataan ruang, indikator Jumlah dan Jenis Perda Tata Ruang yang diundangkan belum tercapai. Pada urusan Sosial Tenaga Kerja dan Transigrasi, Tingkat Pengangguran Terbuka yang berdasarkan data BPS pada tahun 2014 sebesar 6,37 persen masih belum mencapai target RPJMD 2011-2015 yang merencanakan angka pengangguran terbuka sebesar 4,55 persen di tahun 2015. Pada urusan Koperasi dan UKM, target persentase tunggakan dana investasi pemda tidak tercapai. Sedangkan pada urusan kepegawaian, indikator yang belum tercapai adalah jumlah pegawai yang mengikuti Diklat PIM II. Pada urusan Pertanian, indikator yang belum tercapai adalah Ketersediaan Pangan berdasarkan analisis Neraca Bahan Makanan (Gram/Kapita/Hari). Pada urusan energy dan sumberdaya mineral, terdapat dua indikator yang belum tercapai yaitu Jumlah PLTS yang beroperasi (SHS) dan jumlah pemanfaatan energi terbarukan (unit biofuel). Dalam urusan kelautan dan perikanan, indikator yang belum tercapai adalah Kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan.

Indikator jumlah pengawas SD yang sudah S-2 merupakan indikator nomor 17 dari 210 indikator RPJMD dan berada dalam Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Target 55 orang pengawas SD yang S-2 di tahun 2015 tidak tercapai karena sampai dengan tahun 2015 jumlah pengawas SD yang sudah S-2 menurut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga baru mencapai 5 orang saja. Rendahnya tingkat pencapaian pada indikator sasaran ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pengawas pendidikan yang diangkat berlatar belakang guru/ kepala sekolah dengan kualifikasi pendidikan S1. Kedua, pendidikan S-2 pengawas yang diakui harus linier dengan

pendidikan/ijazah S1-nya, sedangkan belum ada program studi di perguruan tinggi dalam daerah yang linier sementara pengawas tidak termotivasi untuk melanjutkan pendidikan di luar daerah. Disamping itu selain karena pertimbangan usia, jika melanjutkan studi di luar daerah, pengawas yang bersangkutan harus meninggalkan tugas pokoknya yang dapat berakibat pada terhentinya tunjangan sertifikasi. Untuk memotivasi Pengawas agar memenuhi kualifikasi pendidikan, telah dilakukan berbagai upaya antara lain kemudahan dalam pemberian ijin untuk melanjutkan pendidikan, pengusulan beasiswa kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan serta pemberian tunjangan sertifikasi.

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan per kapita untuk Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2015 sebesar 47,20 persen. Capaian ini masih jauh dari target yang diamanatkan dalam RPJMD 2011-2015 yang menetapkan target ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan per kapita sebesar 90 persen di akhir tahun pencapaian. Target tersebut selaras dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kefarmasian. Kebijakan Obat Nasional (KONAS) tahun 1983 yang direvisi tahun 2006, target kewajiban Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kefarmasian pada tahun 2010 menyebutkan bahwa ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan sebesar 90%, pengadaan obat esensial 100% dan pengadaan obat generik 90%. Belum tercapainya target ini disebabkan karena masih rendahnya penganggaran untuk obat-obatan di Kabupaten Lombok Tengah. Standar biaya obat publik rasional menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah US \$2 per kapita, sedangkan standar Departemen Kesehatan Republik Kesehatan Indonesia (Depkes RI) US \$1 per kapita atau diasumsikan sekitar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per kapita. Menurut Profil Kesehatan yang disusun Dinas Kesehatan Lombok Tengah tahun 2013 dan 2014, beberapa jenis obat yang ketersediaannya di bawah 100% pada tahun 2013 adalah Aminofilin tablet 200 mg, Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml, Aqua Pro Injeksi Steril, bebas pirogen, Dekstrometorfan tablet 15 mg (HBr), Garam Oralit I serbuk Kombinasi: Natrium 0,70 g, Kalium klorida 0,30 g, Tribatrium Sitrat dihidrat 0,58 g, Paracetamol sirup 120 mg/ 5 ml, Paracetamol tablet 100 mg, dan Povidon Iodida larutan 10% 30 ml. Adapun per 31 Desember 2014, beberapa jenis obat yang pernah kosong pada tahun 2014 adalah Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml selama 2 bulan, Na diklofenak 25mg selama 3 bulan, Sabu Polivalen 5 ml (ABU I) selama 8 bulan, IV Cathether No. 18 G selama 2 bulan, IV Cathether No. 22 G selama 3 bulan, *Ranitidine* injeksi 25 mg/2 ml selama 2 bulan, Metformin HCL 500 mg selama 2 bulan, *Catgut* / Benang Bedah No. 3/0 selama 3 bulan, dan Silk (Benang Bedah Sutra) No. 3/0 pernah kosong selama 1 bulan. Salah satu faktor

penyebab kekosongan obat di instalasi farmasi Dinas Kesehatan yaitu proses perencanaan pengadaan kebutuhan obat masih sederhana dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sehingga sulit menganalisis kebutuhan obat yang akurat, efektif dan efisien.

Capaian indikator prosentase SDM kesehatan yang sudah D-III ke atas sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 71,88% sementara target yang ditetapkan sebesar 100%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 ditetapkan bahwa seluruh sumber daya manusia kesehatan dituntut memiliki tingkat pendidikan paling rendah tingkat D-III (diploma tiga). SDM Kesehatan yang berstatus PNS di Kabupaten Lombok Tengah berjumlah 1.437 orang, yang bertugas di RSUD sebanyak 450 orang, UPT Puskesmas sebanyak 896 orang dan Dinas Kesehatan sebanyak 91 orang. SDM kesehatan terdiri dari 2 jenis yaitu tenaga kesehatan sebanyak 1.109 orang (RSUD 340 orang, Dinas Kesehatan 769 orang) dan non tenaga kesehatan sebanyak 328 orang (RSUD 110 orang, Dinas Kesehatan 218 orang). Pendidikan SDM Kesehatan bervariasi mulai dari pendidikan tingkat SD sampai tingkat S2. Faktor-faktor yang mempengaruhi SDM kesehatan belum seluruhnya berpendidikan Diploma III ke atas adalah beberapa SDM yang berpendidikan SPK, SMA, SPPH, SPRG masih menempuh pendidikan ketingkat lebih tinggi dengan status ijin belajar.

Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sebesar 11,56. Kondisi ini menunjukkan terjadinya fluktuasi angka dari kondisi awal hingga akhir RPJMD 2011-2015. Di tahun 2011, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup sebesar 8,2 kemudian naik di tahun 2012 menjadi 12 untuk kemudian kembali bertambah di tahun 2013 menjadi 14. Di tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 10,85 meskipun tetap tidak mencapai target 7,1 yang ditetapkan untuk tahun tersebut. Fluktuasi angka yang tidak mencapai target RPJMD tersebut menunjukkan peningkatan pelayanan posyandu yang sampai kondisi 2015 tercatat terdapat 84% posyandu aktif dengan Angka tingkat partisipasi masyarakat dalam memantau status kesehatan melalui posyandu dalam 5 tahun terakhir mencapai rata-rata 80,4% masih belum berimplikasi besar terhadap penekanan angka kematian bayi.

Jumlah KK yang memiliki akses air bersih yang berkualitas pada tahun 2015 berdasarkan data Dinas PU dan ESDM Kabupaten Lombok Tengah adalah 64,46%. Pada tahun 2014, jumlah KK yang difasilitasi air bersih dari tahun 2011 hingga 2014 adalah 10.280 KK sehingga jika diakumulasi dari kondisi awal tahun 2010 sebanyak 185.024 KK dapat diketahui jumlah KK yang mengakses air bersih sebanyak 195.304 KK. Berdasarkan

rencana dalam RPJMD 2011-2015, pada tahun 2015 sebesar 95% KK memiliki akses air bersih yang berkualitas. Jika menggunakan data Dinas Kesehatan, penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) menurut kecamatan dan puskesmas, pada tahun 2014 terdapat 585.138 penduduk atau 65,56 persen penduduk yang dapat mengakses air berkualitas bukan jaringan perpipaan berupa sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindung, dan penampungan air hujan. Data Dinas Kesehatan per 31 Oktober 2015 menunjukkan sebesar 69,93 persen KK yaitu sebanyak 216.382 KK telah mengakses air bersih. Meskipun capaian akhir belum memenuhi target RPJMD, selama tahun pelaksanaan RPJMD 2011-2015 terlihat ada peningkatan prosentase KK yang memiliki akses air bersih yang berkualitas. Beberapa kendala terkait pencapaian target ini antara lain karena karakteristik daerah yang berbeda antara bagian utara dan bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah. Daerah bagian utara relatif lebih mudah memenuhi kebutuhan air didukung dengan keberadaan sumber-sumber mata air, sedangkan daerah bagian selatan relatif lebih kering sehingga sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses air bersih. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya capaian target akses air bersih ini adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.

Indikator jumlah dan jenis Perda Tata Ruang yang diundangkan sampai dengan 2015 belum mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan amanat UU nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah terdiri dari rencana umum berupa RTRW Kabupaten dan rencana rinci. Sebagai tindak lanjut operasional atas rencana umum, pemerintah daerah diwajibkan menyusun juga rencana rinci untuk kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten. Sampai dengan tahun 2015 Pemerintah Lombok Tengah telah menetapkan sejumlah dokumen rencana tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 tahun 2011; Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2006; Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Praya dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kopang yang hingga saat ini keduanya dalam proses legislasi pada tahapan konsultasi teknis di pusat. Selain itu, telah disusun pula Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Perkotaan Praya berdasarkan Perbup Nomor 80 Tahun 2015 dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Kuta melalui Perbup Nomor 81

Tahun 2015. Beberapa hal yang menyebabkan belum berhasilnya pencapaian target penyusunan dokumen perencanaan tata ruang antara lain disebabkan karena masih terbatasnya kelembagaan yang menangani tata ruang secara langsung. Saat ini urusan penataan ruang secara langsung ditangani oleh pejabat eselon IV. Hal lain yang menyebabkan keterlambatan penyusunan rencana tata ruang sebagai target yang ditetapkan adalah masih terbatasnya aturan petunjuk teknis terkait rencana tata ruang yang diterbitkan oleh pusat.

Dalam urusan ketenagakerjaan sampai dengan akhir pencapaian RPJMD 2011-2015 isu pengangguran masih menjadi permasalahan yang perlu penanganan di tahapan pembangunan selanjutnya. Berdasarkan data Sakernas 2011-2014 angka pengangguran di Lombok Tengah memiliki kecenderungan yang meningkat. Angka pengangguran tertinggi adalah pada tahun 2014 yang mencapai 6,37 persen sehingga jika dibandingkan dengan target RPJMD 2011-2015 yang merencanakan 4,55 persen pengangguran terbuka di tahun 2015, angka Sakernas 2011-2014 tersebut baru mencapai 60 persen dari yang diharapkan. Demikian halnya dengan persentase tunggakan dana investasi Pemda yang sampai dengan tahun 2015 terealisasi sebesar 8,8 persen dari target 6 persen. Tingginya tunggakan dana investasi pemda ini disebabkan karena rendahnya kesadaran dari masyarakat sebagai pengurus koperasi maupun UKM yang telah mendapat fasilitas pinjaman bantuan modal berupa dana investasi pemda. Untuk mencapai target realisasi 6 persen masih dibutuhkan percepatan agar sisa target 3,82 persen dapat tercapai.

Capaian indikator diklat kepemimpinan hanya mencapai 16%. Target jumlah pejabat yang telah mengikuti Diklat Struktural berupa Diklat Kepemimpinan didasarkan pada data jumlah pejabat struktural yang sudah dan belum mengikuti diklatpim. Pejabat eselon II yang telah mengikuti Diklatpim Tk. II baru 15 orang dari 30 orang pejabat yang ada. Dari 152 orang pejabat eselon III, sebanyak 64 orang atau 42% sudah mengikuti Diklatpim Tk III sedangkan sisanya 88 orang atau 58 % belum mendapatkan Diklatpim Tk II. Persentase pejabat eselon IV yang telah mengikuti Diklatpim Tk. IV sebanyak 413 orang dari 698 orang pejabat eselon IV yang ada. Artinya, 59% pejabat eselon IV di Lombok Tengah telah mengikuti diklat dan sisanya sebanyak 285 orang atau 41% lainnya belum mendapatkan Diklatpim Tk. IV. Sampai dengan 2015, masih banyak pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan yaitu sebesar 44, 09% yakni 492 orang dari 880 pejabat eselon yang ada. Target diklat kepemimpinan tahun 2011 – 2015 sebanyak 50 orang untuk Diklatpim II, 100 Orang untuk Diklatpim III dan 200 Orang untuk Diklatpim IV. Yang tercapai hanya

11 Orang untuk Diklatpim II, 5 Orang untuk diklatpim III dan 40 Orang untuk Diklatpim IV, atau hanya tercapai 22%. Rendahnya capaian indikator jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan disebabkan oleh masih minimnya anggaran yang tersedia untuk urusan kepegawaian.

Indikator Ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) mendapatkan notifikasi merah pada item lemak sedangkan untuk energy dan protein sudah mencapai target. Sasaran ketersediaan pangan ini dilaksanakan dengan menganalisa data-data jenis bahan pangan baik yang berasal dari nabati maupun hewani. Data-data ini dianalisa setelah dilakukan sinkronisasi. Angka kecukupan energi dan protein dari tahun 2011-2015 telah melebihi standar yang dianjurkan yaitu angka kecukupan energi perkapita 2200 kkl/kap/hari sedangkan untuk protein 57 gr/kap/hari. Berdasarkan analisa NBM energy dari tahun ke tahun yang terus mengalami peningkatan, dapat diketahui adanya peningkatan produksi. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) untuk energy dari tahun 2011 sebesar 2.597,34 kkl/kap/hari, tahun 2012 sebesar 2.804,75 kkl/kap/hari, pada tahun 2013 sebesar 2.304,00 kkl/kap/hari, di tahun 2014 sebesar 3084,98 kkl/kap/hari dan bertahan sampai tahun 2015. Khusus untuk lemak, sejak tahun 2013 tidak lagi ada perhitungan terhadap ketersediaannya sehingga sampai dengan akhir pencapaian 2015, target untuk item pangan ini tidak tercapai.

Indikator Jumlah PLTS dan Jumlah PLTMH yang beroperasi tidak tercapai dalam pelaksanaan RPJMD 2011-2015 disebabkan karena target capaian terlalu tinggi karena didasarkan pada rencana bantuan luar negeri yang akan dialokasikan ke Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tetapi tidak teralisasi. Jumlah SHS yang terbangun di Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan 2015 sebanyak 1.866 unit yang bersumber dari dana APBD II dan DAK sebanyak 456 unit serta dari bantuan provinsi, EBTKE dan KPDT sebanyak 1.401 unit. Selama ini Pemda Lombok Tengah hanya bisa melakukan sharing kegiatan dengan pusat berupa pembebasan lahan disebabkan karena pembangunan PLTMH membutuhkan dana yang cukup besar dan harus tersedia potensi air dengan debit yang memadai/cukup.

Pencapaian target tersebut didukung oleh indikator kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan. Capaian kinerja mencapai target, namun bila melihat kondisi awal dan kondisi akhir tidak mengalami perubahan dari kondisi awal. Hal ini disebabkan, dalam penentuan suatu kawasan yang kemudian akan ditetapkan sebagai kawasan konservasi harus melalui kajian dengan mempertimbangkan segala aspek, baik

dari segi teknis, ekonomi, sosial budaya, lingkungan serta harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Penetapan suatu kawasan konservasi perairan harus melibatkan semua pihak yang terkait dan melalui proses yang panjang.

Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 juga disusun dengan memperhatikan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah menggambarkan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada setiap periode pelaksanaan RPJMD dapat dicapai.

Status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi hasil RPJMD terdiri dari 3 (tiga) kriteria penilaian sebagaimana berikut.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
>40%	Tinggi
≥20% - ≤40%	Sedang
<20%	Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Hasil rekapitulasi capaian 48 indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 pada tahun 2017 menunjukkan 47 indikator (98%) memiliki capaian tinggi, dan 1 indikator (2%) memiliki capaian rendah. Indikator yang memiliki capaian rendah adalah Jumlah Penduduk Buta Huruf (15 tahun keatas) (Jiwa), hal ini

disebabkan oleh beberapa hal: Komposisi penduduk buta huruf (15 tahun ke atas) didominasi oleh penduduk usia 55 tahun ke atas yang memiliki penurunan daya ingat sehingga intervensi yang dilaksanakan berdampak kurang signifikan. Disamping itu indikator ini bukan lagi menjadi indikator penyusun IPM sehingga intervensi Pemerintah Pusat terhadap pengentasan Buta Huruf menjadi berkurang.

Rincian rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Daerah lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017
Terhadap Target Akhir RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

No.	Indikator	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realiasi Kinerja s/d 2017	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Kriteria Capaian
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	PDRB					
	- Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.Juta)**	13,291,144.32	17,786,549.28	15.957.730,00	89,72	Tinggi
	- Atas Dasar Harga Konstan (Rp.Juta)**	10,264,392.46	13,736,072.53	11.555.950,00	84,13	Tinggi
	- Laju Pertumbuhan PDRB (%)**	6,31	6	6,42	107	Tinggi
2	PDRB per Kapita					
	- Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.Juta)**	14,559,590.39	18.616.646,96	17.144.157,00	92,09	Tinggi
	- Atas Dasar Harga Konstan (Rp.Juta)**	11,243,979.17	14.377.134,58	12.415.113,00	86,35	Tinggi
3	IPM (Point)	62,74	66.02	64.36	97.49	Tinggi
	- Rata-rata Lama Sekolah (usia 25 tahun keatas)	5,54	6.16	5.6	90.91	Tinggi
	- Harapan lama sekolah	12,81	14.54	12.83	88.24	Tinggi
	- Usia Harapan Hidup	64,75	65.29	65.01	99.57	Tinggi
	- Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	8,845,807.06	9,260,257.74	9,079,000.00	98.04	Tinggi
4	Persentase penduduk miskin (%)	16,03	14.86	15.31	96.97	Tinggi
5	Prosentase konflik yang dapat dimediasi (%)	100	100	100	100.00	Tinggi
6	Jumlah Puskesmas BLUD (Unit)	0	7	5	71.43	Tinggi

No.	Indikator	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realiasi Kinerja s/d 2017	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Kriteria Capaian
7	Angka Patisipasi Kasar (APK)					
	- APK PAUD (%)	63,31	71.61	67.72	94.57	Tinggi
	- APK SD/MI/Paket A (%)	114,21	108.2	116.81	107.96	Tinggi
	- APK SMP/MTs/Paket B (%)	102,51	103.17	102.69	99.53	Tinggi
8	Angka Patisipasi Murni (APM)					
	- APM SD/MI/Paket A (%)	99,94	100	99.97	99.97	Tinggi
	- APM SMP/MTs/Paket B (%)	97,07	98.5	96.42	97.89	Tinggi
9	Jumlah Penduduk Buta Huruf (15 tahun keatas) (Jiwa)	80.752	20475	66132	0.00	Rendah
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,37	5.37	2.9	146	Tinggi
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Fokus Layanan Urusan Wajib						
11	Prosentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	64,55	72.44	65.71	90.71	Tinggi
12	Cakupan Layanan Jaringan Irigasi (Ha)	49.517	49571	50806	102.49	Tinggi
13	Cakupan Layanan Air Bersih (%)	67,5	85	74.6	87.76	Tinggi
14	Kawasan Kumuh Perkotaan (Ha)	110	80	60.14	75.18	Tinggi
15	Cakupan Layanan Trayek Angkutan Kawasan Strategis Kabupaten yang Terlayani (Trayek)	8	16	10	62.50	Tinggi
16	Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten (IKLH) (Point)	NA	68.5	48	70.07	Tinggi
17	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan					
	- Tingkat Kepemilikan KTP (%)	65,12	80.12	76.37	95.32	Tinggi
	- Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran (%)	57,93	82.93	71.37	86.06	Tinggi
	- Tingkat Kepemilikan Kartu Keluarga (%)	73,23	93.23	77.12	82.72	Tinggi
18	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,05	1	1.13	87.00	Tinggi
19	Rata-rata usia kawin Pertama Perempuan (Tahun)	19,8	21	19.9	94.76	Tinggi
20	Cakupan layanan	13,10	26	40	153.85	Tinggi

No.	Indikator	Kondisi Awal 2015	Target Kinerja Akhir RPJMD	Realiasi Kinerja s/d 2017	Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir RPJMD	Kriteria Capaian
	PMKS (%)					
21	Jumlah Koperasi berkualitas (Unit)	295	345	320	92.75	Tinggi
22	Jumlah UMKM (Unit)	155.477	157977	156572	99.11	Tinggi
23	Tingkat Perkembangan Desa					
	- Desa Kurang Berkembang menjadi Desa Berkembang (Desa)	NA	15	29	193.33	Tinggi
	- Desa Berkembang menjadi Desa Cepat Berkembang (Desa)	NA	15	21	140.00	Tinggi
24	Produksi Komoditas Pangan (padi) (Ton/Tahun)	466.096	504147	501706	99.52	Tinggi
25	Pola Pangan Harapan (Point)	85,60	87.3	86.2	98.74	Tinggi
26	Rata-rata Lama Tinggal wisatawan (Hari)	3,08	4.04	3.5	86.63	Tinggi
27	Jumlah Wisatawan					
	- Domestik (Orang)	53820	90660	86473	95.38	Tinggi
	- Mancanegara (Orang)	46.908	75546	113895	150.76	Tinggi
28	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	4.558,63	34002.17	31581.74	92.88	Tinggi
29	PDRB Sektor perdagangan (Rp.Juta)*	550,448.54	1,255,562.16	1,689,252.00	134.54	Tinggi
30	Unit Usaha Pengolahan Pangan dengan Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) (Unit)	115	240	170	70.83	Tinggi
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah						
31	Penanaman Modal :					
	- Dalam Negeri (Ribu Rupiah)	689,444,515.00	1,327,460,000	1,108,780,000	83.53	Tinggi
	- Asing (Ribu US\$)	1,203,614.00	1,395,310	8,240,800	590.61	Tinggi
32	Angka Kriminalitas (Kasus)	293	270	214	79.26	Tinggi
33	Target PAD	156,931,857,545.88	179,995,502,490.71	286,691,384,414.65	159.28	Tinggi

*) Data sangat sementara (sumber BPS, 2018)
Sumber : Evaluasi RPJMD Tahun Kedua, 2017

2.3 Capaian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berikut disajikan beberapa capaian indikator dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

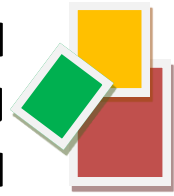
sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Tabel 2.31
Capaian Indikator SPM
2013-2017

Bidang Urusan	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Pendidikan	APK PAUD	53,14	63,28	63,31	72,24	69,08
	APK SD/MI	113,68	114,02	114,21	112,28	112,49
	APK SMP/MTs	101,86	102,21	102,51	104,66	102,69
	APM SD/MI	99,25	99,89	99,94	96,31	96,76
	APM SMP/MTs	89,49	90,37	97,07	99,87	96,42
Kesehatan	Cakupan kunjungan Bumil (K1)	99,7	98,99	100,6	98,8	99,4
	Cakupan kunjungan Bumil (K4)	93,35	94,41	91,2	89,98	90,12
	Cakupan Pelayanan Imunisasi	106	96,6	95,03	99,91	99,94
	Persalinan oleh tenaga medis	77,39	82,89	81,25	92,3	98,16
Pekerjaan Umum	Cakupan layanan air minum	60,77	63,15	65,42	67,5	74,5
Sosial	Persentase PMKS Skala Kabupaten yg memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan dasar	0,54	25,66	42,2	47,38	40,00

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan tersedianya sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan analisis pengelolaan keuangan adalah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana, optimalisasi pendapatan dan penerimaan daerah, serta menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah untuk menyusun kerangka pendanaan untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan jangka menengah daerah lima tahun kedepan.

3.1 KINERJA KEUANGAN 2013-2017

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari (1) Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. (2) Belanja Daerah yang dilamnya memuat Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. (3) Pembiayaan dengan subkomponen Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

Berikut ini disajikan perkembangan target dan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah kabupaten lombok tengah tahun 2013-2017:

Tabel 3.1.
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi		Selisih (Rupiah)
		(Rupiah)	%	
Pendapatan Daerah				
2013	1.225.921.118.283,38	1.230.524.285.617,67	100,38	4.603.167.334,29
2014	1.418.951.862.876,76	1.411.219.149.789,92	99,46	-7.732.713.086,84
2015	1.647.221.861.194,20	1.631.526.898.989,52	99,05	-15.694.962.204,68
2016	1.923.943.135.886,31	1.930.329.082.305,70	100,33	6.385.946.419,39
2017	1.939.411.562.943,73	1.917.035.737.682,65	98,85	-22.375.825.261,08
Belanja Daerah				
2013	1.346.232.887.998,62	1.293.972.080.951,23	96,12	-52.260.807.047,39
2014	1.442.801.332.963,21	1.408.742.643.084,69	97,64	-34.058.689.878,52
2015	1.668.839.731.817,29	1.549.692.154.035,15	92,86	-119.147.577.782,14
2016	1.959.225.561.383,46	1.832.981.039.172,41	93,56	-126.244.522.211,05
2017	2.052.183.649.573,77	1.930.401.187.345,90	94,07	-121.782.462.227,87
Penerimaan Pembiayaan				
2013	174.580.548.035,15	163.205.172.835,42	93,48	-11.375.375.199,73
2014	98.980.028.894,86	99.021.498.894,86	100,04	41.470.000,00
2015	71.946.050.935,09	72.018.081.916,09	100,10	72.030.981,00
2016	105.504.646.558,46	105.743.246.558,46	100,23	238.600.000,00
2017	134.849.068.630,44	134.813.886.380,44	99,97	-35.182.250,00
Pengeluaran Pembiayaan				
2013	14.743.514.567,80	5.555.309.257,00	37,68	-9.188.205.310,80
2014	29.566.883.764,00	29.566.883.764,00	100,00	--
2015	50.328.180.312,00	48.348.180.312,00	96,07	-1.980.000.000,00
2016	70.222.221.061,31	68.272.221.061,31	97,22	-1.950.000.000,00
2017	22.076.982.000,40	22.076.982.000,40	100,00	--

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah.

Angka rata-rata realisasi pertumbuhan pendapatan daerah dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam mempertahankan

dan meningkatkan pendapatan daerah, juga dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pendapatan daerah di masa yang akan datang.

Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah kabupaten lombok tengah mengalami tren pertumbuhan positif dari Rp.1.230.524.285.617,67 pada tahun 2013 menjadi Rp. 1.917.035.737.682,65 pada tahun 2017 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,72% pertahun pada kurun waktu 2013-2017.

Rata-rata kontribusi sumber pendaptan daerah kabupaten lombok tengah pada kurun waktu tersebut 10,61% bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 74,24% dari Dana Perimbangan dan 15,14% dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Hal tersebut menggambarkan bahwa pada kurun waktu tahun 2013-2017 dari sisi pendapatan daerah, Kabupaten Lombok Tengah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber-sumber pendapatan dari pusat. Namun jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan pada kurun waktu yang sama, PAD mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni rata-rata 23,56% pertahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah sudah mengarah pada upaya mewujudkan kemandirian keuangan daerah .

Berikut ini disajikan pertumbuhanrealiasasi pendapatan daerah kabupaten lombok tengah tahun 2013-2017:

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Kontribusi (%)
	2013	2014	2015	2016	2017		
PENDAPATAN	1.230.524.285.617,67	1.418.680.556.740,92	1.631.526.898.989,52	1.930.329.082.305,70	1.917.035.737.682,65	11,72	100,00
Pendapatan Asli Daerah	123.011.389.543,78	140.507.905.589,16	156.931.857.545,88	165.997.896.761,43	286.691.384.414,65	23,56	10,61
Pajak Daerah	23.469.135.275,00	37.283.585.365,00	40.321.884.932,00	51.228.643.227,00	69.785.785.673,00	31,32	2,66
Retribusi Daerah	19.562.362.475,00	15.869.457.322,20	18.659.244.163,20	14.459.604.276,00	14.982.585.692,63	-6,45	1,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5.610.383.433,00	7.134.392.078,00	8.822.526.523,00	10.962.220.871,49	12.644.709.583,72	22,53	0,55
Lain-Lain PAD Yang Sah	74.369.508.360,78	80.220.470.823,96	89.128.201.927,68	89.347.428.386,94	189.278.303.465,30	26,31	6,33
Dana Perimbangan	947.043.767.809,00	1.011.563.786.345,00	1.095.399.531.228,00	1.568.614.254.085,00	1.428.941.613.611,00	10,83	74,24
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59.343.854.809,00	65.218.839.345,00	62.788.163.228,00	113.357.166.873,00	97.188.246.179,00	13,13	4,84
Dana Alokasi Umum	793.651.563.000,00	865.423.847.000,00	906.054.748.000,00	998.650.731.000,00	981.107.649.000,00	5,44	56,79
Dana Alokasi Khusus	94.048.350.000,00	80.921.100.000,00	126.556.620.000,00	456.606.356.212,00	350.645.718.432,00	38,96	12,61
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	160.469.128.264,89	266.608.864.806,76	379.195.510.215,64	195.716.931.459,27	201.402.739.657,00	5,84	15,14
Hibah	701.831.500,00	8.295.887.784,00	20.978.632.700,00	37.419.221.061,31	1.043.026.546,00	10,41	0,78
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	23.636.574.764,89	54.467.702.022,76	54.241.212.515,64	59.653.716.135,96	74.262.538.111,00	33,14	3,21
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	136.130.722.000,00	203.845.275.000,00	303.975.665.000,00	97.903.644.000,00	126.097.175.000,00	-1,90	11,14
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	740.350.262,00	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

b. Belanja Daerah

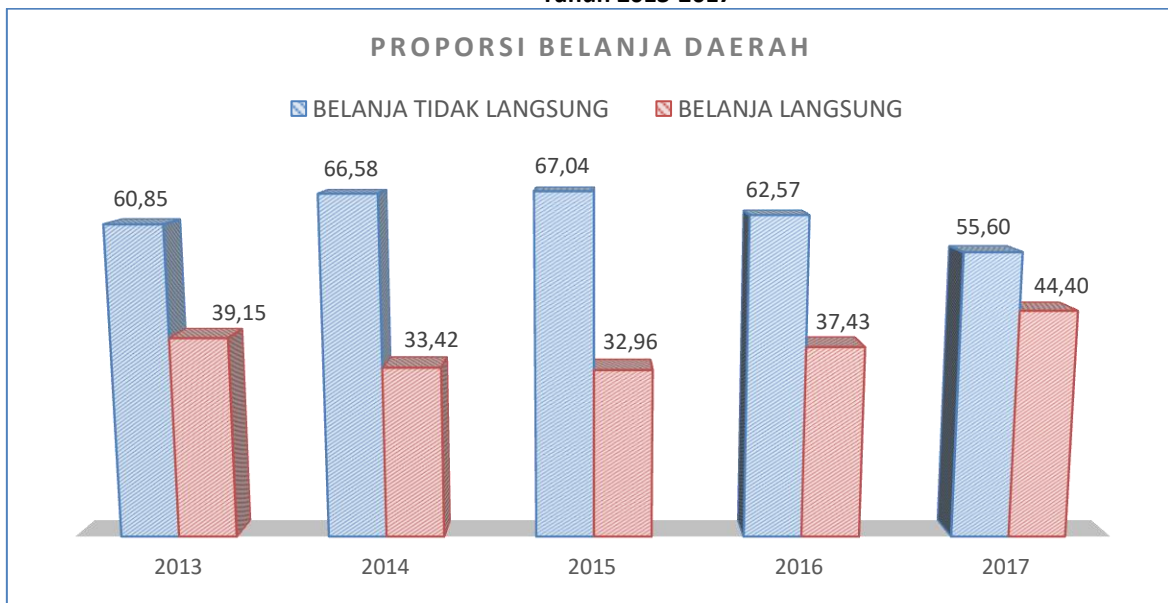
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Belanja Daerah sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil/kinerja. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan, pengaturan melalui pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif dan peningkatan proporsi belanja publik yang dapat dirasakan secara langsung untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat dan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung keberlangsungan operasional penyelenggaraan pemerintahan.

Jika dilihat dari struktur belanja langsung dan tidak langsung dalam postur anggaran belanja pemerintah daerah dalam kurun waktu 2013-2017, proporsi belanja tidak langsung pada setiap tahun anggaran masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja langsung, meskipun demikian proporsi belanja antara belanja langsung dan belanja tidak langsung pada periode ini mengalami tren perubahan proporsi yang lebih baik dari proporsi 39,15% berbanding 60,85% pada tahun 2013 menjadi 44,40% berbanding 55,60% pada tahun 2017 dengan rata-rata proporsi pada kurun waktu tahun 2013-2017 sebesar 37,47% berbanding 62,53%.

Berikut disajikan disajikan proporsi belanja langsung dan tidak langsung kurun waktu 2013-2017.

Grafik 3.1.
Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung
Tahun 2013-2017



Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Tingginya proporsi belanja tidak langsung selama kurun waktu 2013-2017 sangat dipengaruhi oleh pengalokasian belanja pegawai termasuk di dalamnya belanja untuk pembayaran gaji. Dari total belanja tidak langsung, belanja pegawai memiliki rata-rata proporsi terbesar yaitu sebesar 88,62% kemudian diikuti belanja bantuan keuangan dengan rata-rata proporsi sebesar 6,42%.

Sementara itu, komposisi belanja langsung dalam kurun waktu 2013-2017 relatif baik. Hal tersebut dapat kita lihat dari rata-rata proporsi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Dalam kurun waktu 2013-2017 proporsi belanja modal sebesar 20,12% dari keseluruhan belanja daerah, belanja modal memiliki multiplier effect yang paling signifikan diantaraberbagai komponen pengeluaran pemerintah yang lain. Oleh karena itu, proporsi belanja modal ini diharapkan tidak saja dapat dipertahankan, namun mampu ditingkatkan menjadi proporsi yang mendominasi belanja langsung mengingat masih tinggi pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dalam pembangunan daerah. Kebijakan ini juga penting sebagai bagian dari upaya membangun kemampuan ekonomi daerah untuk menunjang ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang dalam mendorong investasi di daerah. Berikut disajikan data perkembangan realisasi belanja daerah kabupaten lombok tengah dari tahun 2013-2017:

Tabel 3.3.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Proporsi (%)
	2013	2014	2015	2016	2017		
BELANJA	1.293.972.080.951,00	1.416.189.120.937,00	1.549.692.154.035,00	1.832.981.039.172,00	1.930.401.187.346,00	10,52	100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	787.318.827.047,00	942.873.699.378,00	1.038.930.376.128,00	1.146.934.371.485,00	1.073.301.948.074,00	8,05	62,53
Belanja Pegawai	701.248.393.714,00	799.185.368.383,00	846.223.145.313,00	901.836.479.300,00	800.837.649.141,00	3,38	51,18
Belanja Bunga	1.543.461.626,00	5.590.733.232,00	4.227.517.023,17,00	1.852.718.318,00	338.219.116,00	-31,58	0,18
Belanja Hibah	38.892.148.750,00	88.010.194.637,00	39.417.415.100,00	31.127.000.000,00	33.804.600.000,00	-3,44	3,04
Belanja Bantuan Sosial	5.702.883.300,00	5.263.119.350,00	1.607.414.750,00	1.912.582.251,00	826.686.989,00	-38,30	0,21
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	1.087.115.803,00	4.063.943.000,00	5.050.117.255,96	5.098.872.930,00	6.391.177.227,00	55,71	0,26
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	38.467.819.854,00	40.484.497.776,00	141.404.848.686,30	204.849.662.836,00	230.649.303.601,00	56,48	7,62
Belanja Tak Terduga	377.004.000,00	275.843.000,00	999.918.000,00	257.055.850,00	454.312.000,00	4,77	0,03
BELANJA LANGSUNG	506.653.253.905,00	473.315.421.558,00	510.761.777.907,00	686.046.667.688,00	857.099.239.272,00	14,05	37,47
Belanja Pegawai	35.502.053.906,00	27.997.399.285,00	29.750.219.445,00	33.836.937.850,00	52.124.520.443,00	10,08	2,24
Belanja Barang Jasa	102.890.172.510,00	145.158.753.228,00	273.231.317.650,16	313.935.304.661,00	436.449.312.027,00	43,51	15,11
Belanja Modal	368.261.027.489,00	300.159.269.045,00	207.780.240.811,56	338.274.425.176,00	368.525.406.802,00	0,02	20,12

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan mencakup :

- a). Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
- b). Pencairan dana cadangan;
- c). Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d). Penerimaan pinjaman daerah;
- e). Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah;
- f). Penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup :

- a). Pembentukan dana cadangan;
- b). Penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- c). Pembayaran pokok utang;
- d). Pemberian pinjaman daerah.

Adapun realiasi pembiayaan daerah kabupaten lombok tengah kurun waktu tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	163.205.172.835,42	99.021.498.894,86	72.018.081.916,09	105.743.246.558,46	134.813.886.380,44	-4,67
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	82.538.566.035,15	94.202.068.244,86	71.939.679.916,09	105.504.646.558,46	134.756.886.380,44	13,04
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	80.499.021.350,40	4.777.960.650,00	-	-	-	-100,00
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	167.585.449,87	41.470.000,00	78.402.000,00	238.600.000,00	57.000.000,00	-23,63
Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.555.309.257,00	29.566.883.764,00	48.348.180.312,00	68.272.221.061,31	22.076.982.000,40	41,19
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.741.436.733,00	10.966.883.764,00	23.548.180.312,00	43.472.221.061,31	5.000.000.000,00	1,34
Pembayaran Pokok Utang	813.872.524,00	18.600.000.000,00	24.800.000.000,00	24.800.000.000,00	17.076.982.000,40	114,02
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	157.649.863.578,42	69.454.615.130,86	23.669.901.604,09	37.471.025.497,15	112.736.904.380,04	-8,04

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui likuiditas dan solvabilitas pemerintah daerah.

Likuiditas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek dan membiayai seluruh operasionalnya. Likuiditas digambarkan dari *Current Ratio* dan *Quick Ratio*. *Current Ratio* merupakan perbandingan antara Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. *Quick Ratio* merupakan perbandingan antara Aset Lancar setelah dikurangi Persediaan dengan Kewajiban Jangka Pendek, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid.

Sementara itu, untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi semua kewajiban baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang digunakan analisis solvabilitas. Solvabilitas digambarkan dengan perbandingan seluruh aset dengan seluruh kewajiban.

Berikut disajikan neraca Kabupaten Lombok Tengah tahun 2013-2017.

Tabel 3.5.
Neraca Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
JUMLAH ASET DAERAH	2.466.571.859.873,10	2.764.707.745.262,96	2.136.294.895.785,38	2.438.732.881.497,20	2.680.154.363.274,44	2,10
ASET LANCAR	126.713.039.483,89	132.358.752.779,19	156.406.309.447,13	198.068.093.910,82	229.475.835.578,12	16,01
Kas	94.915.464.890,86	74.474.480.909,49	105.611.853.291,46	134.858.082.468,44	99.438.917.896,79	1,17
Kas di Kas Daerah	93.265.183.472,49	70.705.475.608,89	93.006.753.378,25	116.763.644.840,51	40.270.101.894,33	-
Kas di FKTP	-	-	11.836.824.621,00	13.303.442.700,00	5.579.912.669,00	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	464.364.806,00	1.948.894.402,00	2.034.600,00	165.080.443,00	39.732.368,00	-
Kas di BLUD	1.185.916.612,37	1.598.922.071,20	720.689.020,21	-	8.517.495.465,46	-
Kas di Bendahara Penerima	-	221.188.827,40	45.551.672,00	25.446.000,00	31.675.500,00	-
Kas di Bendahara Penerima BLUD	-	-	-	4.600.468.484,93	-	-
Setara kas	-	-	-	-	45.000.000.000,00	-
Piutang	20.536.801.519,03	45.578.383.115,70	36.772.216.996,67	46.411.424.101,88	98.646.917.857,66	48,04
Piutang Pajak Netto	297.023.930,50	16.453.142.348,50	12.553.669.102,43	22.239.329.139,03	35.001.385.097,00	-
Piutang Retribusi Netto	196.071.357,00	626.763.247,00	2.153.967.849,72	852.760.880,40	1.223.076.635,60	-
Piutang Dana Perimbangan/Bagi Hasil Provinsi	17.346.360.797,88	12.060.681.617,20	16.974.141.941,96	16.017.753.887,00	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	340.039.393,52	-	39.575.400,00	8.400.000,00	-	-
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD / Pem.Pusat	-	-	-	-	-	-
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	10.680.757.615,67	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	9.150.640.872,00	-
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	17.656.907.283,00	-
Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-	-	-	(6.322.085.483,61)	-
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	-	-	-	-	-	-

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
Bagian Lancar Piutang Pegawai	-	-	-	-	-	-
Belanja dibayar dimuka	-	-	164.397.867,00	135.487.666,67	-	-
Piutang lainnya netto	2.357.306.040,13	16.437.795.903,00	4.886.464.835,56	7.157.692.528,78	31.256.235.838,00	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-	-	-	201.579.466,67	-
Persediaan	11.260.773.074,00	12.305.888.754,00	14.022.239.159,00	16.798.587.340,50	31.188.420.357,00	29,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	15.732.916.822,00	15.469.109.660,00	3.508.587.665,84	531.154.000,00	141.004.500,00	-69,23
Investasi Non Permanen	15.732.916.822,00	15.469.109.660,00	3.508.587.665,84	531.154.000,00	141.004.500,00	-69,23
Dana Bergulir netto	15.732.916.822,00	15.469.109.660,00	3.508.587.665,84	531.154.000,00	141.004.500,00	-
Investasi Permanen	38.141.217.923,26	59.841.837.879,48	86.442.066.959,54	129.339.457.784,40	134.783.364.748,97	37,11
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten	38.141.217.923,26	59.841.837.879,48	86.442.066.959,54	129.339.457.784,40	134.783.364.748,97	37,11
Pinjaman kepada BUMD / Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Penanaman Modal dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
ASET TETAP	2.176.271.826.046,70	2.439.513.382.677,04	1.834.670.409.133,62	2.053.379.466.164,56	2.195.538.369.684,76	0,22
Tanah	291.025.253.981,70	329.619.860.690,70	330.634.118.190,70	329.417.307.191,00	356.430.199.299,00	5,20
Peralatan dan Mesin	180.477.055.410,00	223.190.554.173,00	265.461.838.623,01	307.196.873.135,50	347.812.296.466,20	17,82
Gedung dan Bangunan	447.248.151.610,00	474.940.116.685,98	600.926.726.751,69	663.169.414.269,64	675.164.449.590,63	10,84
Jalan, Irigasi, dan Jembatan	1.091.284.857.736,00	1.375.016.816.373,00	1.461.786.352.259,85	1.675.378.974.705,07	1.802.773.485.554,07	13,37
Aset Tetap Lainnya	26.946.516.487,00	32.429.154.704,36	32.887.283.304,36	41.086.433.206,29	61.974.662.647,83	23,15
Konstruksi dalam Pengerjaan	139.289.990.822,00	4.316.880.050,00	14.907.282.800,00	35.427.010.490,00	77.854.567.345,00	-13,53
Akumulasi dalam penyusutan	-	-	(871.933.192.795,99)	(998.296.546.832,94)	(1.126.471.291.217,97)	-
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
ASET LAINNYA	109.712.859.597,25	117.524.662.267,25	55.267.522.579,25	57.414.709.637,41	120.215.788.762,59	2,31
Tagihan Penjualan Angsuran	-	264.707.600,00	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi Netto	172.140.000,00	1.447.124.307,00	1.515.164.552,96	315.830.700,90	1.348.439.561,20	-
Kemitraan dengan Pihak ketiga	-	-	-	-	27.987.431.135,33	-
Build, Operating and Transfer (BOT)	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	1.138.998.200,00	1.118.289.000,00	1.118.289.000,00	1.118.289.000,00	952.689.000,00	-
Aset Lain-lain netto	108.401.721.397,25	114.694.541.360,25	52.634.069.026,29	55.980.589.936,51	89.927.229.066,06	-
KEWAJIBAN	93.647.269.018,06	83.371.775.086,77	57.423.635.910,16	40.790.336.446,50	16.519.421.169,02	-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25.548.247.667,66	41.494.793.086,37	40.346.653.909,76	40.790.336.446,50	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	659.392.867,00	659.392.867,00	61.655.061,00	-	-	-
Utang Pemotongan Pajak Pusat (PPN/PPH)	54.003.779,00	186.529.776,00	-	-	-	-
Kewajiban pada Pihak Lain	-	1.461.318.504,00	-	-	-	-
Utang Bunga	822.298.623,02	961.722.858,44	613.032.487,00	-	-	-
Utang Lainnya	11.612.552.398,64	13.331.484.016,00	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	12.400.000.000,00	24.800.000.000,00	24.800.000.000,00	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	94.345.064,93	258.023.149,20	-	-	-
Utang Belanja	-	-	274.357.293,50	-	-	-
Utang Transfer	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	14.339.585.919,06	-	-	-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	68.099.021.350,40	41.876.982.000,40	17.076.982.000,40	-	-	-
Utang Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
Utang kepada Pemerintah Pusat	68.099.021.350,40	41.876.982.000,40	-	-	-	-
Utang kpd Pem. Kabupaten/Kota Lain	-	-	-	-	-	-

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
Utang kepada BUMD	-	-	-	-	-	-
Utang kepada Bank / Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri Lainnya	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	17.076.982.000,40	-	-	-
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA	2.372.924.590.855,04	2.681.335.970.176,19	2.078.871.259.875,22	2.397.942.545.050,70	2.663.634.942.105,42	2,93
EKUITAS DANA LANCAR	101.164.791.816,23	90.863.959.692,82	-	-	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	94.202.068.244,86	-	-	-	-	-
Pendapatan Ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
Cadangan Piutang	20.536.801.519,03	-	-	-	-	-
Cadangan Persediaan	11.260.773.074,00	-	-	-	-	-
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-24.834.851.021,66	-	-	-	-	-
EKUITAS DANA INVESTASI	2.271.759.799.038,81	2.590.472.010.483,37	-	-	-	-
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	53.874.134.745,26	-	-	-	-	-
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.176.271.826.046,70	-	-	-	-	-
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	109.712.859.597,25	-	-	-	-	-
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	(68.099.021.350,40)	(41.876.982.000,40)	-	-	-	-
EKUITAS DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
TOTAL EKUITAS DANA	2.372.924.590.855,04	2.681.335.970.176,19	2.078.871.259.875,22	2.397.942.545.050,70	2.663.634.942.105,42	2,93
TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	2.466.571.859.873,10	2.764.707.745.262,96	2.136.294.895.785,38	2.438.732.881.497,20	2.680.154.363.274,44	2,10

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Dari Tabel Neraca Daerah tersebut dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas yang meliputi rasio lancar (*current ratio*), rasio cair (*quick ratio*), rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal yang dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Hasil Perhitungan Neraca Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Rasio Lancar (Current Ratio)	4,96	3,19	3,88	4,86	13,89	6,15
2	Rasio Cair (Quick Ratio)	4,52	2,89	3,53	4,44	12,00	5,48
3	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,038	0,030	0,027	0,017	0,006	0,024
4	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,039	0,031	0,028	0,017	0,006	0,024

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa likuiditas pemerintah daerah kabupaten lombok tengah pada kurun waktu tahun 2013-2017 dengan melihat Rasio Lancar (*Current Ratio*) dan Rasio Cair (*Quick Ratio*) rata-rata sebesar 6,15 dan 5,48 yang berarti bahwa pemerintah daerah memiliki aset lancar 6,15 kali dari jumlah kewajiban jangka pendeknya dan memiliki aset lancar yang lebih likuid 5,48 kali dari jumlah kewajiban jangka pendeknya.

Dari tabel tersebut juga menunjukkan bahwa solvabilitas pemerintah daerah kabupaten lombok tengah dilihat dari rata-rata Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset dan Rasio Hutang Terhadap Modal pada kurun waktu tahun 2013-2017 hanya sebesar 0,024 yang berarti bahwa hutang pemerintah daerahnya sebesar 2,4% dari total aset dan modal yang dimiliki pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah sangat kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan kapasitas keuangannya cukup besar untuk melakukan pinjaman untuk pembangunan-pembangunan. Hal ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2013-2017

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2013-2017 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik, peningkatan kualitas layanan pemerintah, pengentasan kemiskinan, perluasan akses lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pengelolaan

keuangan daerah yang berlandaskan pada kinerja anggaran yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah kabupaten lombok tengah, khususnya belanja pegawai (aparatur). Proporsi belanja aparatur dapat menunjukkan apakah penggunaan anggaran keuangan daerah terlaksana dengan efisien, dimana semakin tinggi proporsi belanja aparatur maka semakin rendah penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah proporsi belanja aparatur maka semakin tinggi penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah atau pelayanan publik. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.

Adapun hasil analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pemerintah daerah kabupaten lombok tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

No	Uraian	Total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	a/b x 100
1	Tahun 2013	736.750.447.619,83	1.299.527.390.208,23	56,69
2	Tahun 2014	827.182.767.668,00	1.445.756.004.700,69	57,21
3	Tahun 2015	875.973.364.758,00	1.598.040.334.347,15	54,82
4	Tahun 2016	935.673.417.150,00	1.901.253.260.233,72	49,21
5	Tahun 2017	852.962.169.584,00	1.952.478.169.346,30	43,69
Rata-rata		845.708.433.355,97	1.639.411.031.767,22	51,59

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di kabupaten lombok tengah tahun 2013-2017 mengalami tren penurunan dari 56,69% di tahun 2013 menjadi 43,69% di tahun 2016 atau mengalami rata-rata penurunan 6,31% pertahun pada kurun waktu tersebut dengan rata-rata proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran sebesar 51,59%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah kabupaten lombok tengah relatif baik dari sisi Belanja, karena

proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam postur anggaran. Oleh karena itu, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran diharapkan terus mampu ditekankan sehingga proporsi untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dalam pembangunan daerah dapat meningkat. Kebijakan ini juga penting sebagai bagian dari upaya membangun kemampuan ekonomi daerah untuk menunjang ketersediaan infrastruktur sebagai penunjang dalam mendorong investasi di daerah.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja.

Berikut disajikan gambaran Defisit Riil Anggaran dan Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017:

Tabel 3.8.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.230.524.285.617,67	1.418.680.556.740,92	1.631.526.898.989,52	1.930.329.082.305,70	1.917.035.737.682,65
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.293.972.080.951,23	1.416.189.120.936,69	1.549.692.154.035,15	1.832.981.039.172,41	1.930.401.187.345,90
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.555.309.257,00	29.566.883.764,00	48.348.180.312,00	68.272.221.061,31	22.076.982.000,40
A	Defisit riil = 1 - (2+3)	(69.003.104.590,56)	(27.075.447.959,77)	33.486.564.642,37	29.075.822.071,98	(35.442.431.663,65)

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Tabel 3.9.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	82.538.566.035,15	94.202.068.244,86	71.939.679.916,09	105.504.646.558,46	134.819.068.630,44
2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
3	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	80.499.021.350,40	4.777.960.650,00			
4	Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya					
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				238.600.000,00	
5	Penerimaan dari Pengembalian Pokok Investasi	167.585.449,87	41.470.000,00	78.402.000,00		57.000.000,00
6	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada perusahaan Negara					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	163.205.172.835,42	99.021.498.894,86	72.018.081.916,09	105.743.246.558,46	134.876.068.630,44
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	94.202.068.244,86	71.946.050.935,09	105.504.646.558,46	134.819.068.630,44	99.371.454.716,79

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Dari Tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa pada kurun waktu tahun 2013-2017 defisit riil anggaran pemerintah daerah kabupaten lombok tengah mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2013 defisit riil sebesar Rp. (69.003.104.590,56) yang turun menjadi Rp. (27.075.447.959,77) pada tahun 2014 dan surplus sebesar Rp. 33.486.564.642,37 pada tahun 2015 yang kemudian terjadi fluktuasi defisit riil dimana pada tahun 2016 surplus menjadi Rp. 29.075.822.071,98 dan tahun 2017 kembali defisit sebesar Rp. (35.442.431.663,65) sebagai akibat peningkatan belanja daerah.

Kemudian dari Tabel 3.9 dapat diketahui bahwa komponen utama penutup defisit riil tahun 2013 dan 2014 adalah penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan pinjaman daerah. Sedangkan penutup defisit riil tahun 2015, 2016 dan 2017 utamanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) kabupaten lombok tengah berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, pelampauan penerimaan pembiayaan daerah dan sisa pengeluaran pembiayaan daerah dengan kontribusi terbesar bersumber dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Adapun perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) kabupaten lombok tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	94.201.707.239,86	100,00	71.931.121.836,09	100,00	105.504.646.558,46	100,00	134.819.068.630,44	100,00	99.371.454.716,79	100,00
2	Pelampauan Penerimaan PAD	(6.772.078.870,44)	(7,19)	(4.075.625.615,08)	(5,67)	2.068.268.042,88	1,96	8.768.920.060,43	6,50	6.020.081.666,92	6,06
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	(3.665.287.471,76)	(5,10)	(7.931.671.746,00)	(7,52)	(8.950.041.515,00)	(6,64)	(29.190.312.038,00)	(29,37)
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	(9.831.558.501,56)	(9,32)	6.567.067.873,96	4,87	794.405.110,00	0,80
5	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	100.877.884.455,30	107,09	79.622.364.922,93	110,69	119.147.577.782,14	112,93	126.244.522.211,05	93,64	121.782.462.227,87	122,55
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	95.901.655,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	-	49.670.000,00	0,07	72.030.981,00	0,07	238.600.000,00	0,18	27.000.000,00	0,03
9	Sisa Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-	-	-	1.980.000.000,00	1,88	1.950.000.000,00	1,45	-	-
10	Koreksi SILPA	-	-	-	-	-	-	-	-	(62.182.250,00)	(0,06)

Sumber : BPKAD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan pembangunan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah karena perumusan kerangka kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk:

1. Menjamin proses pembangunan kabupaten lombok tengah yang berkelanjutan sesuai dengan visi pemerintah kabupaten lombok tengah dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
2. Menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Meminimalkan resiko fiskal untuk menjamin keberlanjutan anggaran pemerintah daerah.

Kebijakan pendanaan pembangunan daerah kabuapten lombok tengah juga bergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, kemampuan pengeluaran investasi dan dinamika ekonomi yang terjadi di tingkat nasional dan regional. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016-2021 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perbaikan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun regional. Untuk itu diperlukan analisis yang komprehensif terkait kerangka pendanaan.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah digambarkan dari total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat sertakan prioritas utama.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pendapatan Daerah

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan memajukan pembangunan di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam

menyelenggarakan urusan pemerintah diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan daerah kabupaten Lombok Tengah terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Adapun kebijakan terkait Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan PAD di masa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pematapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.

4. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
8. Peningkatan peran dan fungsi sedahan sebagai ujung tombak pelayanan publik.
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

2). Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam

mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

3). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatandaerah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Desa dan Dana Insentif Daerah (DID).

Kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dengan tetap berupaya melakukan perbaikan kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan pemerintahan umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan yang meliputi peningkatan Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas Pelayanan dasar publik bidang Pendidikan, peningkatan pelayanan dasar publik bidang kesehatan, peningkatan pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, penurunan kemiskinan dan perbaikan indeks pembangunan manusia, perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perbaikan kualitas perencanaan daerah, inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan meningkatkan kemudahan investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Beberapa asumsi yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pendapatan asli daerah tahun 2016-2021 diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah dari sector pajak dan retribusi daerah yang diharapkan perkembangannya progresif dan moderat dengan pertumbuhan rata-rata 3,58% pertahun dengan asumsi pada lima tahun kedepan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah sudah lebih baik dan kontribusi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dapat tumbuh rata-rata 2% pertahun. Untuk itu diperlukan upaya-upaya:
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan dukungan data yang valid dan berkualitas, perbaikan regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- b. Optimalisasi penerimaan retibusi daerah melalui perbaikan sistem dan kemudahan layanan, perbaikan regulasi, dan peningkatan intensitas monitoring evaluasi terhadap pemungutan retribusi daerah.
 - c. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis badan usaha milik daerah.
 - d. Optimalisasi pendapatan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan kualitas layanan.
 - e. Optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah daerah di lokasi-lokasi strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
 - f. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui penerapan *idle cash management* guna meningkatkan penerimaan jasa giro dan penerimaan bunga deposito.
2. Dana perimbangan memiliki tren peningkatan yang positif sampai dengan tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 10,83% pertahun. Hal ini sejalan dengan tren pertumbuhan kinerja perekonomian nasional yang cenderung stabil dalam tiga tahun terakhir sehingga diproyeksikan dana perimbangan khususnya DAU mengalami peningkatan yang stabil dikisaran 5,44% pertahun selama tahun 2013-2017 dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak tumbuh sebesar 13,13% pertahun. Pertumbuhan yang sangat tinggi terjadi pada DAK yang tumbuh dengan rata-rata sebesar 38,96% pertahun.

Beberapa asumsi lain yang digunakan dalam menghitung proyeksi dana perimbangan adalah kebijakan pemerintah terkait Dana Transfer Umum dan Khusus ke daerah yang didasarkan pada pengalokasian sesuai kemampuan negara, sinkronisasi dan *refocussing* menu DAK fisik, afirmasi DAK bagi daerah kepulauan, tertinggal dan terluar sehingga diproyeksikan pendapatan kabupaten Lombok Tengah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan DAK akan bertambah sebesar 1% setiap tahun.

Selain itu kebijakan nasional terkait reformulasi DAU untuk pemerataan kemampuan fiskal dan redistribusi kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berakibat terjadinya Pengalihan Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi dan pusat akan menurunkan alokasi dasar perhitungan DAU. Sehingga diproyeksikan pendapatan kabupaten Lombok Tengah yang bersumber dari DAU akan bertambah sebesar 0,05% setiap tahun.

3. Kontribusi utama lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dana desa yang merupakan kebijakan pemerintah pusat terkait pemerataan pembangunan di daerah. Dilihat dari tren tahunannya dan beberapa kebijakan pemerintah terkait transfer dana BOS ke daerah dan kebijakan terkait dana desa, diproyeksikan pendapatan daerah yang bersumber dari hibah dana BOS dan transfer dana desa akan tumbuh sebesar 2% setiap tahun.

Berdasarkan beberapa pendekatan perhitungan dan asumsi tersebut, pendapatan daerah kabupaten lombok tengah pada kurun waktu 2017-2021 diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sebesar 0,07% pertahun sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
PENDAPATAN	1.917.035.737.682,65	1.997.035.403.189,17	2.151.687.975.000,00	2.193.131.315.000,00	2.237.998.007.000,00	3,95
PENDAPATAN ASLI DAERAH	286.691.384.414,65	194.640.639.337,17	199.768.860.000,00	204.496.048.000,00	209.339.734.000,00	-7,56
Hasil Pajak Daerah	69.785.785.673,00	67.423.937.254,50	73.180.915.000,00	75.376.343.000,00	77.637.634.000,00	2,70
Hasil Retribusi Daerah	14.982.585.692,63	22.948.818.969,00	23.587.547.000,00	24.059.298.000,00	24.540.484.000,00	13,13
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.644.709.583,72	9.153.132.198,67	12.376.596.000,00	12.624.128.000,00	12.876.611.000,00	0,46
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	189.278.303.465,30	95.114.750.915,00	90.623.802.000,00	92.436.279.000,00	94.285.005.000,00	-15,99
DANA PERIMBANGAN	1.428.941.613.611,00	1.456.430.241.000,00	1.564.878.252.000,00	1.599.169.508.000,00	1.634.416.694.000,00	3,42
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	97.188.246.179,00	83.317.644.000,00	77.288.020.000,00	78.421.653.000,00	79.573.837.000,00	-4,88
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	38.537.854.549,00	41.604.693.000,00	41.212.836.000,00	41.624.965.000,00	42.041.215.000,00	2,20
- Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak lainnya	58.650.391.630,00	41.712.951.000,00	36.075.184.000,00	36.796.688.000,00	37.532.622.000,00	-10,56
Dana Alokasi Umum	981.107.649.000,00	985.217.157.000,00	1.028.786.865.000,00	1.059.650.471.000,00	1.091.439.986.000,00	2,70
Dana Alokasi Khusus	350.645.718.432,00	387.895.440.000,00	458.803.367.000,00	461.097.384.000,00	463.402.871.000,00	7,22
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	201.402.739.657,00	345.964.522.852,00	387.040.863.000,00	389.465.759.000,00	394.241.579.000,00	18,28
Pendapatan Hibah	1.043.026.546,00	93.418.085.000,00	98.153.011.000,00	100.116.072.000,00	102.118.394.000,00	214,56
- Hibah IPDMIP	1.043.026.546,00	1.369.285.000,00	4.604.211.000,00	4.696.296.000,00	4.790.222.000,00	46,39
- Hibah Limbah Setempat	-	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.060.000.000,00	3.121.200.000,00	27,67
- Hibah Dana BOS	-	90.548.800.000,00	90.548.800.000,00	92.359.776.000,00	94.206.972.000,00	1,33
Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	74.262.538.111,00	80.622.037.852,00	81.428.259.000,00	82.242.543.000,00	83.064.969.000,00	2,84
- Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	35.436.109.850,00	35.818.431.427,00	36.176.616.000,00	36.538.383.000,00	36.903.767.000,00	1,02
- Dana Bagi Hasil Pajak lainnya	38.826.428.261,00	44.803.606.425,00	45.251.643.000,00	45.704.160.000,00	46.161.202.000,00	4,42
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	126.097.175.000,00	171.924.400.000,00	207.459.593.000,00	207.107.144.000,00	209.058.216.000,00	13,47
- Dana Desa	118.597.175.000,00	155.424.400.000,00	193.175.390.000,00	195.107.144.000,00	197.058.216.000,00	13,54
- Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	16.500.000.000,00	14.284.203.000,00	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12,47

Sumber : BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2018

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpolakan. Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada beberapa yang dilakukan, yaitu:

1. Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian pula penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SiLPA) ataupun dana dana yang bersifat temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) perlu dipertimbangkan jika akan dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah.
2. Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan

pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (*sufficient condition*) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di kabupaten Lombok Tengah.

3. Belanja daerah harus disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Dalam perencanaan lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain: (1) Belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan sejenisnya. (2) Belanja langsung yang dipergunakan menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi daerah berupa belanja modal, belanja barang jasa dan belanja operasional lainnya.
4. Belanja diprioritaskan pada belanja periodik yang wajib dan mengikat yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota DPRD, bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa, alokasi dana desa, belanja bunga, belanja jasa kantor dan belanja-belanja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
6. Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah

disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut di atas disusun proyeksi belanja daerah tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12.
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
BELANJA	1.930.401.187.345,90	2.176.365.857.905,96	2.216.978.950.000,00	2.239.650.933.000,00	2.285.197.784.000,00	4,31
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.073.301.948.073,56	1.168.011.922.570,96	1.235.361.165.900,00	1.244.894.974.625,00	1.269.553.186.525,00	4,29
Belanja Pegawai	800.837.649.141,00	838.203.926.002,61	863.079.426.925,00	883.033.906.050,00	903.487.678.900,00	3,06
- Gaji dan Tunjangan		772.691.898.291,44	792.844.803.825,00	812.665.924.000,00	832.982.573.000,00	2,54
- Tambahan Penghasilan PNS		53.645.900.000,00	58.042.600.000,00	58.042.600.000,00	58.042.600.000,00	2,66
- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH		7.353.600.000,00	7.353.600.000,00	7.353.600.000,00	7.353.600.000,00	0,00
- Insentif Pemungutan Pajak Daerah		3.371.196.862,73	3.659.045.750,00	3.768.817.150,00	3.881.881.700,00	4,81
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah		1.141.330.848,45	1.179.377.350,00	1.202.964.900,00	1.227.024.200,00	2,44
Belanja Bunga	338.219.116,00	0,00	5.597.130.000,00	4.767.063.000,00	3.452.011.000,00	78,74
Belanja Hibah	33.804.600.000,00	40.861.200.000,00	42.487.500.000,00	33.011.200.000,00	33.011.200.000,00	-0,59
Belanja Bantuan Sosial	826.686.989,00	13.639.640.846,00	6.561.191.000,00	1.048.691.000,00	1.048.691.000,00	6,13
Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	6.391.177.226,66	9.037.275.622,35	9.676.847.000,00	9.943.565.000,00	10.217.813.000,00	12,45
- Bagi Hasil Pajak Daerah		6.742.393.725,45	7.318.092.000,00	7.537.635.000,00	7.763.764.000,00	4,81
- Bagi Hasil Retribusi Daerah		2.294.881.896,90	2.358.755.000,00	2.405.930.000,00	2.454.049.000,00	2,26
Belanja Bantuan Keuangan	230.649.303.600,90	264.769.880.100,00	306.459.070.975,00	311.590.549.575,00	316.835.792.625,00	8,26
- ADD		106.853.480.100,00	110.607.488.500,00	113.807.212.400,00	117.101.382.300,00	3,10
- Dana Desa		155.424.400.000,00	193.175.390.000,00	195.107.144.000,00	197.058.216.000,00	8,23
- Trantib		1.692.000.000,00	1.876.192.475,00	1.876.193.175,00	1.876.194.325,00	3,50
- Belanja Bantuan Kepada Partai Politik		800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	454.312.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	34,80
BELANJA LANGSUNG	857.099.239.272,34	1.008.353.935.335,00	981.617.784.100,00	994.755.958.375,00	1.015.644.597.475,00	4,33

Sumber : BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2018

c. Pembiayaan Daerah

Tingkat pertumbuhan SiLPA yang cukup tinggi pada kurun waktu 2013-2017 yakni sebesar 13,04% namun demikian dengan mempertimbangkan bahwa pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran akan lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka proyeksi dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 3% dari total APBD sehingga diproyeksikan SiLPA pada tahun-tahun mendatang tidak lebih dari 3% dari total APBD.

Kebijakan pinjaman daerah sebesar Rp. 79.959.000.000,00 pada tahun 2018 mengakibatkan pemerintah daerah harus membayar pokok hutang sebesar Rp. 19.989.750.000,00 setiap tahun mulai tahun 2020.

Selanjutnya terkait kebijakan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menambah kecukupan modal PT Bank NTB mengakibatkan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah harus melakukan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 pada tahun 2017.

Adapun proyeksi pembiayaan daerah kabupaten lombok tengah tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13.
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	134.813.886.380,44	179.330.454.716,79	65.290.975.000,00	66.509.368.000,00	67.189.527.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	134.756.886.380,44	99.371.454.716,79	65.290.975.000,00	66.509.368.000,00	67.189.527.000,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		79.959.000.000,00			
Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	57.000.000,00				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	22.076.982.000,40	0,00	0,00	19.989.750.000,00	19.989.750.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00	0,00		
Pembayaran Pokok Utang	17.076.982.000,40	0,00	0,00	19.989.750.000,00	19.989.750.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	112.736.904.380,04	179.330.454.716,79	65.290.975.000,00	46.519.618.000,00	47.199.777.000,00

Sumber : BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2018

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis rencana penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah lima tahun kedepan. Langkah awal yang harus ditempuh adalah mengidentifikasi kemampuan keuangan daerah pada tahun rencana serta mengidentifikasi belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota DPRD, bagi hasil pajak dan retribusi kepada desa, alokasi dana desa, belanja bunga, belanja jasa kantor dan belanja-belanja lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program pembangunan tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	1.917.035.737.682,65	1.997.035.403.189,17	2.151.687.975.000,00	2.193.131.315.000,00	2.237.998.007.000,00
2	pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3	sisa lebih riil perhitungan anggaran	134.819.068.630,44	99.371.454.716,79	65.290.975.000,00	66.509.368.000,00	67.189.527.000,00
	total penerimaan	2.051.854.806.313,09	2.096.406.857.905,96	2.216.978.950.000,00	2.259.640.683.000,00	2.305.187.534.000,00
	dikurangi:					
4	Belanja tidak langsung	1.073.301.948.073,56	1.168.011.922.570,96	1.235.361.165.900,00	1.244.894.974.625,00	1.269.553.186.525,00
5	Pengeluaran pembiayaan	22.076.982.000,40	-	-	19.989.750.000,00	19.989.750.000,00
	Kapasitas Riil	956.475.876.239,13	928.394.935.335,00	981.617.784.100,00	994.755.958.375,00	1.015.644.597.475,00

Sumber : BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2018

Berdasarkan hasil analisis kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program pembangunan sebagaimana tabel di atas dapat dilihat kapasitas riil kemampuan keuangan daerah 2017-2021 cenderung menurun yang disebabkan oleh meningkatnya belanja tidak langsung yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut ditetapkan kebijakan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah tahun 2017-2021 agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah.

Selanjutnya alokasi anggaran untuk rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok prioritas, yaitu Prioritas I dan Prioritas II.

1. Prioritas I

Merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan minimal 20% (duapuluh persen), monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja prioritas I meliputi Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas, Belanja Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan non kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), Premi JKN Masyarakat Miskin Non Kuota, sharing program jaminan persalinan (Jampersal), belanja sebagai akibat penerimaan hibah, pembangunan Kantor Bupati, belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS), belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok (BDH-PR), Belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pembayaran honorarium pegawai tidak tetap kategori 2 (PTT-K2), pembayaran honorarium guru tidak tetap (GTT), pembayaran beban tetap pemerintah daerah berupa jasa listrik, air dan telepon dan belanja kebijakan daerah lainnya.

2. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Adapun rincian rencana penggunaan kapasitas kemampuan keuangan daerah kabupaten lombok tengah tahun 2017-2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15.
Rencana Penggunaan Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kapasitas riil kemampuan keuangan	956.475.876.239,13	928.394.935.335,00	981.617.784.100,00	994.755.958.375,00	1.015.644.597.475,00
Prioritas I	606.628.769.774,00	723.043.309.342,00	805.074.027.000,00	817.576.650.000,00	824.124.330.000,00
Belanja BLUD	40.000.000.000,00	51.374.448.915,00	51.374.449.000,00	51.374.449.000,00	51.374.449.000,00
Belanja Kapitasi JKN	37.299.183.000,00	25.924.734.000,00	25.924.734.000,00	25.924.734.000,00	25.924.734.000,00
Belanja non kapitasi	12.966.187.000,00	12.966.187.000,00	12.966.187.000,00	12.966.187.000,00	12.966.187.000,00
Belanja Premi JKN Masyarakat Miskin Non Kuota	3.450.000.000,00	3.450.000.000,00	3.715.680.000,00	3.715.680.000,00	3.715.680.000,00
Sharing Jampersal	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Belanja sebagai akibat penerimaan hibah,	1.043.026.546,00	93.418.085.000,00	98.153.011.000,00	100.116.072.000,00	102.118.394.000,00
Pembangunan Kantor Bupati,	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Belanja DBH-CHT	38.537.854.549,00	41.604.693.000,00	41.212.836.000,00	41.624.965.000,00	42.041.215.000,00
Belanja DBH-PR	35.436.109.851,00	35.818.431.427,00	36.176.616.000,00	36.538.383.000,00	36.903.767.000,00
Belanja DAK	350.645.718.432,00	366.109.240.000,00	437.017.167.000,00	439.311.184.000,00	441.616.671.000,00
Pembayaran honorarium PTT-K2	2.460.000.000,00	2.460.000.000,00	2.460.000.000,00	2.460.000.000,00	2.460.000.000,00
Pembayaran honorarium GTT	4.640.400.000,00	4.640.400.000,00	4.640.400.000,00	4.640.400.000,00	4.640.400.000,00
Belanja telepon	893.406.200,00	286.906.000,00	301.252.000,00	316.315.000,00	332.131.000,00
Belanja air	759.504.000,00	907.710.000,00	953.096.000,00	1.000.751.000,00	1.050.789.000,00
Belanja listrik	15.669.498.800,00	18.961.249.000,00	19.909.312.000,00	20.904.778.000,00	21.950.017.000,00
Belanja kawat/faksimili/internet	1.260.150.600,00	2.161.225.000,00	2.269.287.000,00	2.382.752.000,00	2.501.890.000,00
Alokasi Belanja untuk Kecamatan	7.237.121.711,00	7.259.950.000,00	9.000.000.000,00	12.000.000.000,00	12.120.006.000,00
Alokasi Belanja untuk Kelurahan	2.830.609.085,00	4.200.050.000,00	7.500.000.000,00	10.800.000.000,00	10.908.000.000,00
Prioritas II	349.847.106.465,13	205.351.625.993,00	176.543.757.100,00	177.179.308.375,00	191.520.267.475,00

Sumber : BPKAD Lombok Tengah dan Bappeda Lombok Tengah, 2018

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH



Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai acuan penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Lombok Tengah. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Sedangkan pada sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Potensi permasalahan pembangunan umumnya timbul karena kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal dan ancaman yang belum bisa diantisipasi secara baik. Identifikasi permasalahan pembangunan di kabupaten Lombok tengah disajikan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Kurangnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas;
- b. Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai;
- c. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang disertai distribusinya yang belum merata;
- d. Tingginya angka buta huruf;
- e. Implementasi regulasi pendidikan belum optimal;

2. Urusan Kesehatan

- a. Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan;

- b. Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan;
- c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan pada semua tingkat layanan;
- d. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan pada semua tingkat layanan;
- e. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah.
- f. Kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih ada ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap
- b. Perawatan jalan masih kurang optimal
- c. Masih kurangnya tenaga teknis kebinamargaan
- d. Kurangnya cakupan dan kualitas Pelayanan irigasi;
- e. Menurunnya fungsi jaringan irigasi;
- f. Terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan utama irigasi dan prasarana pendukungnya;
- g. Masih lemahnya koordinasi pengelolaan irigasi antar kewenangan (Pusat, provinsi dan kabupaten);
- h. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi relatif masih kurang;
- i. Masih kurangnya cakupan pelayanan air bersih dan air minum
- j. Belum optimalnya fungsi pengendalian dan penataan ruang;
- k. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;
- l. Kurangnya regulasi penataan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- a. Kurangnya cakupan dan pengelolaan pelayanan persampahan.
- b. Masih terbatasnya prasarana penerangan jalan,
- c. Kurangnya cakupan pelayanan listrik.
- d. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni.
- e. Masih terbatasnya Ruang Terbuka Hijau
- f. Belum optimalnya penataan penguasaan lahan

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Angka kriminalitas relatif masih tinggi;

- b. Pelanggaran Peraturan Daerah relatif masih tinggi.

6. Sosial

- a. Cakupan layanan bagi PMKS relatif masih rendah;
- b. Belum optimalnya upaya pemberdayaan sosial;

b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Kompetensi angkatan kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja
- b. Belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja;
- c. Kesempatan/pekerjaan masih terbatas.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. Masih kurangnya peran lembaga pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

3. Pangan

- a. Ketersediaan dan distribusi pangan masih belum merata
- b. Rendahnya diversifikasi pangan
- c. Tata kelola cadangan pangan belum optimal
- d. Sertifikasi pangan segar masih rendah

4. Lingkungan Hidup

- a. Masih rendahnya kualitas sanitasi (drainase, limbah, sampah,) di tingkat rumah tangga dan komunal
- b. Belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Belum optimalnya upaya perlindungan dan konservasi sumber mata air di luar kawasan hutan.
- d. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (reduce-Reuse-Recycle).
- e. Masih rendahnya pemahaman dunia usaha dan masyarakat usaha dalam memenuhi perizinan lingkungan dan upaya tindak lanjut pengelolaan lingkungan.
- f. Cakupan layanan persampahan masih kurang.

5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Cakupan layanan Administrasi Kependudukan relatif masih belum optimal;
- b. Updating database kependudukan belum optimal.

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum optimal;
- b. Belum optimalnya peran serta lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di tingkat desa dalam proses pembangunan;
- c. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan.
- d. Sinkronisasi program desa dan kabupaten belum optimal.
- e. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa belum optimal.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Cakupan layanan KB belum optimal;
- b. Rata-rata usia kawin pertama perempuan masih rendah.

8. Perhubungan

- a. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana keselamatan jalan;
- b. Belum optimalnya cakupan layanan angkutan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan Parkir;
- d. Belum optimanya audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ).

9. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya penertiban penggunaan dan pemanfaatan gelombang radio;
- b. Masih ada beberapa wilayah yang belum terlayani sinyal telekomunikasi (*blankspot area's*);
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik;

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Masih rendahnya keunggulan kompetitif koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
- b. Masih lemahnya kerjasama dan *networking* antar pelaku Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
- c. Akses koperasi dan Usaha Mikro Kecil terhadap pasar, Teknologi dan permodalan masih belum optimal;

11. Penanaman Modal

- a. Kualitas layanan perijinan dan Investasi belum optimal;

- b. Pengendalian investasi masih belum optimal;
- c. Promosi Investasi Daerah masih kurang.

12. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Masih minimnya pembinaan Olah Raga Prestasi dan Rekreasi;
- b. Sarana dan Prasarana olahraga masih belum memadai;
- c. Belum optimalnya pemberdayaan pemuda dan pengembangan organisasi kepemudaan.

13. Statistik

Belum optimalnya penyediaan data yang valid dan berkualitas

14. Persandian

Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah

15. Kebudayaan

- a. Masih kurangnya upaya pelestarian budaya
- b. Masih kurangnya pembinaan sejarah dan kesenian lokal
- c. Masih kurangnya pengelolaan cagar budaya daerah.

16. Perpustakaan

- a. Tingkat kunjungan ke perpustakaan masih rendah;
- b. Kurangnya koleksi buku perpustakaan.

17. Kearsipan

- a. Tingkat kunjungan ke perpustakaan masih rendah;
- b. Manajemen pengelolaan arsip belum optimal;

Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- b. Belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan.

2. Pariwisata

- a. Rendahnya pengelolaan dan keamanan Objek Pariwisata;
- b. Kurangnya amenities di kawasan destinasi pariwisata;
- c. Belum optimalnya promosi wisata;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata;

e. Atraksi dan event wisata masih kurang.

3. Pertanian

- a. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan terutama pada lahan marjinal;
- b. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- c. Menurunnya kualitas infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi maupun jalan produksi/jalan usaha tani;
- d. Meningkatnya gangguan iklim dan hama penyakit tanaman maupun ternak.
- e. Masih rendahnya profesionalitas penyuluh.
- f. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan petani
- g. Penanganan pasca panen kurang optimal
- h. Ketersediaan saprodi pertanian belum optimal.

4. Perdagangan dan Perindustrian

- a. Daya Saing produk Industri masih rendah;
- b. Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perdagangan.
- c. Belum optimalnya penataan pasar rakyat dan Pedagang Kaki Lima (PKL) .

5. Transmigrasi

- a. Minimnya kuota transmigrasi baik antar daerah maupun dalam daerah; Rendahnya kapasitas calon transmigran.

Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan

- a. Masih rendahnya kepatuhan terhadap rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. Masih kurangnya kapasitas aparaturnya pengawasan

2. Perencanaan

- a. Kurangnya Integrasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan *e-planning*
- c. Masih kurangnya kapasitas aparaturnya perencanaan

3. Keuangan

- a. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b. Masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah
- c. Masih kurangnya kapasitas aparaturnya keuangan.

4. Kepegawaian

- a. Belum optimalnya pelaksanaan sistem manajemen kepegawaian;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi kepegawaian
- c. Belum proporsionalnya distribusi aparatur sipil negara terutama tenaga pendidik dan kependidikan dan tenaga kesehatan.

5. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan belum didasarkan pada hasil Analisis Kebutuhan Diklat
- b. Masih rendahnya proporsi pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penjurangan
- c. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

6. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum mandirinya lembaga kelitbangan
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
- c. Belum terbangunnya jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan tingkat regional dan nasional
- d. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah daerah
- e. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur kelitbangan

4.2. Isu Strategis

Perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 tidak terlepas dari dinamika berbagai isu yang terjadi baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sehingga diharapkan dari isu strategis yang telah disusun tidak saja mampu mengarahkan pembangunan pada usaha-usaha penyelesaian permasalahan pembangunan di masa lalu namun juga mampu menghadirkan arah pembangunan yang memiliki visi kedepan dan bersifat antisipatif terhadap berbagai ancaman dan peluang di masa mendatang.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak

ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Tabel 4.1.
Dinamika Isu

No	Internasional	Nasional	Regional/Prov. NTB
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>SDG's:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada; 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan; 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan <i>gender</i> dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 	<p>Percepatan Pemerataan dan Keadilan</p>	<p>Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal, pertumbuhan ekonomi relatif stagnan, tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua; 7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan; 8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan; 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh; 10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara; 11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan; 15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan 	<p>Pertumbuhan Ekonomi</p>	

No	Internasional	Nasional	Regional/Prov. NTB
(1)	(2)	(3)	(4)
	hilangnya keanekaragaman hayati; 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.		
		Kesenjangan Antar Wilayah	Penataan ruang, konektivitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah belum optimal
		Percepatan Pembangunan Kelautan	
2	Mengupayakan kualitas SDM: pendidikan kesehatan, pangan dan gizi dan kesejateranya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mutu dan daya saing keluaran pendidikan belum optimal, derajat kesehatan masyarakat masih relatif rendah, partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal
3	Menjaga keberlanjutan lingkungan hidup	Keberlanjutan Pembangunan	Nusa Tenggara Barat daerah rawan bencana, kualitas dan daya dukung lingkungan belum optimal
4	Mengatur tata kelola yang baik	Tata Kelola: Birokrasi Efektif dan Efisien Pemberantasan Korupsi	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
5	Kondisi masyarakat stabil dan kolaboratif	Stabilitas Politik dan Keamanan	Belum terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan damai secara optimal

Disamping itu perumusan isu strategis mempertimbangkan hasil telaahan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan di tingkat pusat maupun provinsi sehingga isu-su strategis yang dirumuskan diharapkan dapat selaras dengan arah pembangunan baik yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di tingkat pusat maupun provinsi.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut di atas isu-isu strategis Kabupaten Lombok Tengah disimpulkan sebagai berikut:

a) Pengamalan nilai agama dan kearifan lokal

Penguatan budaya dan kearifan lokal serta pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam upaya membendung dampak budaya asing dalam era globalisasi perlu dilakukan upaya sinergis dengan para pemangku kepentingan sehingga tidak terjadi akumulasi permasalahan konflik yang berakibat pada perpecahan di masyarakat.

b) Peningkatan mutu dan akses pendidikan

Kesenjangan partisipasi sekolah masih merupakan masalah sentral pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya akses pendidikan dan kualitas layanan pendidikan, baik pada strata pendidikan anak usia dini maupun pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

c) Peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan yang sesuai standar merupakan prasyarat mutlak yang didukung oleh upaya promosi kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, penanggulangan penyakit menular, PHBS, pengawasan peredaran obat makanan dan pemantapan pelaksanaan jaminan kesehatan.

d) Penanggulangan kemiskinan

Untuk mendorong keberhasilan dalam peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, diperlukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin secara sinergis dengan stakeholder terkait. Selain itu diperlukan upaya memperkuat kedudukan serta kapasitas kelembagaan yang berfungsi mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

e) Peningkatan perekonomian daerah

Dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, diperlukan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di tingkat hulu (Produksi) sampai dengan proses di tingkat hilir yang meliputi pengembangan produk olahan, pemasaran (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas) dan Peningkatan Sumber Daya Manusia pelaku usaha. Dengan mengedepankan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan maka kerangka strategis pembangunan diarahkan pada: Peningkatan pengelolaan pariwisata, Pengembangan Produk Unggulan daerah yang berbasis komoditas pertanian dan perikanan serta industri kerajinan yang memiliki kualitas dan daya saing pasar yang memadai sehingga bisa tercapai satu desa satu produk unggulan, Pengembangan atraksi seni budaya, pengembangan desa wisata, atraksi atau pentas seni secara teratur, Peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha local, Koordinasi dan fasilitasi pemasaran bersama di tingkat regional dengan kabupaten/kota se-Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung

keberadaan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Pintu Gerbang Udara Propinsi Nusa Tenggara Barat.

f) Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah

Ketersediaan Infrastruktur Dasar mutlak menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena dengan pemenuhan infrastruktur dasar akan menimbulkan *multiplier effect* yang positif dalam pembangunan di daerah. Kondisi infratraktur jalan kabupaten dalam kondisi mantap terus mengalami peningkatan yang signifikan dari 41% tahun 2011 menjadi 69,74 di tahun 2017. Namun dengan semakin bertambahnya panjang jalan kabupaten karena peningkatan status jalan desa tentunya hal ini masih perlu mendapatkan perhatian terutama dari segi kualitas dan pemeliharannya. Kondisi cakupan layanan air bersih juga terus mengalami peningkatan, namun dengan makin bertambahnya jumlah penduduk dan sumber air yang cenderung menurun tentunya memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah. Infrastruktur dasar lain yang masih perlu mendapat perhatian adalah kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sanitasi yang masih belum merata.

g) Tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup dan daya dukung lingkungan sebagai akibat pelaksanaan pembangunan dan dampak perubahan iklim perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang holistik, tematik dan integratif dalam ruang spasial dan aspasial menuju pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas.

Sebagai daerah yang letak geografisnya rawan terhadap ancaman bencana, perlu dilakukan upaya-upaya mitigasi (pengurangan dampak) resiko bencana dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sehingga mengurangi resiko bencana.

h) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu isu yang masih perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah kabupaten Lombok Tengah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan berujung pada peningkatan kualitas layanan publik di berbagai sektor. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui peningkatan kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas

dan transparansi. Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diarahkan pada peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kabupaten Lombok Tengah. Peningkatan reformasi birokrasi termasuk didalamnya adalah peningkatan pelayanan publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (*smart city*); pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas yang didukung oleh kapasitas fiskal daerah yang memadai.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



5.1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata **‘beriman’** berarti masyarakat yang meyakini dan melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata **‘sejahtera’** berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata **‘bermutu’** berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

5.2. MISI

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

- 1. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL**

Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok yang bersandar pada nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.

2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya pelestarian seni budaya serta prestasi kepemudaan dan olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan. Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.

3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS

Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi. terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, industri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna terwujudnya sinergitas di

antara pemerintah, swasta, kaum cendekia, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian dan pengembangan serta tenaga ahli.

4. MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRA STRUKTUR YANG MEMADAI

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai, mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten. Terwujudnya infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

5. MEWUJUDKAN KEPEREMINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang profesional, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah, terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik, serta terwujudnya pengawasan yang profesional.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dari misi yang telah ditetapkan, dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing tersebut. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran operasional untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama, diukur oleh indikator keberhasilan yaitu Indeks Toleransi.
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan ukuran keberhasilan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka.
3. Meningkatnya perekonomian daerah, dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini sebagai indikator tujuan.
4. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan, sebagai indikator keberhasilan adalah Indeks Wiliamson.
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagai ukuran keberhasilan.

Perumusan tujuan dan keterkaitan dengan misi RPJMD tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	
Misi 1 : Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama Melalui Revolusi Mental Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Agama dan Kearifan Lokal	1.	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	1.	Indeks Toleransi
Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat Dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender	2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
			3.	Angka Kemiskinan
			4.	Tingkat Pengangguran Terbuka
Misi 3 : Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah dan Kemakmuran Masyarakat Melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan	3.	Meningkatnya perekonomian daerah	5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dukungan Stabilitas Kamtibmas			6.	Indeks gini
Misi 4 : Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan Dengan Dukungan Infrastruktur yang Memadai	4.	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan	7.	Indeks Wiliamson
Misi 5 : Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan Kepastian Hukum Dengan Dukungan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	8.	Nilai EKPPD

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Hasil rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah :

- Terpeliharanya stabilitas sosial dengan indikator sasaran tingkat kriminalitas
- Terpeliharanya kerukunan umat beragama dengan indikator sasaran konflik berlatar belakang agama

2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah :

- Meningkatnya kualitas pendidikan dengan indikator sasaran yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, PAUD terakreditasi A, SD terakreditasi A, dan SPM yang terakreditasi A.

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran usia harapan hidup
 - Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja dengan indikator sasaran angka PMKS, tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengeluaran per kapita disesuaikan.
 -
3. Meningkatnya perekonomian daerah
- Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah :
- Meningkatnya nilai perdagangan, jasa unggulan dan investasi daerah dengan indikator sasaran yaitu laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan, dan laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi dan makan minum
 - Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan dengan indikator sasaran rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
4. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan
- Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah :
- Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah dengan indikator sasaran rata-rata infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis
 - Terwujudnya tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan ketaatan terhadap RTRW
 - Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman dengan indikator sasaran luasan kawasan kumuh dan spot kawasan kumuh dan rawan bencana
 - Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri dengan indikator sasaran desa berkembang menjadi desa cepat berkembang
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan
- Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah :

- Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP dan Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah
- Meningkatnya kapasitas fiskal daerah dengan indikator sasaran tingkat kemandirian fiskal daerah

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan diatas dijelaskan melalui Tabel 5.2

Tabel 5.2
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)		
					2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021			
I	Misi 1 : Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai nilai agama dan kearifan local											
	1.1	T-1	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	Indeks Toleransi	Poin	NA	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,45
	1.1.1	S-1	Terpeliharanya Stabilitas Sosial	Tingkat kriminalitas	Kasus/10 0.000 penduduk	99,01	94,44	92,40	88,55	85,30	81,63	81,63
	1.1.2	S-2	Terpeliharanya kerukunan umat beragama	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
II	Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender											
	2.1	T-2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	IPM	Poin	63,22	64,36	65,41	66,36	67,19	67,87	67,87
				Angka Kemiskinan	%	15,80	15,31	14,89	14,51	14,17	13,86	13,86
				Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,90	2,90	2,87	2,85	2,84	2,83	2,83

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)
							2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021	
	2.1.1	S-3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,6	5,95	6,26	6,52	6,74	6,88	6,88
				Harapan lama sekolah	Tahun	12,83	13,13	13,42	13,69	13,93	14,15	14,15
				PAUD terakreditasi A	%	0,31	0,31	0,92	1,11	1,53	1,53	1,53
				SD terakreditasi A	%	3,01	3,85	4,35	5,18	6,02	6,86	6,86
				SMP terakreditasi A	%	1,68	6,7	8,38	10,06	11,73	13,97	13,97
	2.1.2	S-4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,01	65,28	65,52	65,73	65,91	66,06	66,06
	2.1.3	S-5	Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	Angka PMKS	orang	9.319	7.083	4.847	3.112	1.901	1.092	1.092
				tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71,81	72,93	73,35	73,80	74,23	74,65	74,65
				Pengeluaran per Kapita disesuaikan	Rp (000/tahun)	9.079	9.319	9.568	9.802	10.030	10.252	10.252
	III	Misi 3 : Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas										
3.1	T-3	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,67	6,42	6,47	6,53	6,56	6,61	6,61	
			Indeks Gini	Poin	0,352	0,348	0,344	0,340	0,336	0,332	0,332	

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)
							2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021	
	3.1.1	S-6	Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	3,21	4,60	4,06	4,27	4,47	4,68	4,68
				Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	9,54	7,01	7,44	8,18	8,24	8,81	8,81
	3.1.2	S-7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	104,36	105,51	104,76	105,28	105,48	105,69	105,69
				Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85,00	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00	86,00
IV	Misi 4 : Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infra struktur yang memadai											
	4.1	T-4	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan	Indeks Wiliamson	Poin	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39
	4.1.1	S-8	Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur	%	60,62	65,24	67,37	70,87	77,64	79,11	79,11

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)	
						2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021		
			koneksitas wilayah	teknis								
	4.1.2	S-9	Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	45,17	48,08	52	52,5	53	53,5	53,5
				Ketaatan terhadap RTRW	%	77,32	78,47	80,32	82,54	84,36	86,71	86,71
	4.1.3	S-10	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	110	60,14	48,02	35,90	23,77	11,65	11,65
				Spot kawasan kumuh dan rawan bencana	Spot	13	7	5	3	2	1	1
	4.1.4	S-11	Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	15	17	20	24	29	35	35
V	Misi 5 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas											
	5.1	T-5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai EKPPD	Poin	3,1269	3,1313	3,1372	3,1431	3,1488	3,1545	3,1545
	5.1.1	S-12	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	CC	B	B	B	B
				Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	2	2	2	2	2	2	2

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2021)
							2017 (realisasi)	2018	2019	2020	2021	
			daerah									
	5.1.2	S-13	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	8,6	14,95	9,75	9,28	9,32	9,35	9,35

Penyelarasan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah sebelum dengan setelah perubahan dapat dilihat pada table 5.3 dan 5.4 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Penyelarasan Perubahan Tujuan RPJMD Kabuapten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

TUJUAN SEBELUM PERUBAHAN		TUJUAN SETELAH PERUBAHAN	
1.	Meningkatnya intensitas keterlibatan tokoh agama dalam penanaman nilai-nilai agama	1.	Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Hidup Beragama
2.	Meningkatnya peran lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan dalam pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara		
3.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanaman nilai kearifan lokal		
4.	Mencegah semakin meluasnya konflik sosial		
5.	Mencegah semakin menurunnya partisipasi politik masyarakat		
6.	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan PMKS	2.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat
7.	Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat dan desa		
8.	Meningkatnya efektifitas pembangunan Keluarga Berencana		
9.	Meningkatnya kualitas dan kapasitas perempuan		
10.	Meningkatnya efektifitas layanan perlindungan perempuan dan anak		
11.	Meningkatnya efektifitas penanganan transmigrasi		
12.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan		
13.	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan sekolah dan masyarakat		
14.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembinaan pemuda dan olahraga		
15.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan		
16.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja		
17.	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	3.	Meningkatnya Perekonomian Daerah
18.	Meningkatnya Produktifitas dan kualitas hasil Industri Kecil Menengah		
19.	Meningkatnya aksesibilitas dan stabilitas perdagangan barang dan jasa		
20.	Meningkatnya kondusifitas investasi		
21.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan		

TUJUAN SEBELUM PERUBAHAN		TUJUAN SETELAH PERUBAHAN	
.	non perizinan		
22	Meningkatnya produktifitas perikanan dan hasil olahan perikanan		
23	Meningkatnya amenities (kenyamanan) dan sekuritas (keamanan) wisatawan		
24	Meningkatnya stabilitas ketahanan pangan		
25	Meningkatnya produktifitas pertanian, perkebunan dan peternakan untuk menuju swasembada pangan		
26	Meningkatnya kualitas sumberdaya hutan dan lahan		
27	Mewujudkan sisten inovasi daerah yang berkualitas		
28	Mewujudkan stabilitas kamtibmas		
29	Meningkatnya efektifitas pengelolaan ruang wilayah	4.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Keterpaduan Kawasan dan Antar Kawasan
30	Meningkatnya utilitas pendukung prasarana jalan		
31	Meningkatnya konektifitas pembangunan antar wilayah		
32	Meningkatnya kuantitas penyediaan air baku		
33	Meningkatnya kualitas layanan persampahan		
34	Meningkatnya amenities (kenyamanan) dan sekuritas (keselamatan) pengguna jalan		
35	Meningkatnya aksesibilitas komunikasi dan informasi antar wilayah		
36	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman		
37	Meningkatnya kualitas layanan air bersih		
38	Meningkatnya efektifitas penanganan kebencanaan		
39	Mencegah semakin menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	5.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
40	Meningkatkan kapasitas pemda dalam pelayanan publik		
41	Meningkatnya layanan administrasi kependudukan		
42	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		
43	Mencegah semakin tingginya pelanggaran perda		

TUJUAN SEBELUM PERUBAHAN		TUJUAN SETELAH PERUBAHAN	
44 .	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah		
45 .	Meningkatkan kapasitas DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		

Tabel 5.4
Penyelarasan Perubahan Sasaran RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

SASARAN SEBELUM PERUBAHAN		SASARAN SETELAH PERUBAHAN	
Sasaran pada Tujuan Nomor 1 s.d. 5		Sasaran pada Tujuan 1	
1	Terwujudnya pola pemberdayaan tokoh agama yang tepat	1	Terpeliharanya stabilitas sosial
2	Terwujudnya lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang berkualitas	2	Terpeliharanya kerukunan umat beragama
3	Terbinanya pengurus rumah ibadah secara berkelanjutan		
4	Terwujudnya rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan masyarakat		
5	Terwujudnya metode penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang efektif		
6	Tercegah terjadinya konflik sosial		
7	Tercegah semakin rendahnya keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi		
Sasaran pada Tujuan Nomor 6 s.d. 16		Sasaran pada Tujuan 2	
8	Tersedianya sarana prasarana pendukung	3	Meningkatnya kualitas pendidikan
9	Tersedianya data PMKS yang valid	4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
10	Terbinanya PMKS secara berkelanjutan	5	Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja
11	Terbinannya lembaga sosial secara berkelanjutan		
12	Tersalurkannya bantuan bagi PMKS		
13	Terwujudnya aparatur pemerintahan desa yang berkualitas		
14	Terwujudnya kelembagaan desa yang berkualitas		
15	Terwujudnya pembinaan lembaga ekonomi pedesaan yang intensif dan berkelanjutan		
16	Terwujudnya pola pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pelaku pemberdayaan yang efektif dan berkesinambungan		
17	Terwujudnya lembaga adat yang berperan aktif dalam masyarakat		
18	Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri		
19	Tersedianya prasarana penunjang		
20	Tersedianya sarana penunjang		
21	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten		
22	Terwujudnya masyarakat yang sadar tentang pentingnya Keluarga Berencana		
23	Tersedianya modal usaha yang memadai		

SASARAN SEBELUM PERUBAHAN		SASARAN SETELAH PERUBAHAN	
24	Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan pertama		
25	Terwujudnya penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49) tahun		
26	Tersedianya lembaga keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang efektif		
27	Tersedianya sumber daya manusia yang responsif gender		
28	Tersedianya aturan tentang kesetaraan gender		
29	Terwujudnya kelompok perempuan yang terampil dan mandiri		
30	Tersedianya lembaga pengarusutamaan gender yang profesional		
31	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak		
32	Tersedianya sarana prasarana yang memadai		
33	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten		
34	Terwujudnya masyarakat yang paham tentang perlindungan perempuan dan anak		
35	Tersedianya aturan terkait perlindungan perempuan dan anak		
36	Tersedianya lembaga perlindungan perempuan dan anak yang profesional		
37	Tersedianya kawasan transmigrasi		
38	Tersedianya sarana prasarana pendukung		
39	Terwujudnya transmigran yang terampil dan mandiri		
40	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini yang memadai		
41	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memadai		
42	Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas		
43	Terwujudnya pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan		
44	Terwujudnya tata kelola penyelenggara layanan pendidikan yang baik		
45	Terwujudnya pembelajaran bagi warga buta aksara		
46	Terwujudnya lembaga pendidikan dan kursus yang berkualitas		
47	Terwujudnya pendidikan inklusi yang berkualitas		
48	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai		
49	Tersedianya tenaga pustakawan yang professional		

SASARAN SEBELUM PERUBAHAN		SASARAN SETELAH PERUBAHAN	
50	tersedianya sarana prasarana yang memadai		
51	Terwujudnya sinergi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembinaan pemuda dan olahraga		
52	Tersedianya tenaga kesehatan yang profesional		
53	Tersedianya fasilitas dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar		
54	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan memadai		
55	Terwujudnya sistem layanan kesehatan yang baik		
56	Terwujudnya metode promosi PHBS yang tepat		
57	Terlayannya kesehatan gizi ibu dan anak secara tepat		
58	Tertanganinya penyakit menular secara berkesinambungan		
59	Terlayannya imunisasi secara berkelanjutan		
60	Terselenggaranya jaminan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat		
61	Tersedianya fasilitas dan perbekalan kesehatan pendukung layanan rumah sakit		
62	Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas tatakelola keuangan BLUD rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku		
63	Terwujudnya pola produksi pangan yang baik pada industri rumah tangga pangan		
64	Tersedianya sarana prasarana dan SOP untuk layanan kesehatan ibu, anak		
65	terwujudnya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja		
66	Tersedianya lapangan pekerjaan baru		
67	terwujudnya perlindungan terhadap tenaga kerja		
Sasaran pada Tujuan Nomor 17 - 28		Sasaran pada Tujuan 3	
68	Tersedianya SDM koperasi dan aparatur yang berkompeten	6	Meningkatnya nilai perdagangan, jasa unggulan dan investasi daerah
69	Tersedianya permodalan koperasi yang memadai	7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan
70	Tersedianya sarana prasarana koperasi yang memadai		
71	Tersedianya SDM UMKM dan aparatur yang berkompeten		
72	Tersedianya permodalan UMKM yang memadai		

SASARAN SEBELUM PERUBAHAN		SASARAN SETELAH PERUBAHAN	
73	Tersedianya sarana prasarana UMKM yang memadai		
74	Tersedianya sarana prasarana IKM yang memadai		
75	Tersedianya SDM industri kecil menengah dan aparatur kompeten		
76	Tersedianya permodalan IKM yang memadai		
77	Tersedianya kawasan industri kecil menengah yang menjadi Tujuan Nomor wisata		
78	Tersedianya prasarana perdagangan yang memenuhi standar		
79	Tersedianya sarana perdagangan yang sesuai standar		
80	Tersedianya SDM perdagangan yang kompeten		
81	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif		
82	Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan secara prima		
83	Tersedianya sarana dan prasarana perikanan yang memadai		
84	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang memadai		
85	Terwujudnya kawasan perikanan unggulan		
86	Tersedianya pelaku usaha perikanan dan aparatur yang berkualitas		
87	Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata yang memadai		
88	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif		
89	Terselenggaranya event pariwisata yang menarik dan berkelanjutan		
90	Terwujudnya pelaku wisata yang profesional		
91	Tersedianya cadangan pangan pemerintah yang memadai		
92	Tersebar nya pangan yang merata		
93	Terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam		
94	Terwujudnya SDM petani dan aparatur pembina yang kompeten		
95	Terpenuhinya sarana prasarana pertanian yang memadai		
96	Tersedianya teknologi pertanian		
97	Terwujudnya pelaku usaha perkebunan dan aparatur yang memadai		
98	Tersedianya sarana dan prasarana perkebunan yang memadai		
99	Tersedianya teknologi perkebunan		

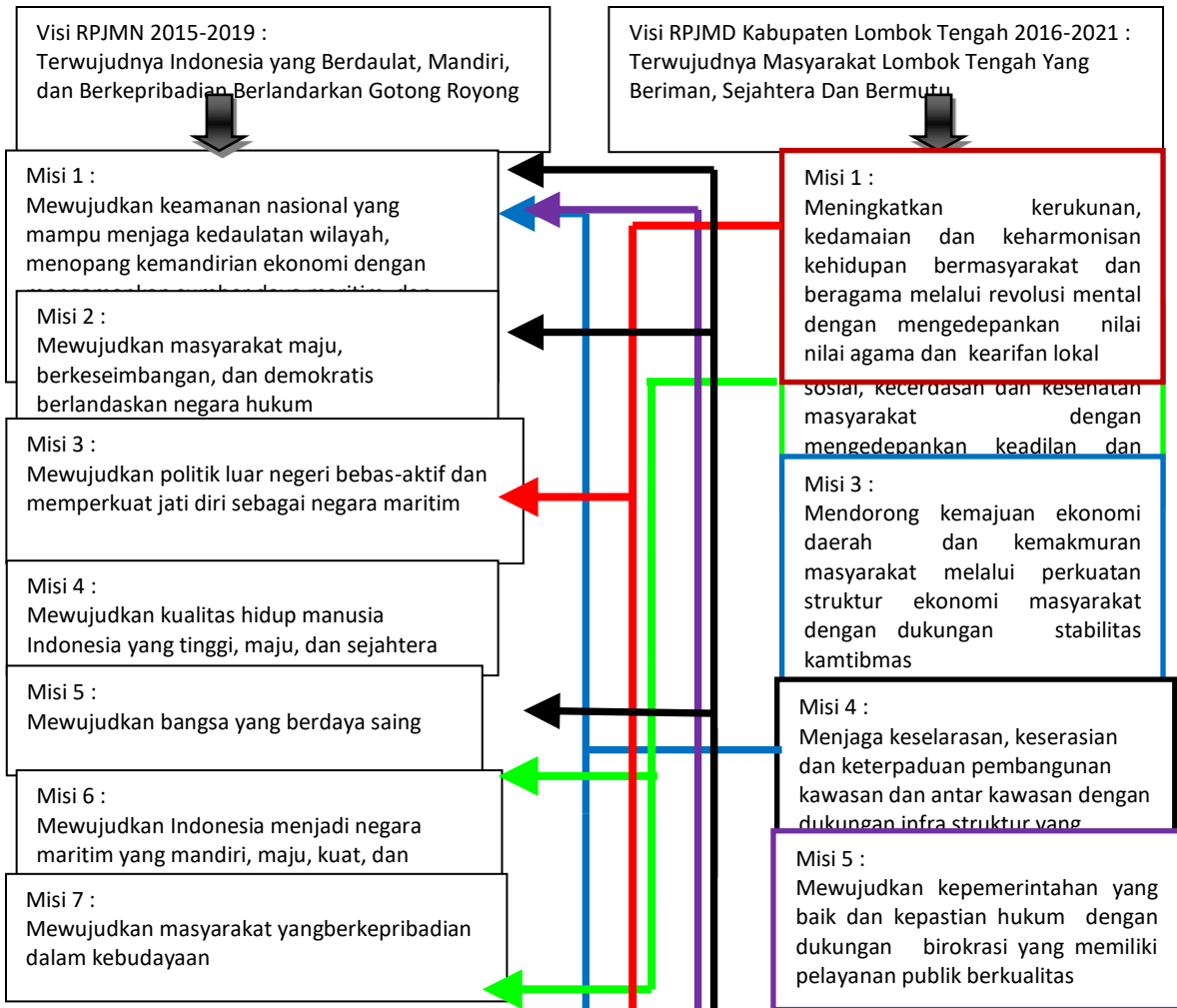
SASARAN SEBELUM PERUBAHAN		SASARAN SETELAH PERUBAHAN	
100	Tersedianya kawasan perkebunan yang menjadi obyek wisata		
101	Tersedianya sarana dan prasarana peternakan yang memadai		
102	Terwujudnya pelaku usaha peternakan dan aparatur yang memadai		
103	Tersedianya teknologi peternakan		
104	Tersedianya sarana pembangunan kehutanan yang memadai		
105	Terwujudnya aparatur yang memadai		
106	Terkendalinya kerusakan hutan dan lahan		
107	Tersedianya teknologi tepat guna		
108	Terwujudnya sistem dan kelembagaan sistem dan inovasi daerah yang efektif		
109	Terciptanya ketentraman, kenyamanan dan perlindungan masyarakat		
Sasaran pada Tujuan Nomor 29 - 39		Sasaran pada Tujuan 4	
110	Tersedianya rencana rinci tata ruang yang memadai	8	Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah
111	Tersedianya perencana wilayah yang kompeten dan memadai	9	Terwujudnya tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas
112	Tersedianya sistem pendukung	10	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman
113	terwujudnya perencanaan ruang yang berkualitas	11	Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri
114	Terlaksananya penyebaran informasi terkait tata ruang		
115	Tersedianya PJU yang memadai		
116	Tersedianya jalan dalam kondisi yang mantap		
117	Tersedianya sarana dan prasarana utilitas perkotaan		
118	tersedianya saluran irigasi yang memadai		
119	Tersedianya debit air pada bangunan utama		
120	Terwujudnya pengelolaan sampah yang efektif		
121	Tersedianya lembaga pengelola persampahan yang profesional		
122	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai		
123	Tersedianya fasilitas keselamatan jalan yang memadai		
124	Tersedianya layanan moda transportasi		
125	Tersedianya tenaga teknis yang memadai		
126	Tersedianya sistem komunikasi dan informatika yang memadai		

SASARAN SEBELUM PERUBAHAN		SASARAN SETELAH PERUBAHAN	
127	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk phbs		
128	Tersedianya sarpras sanitasi		
129	Tersedianya prasarana perumahan yang memadai		
130	Menurunnya luasan kawasan kumuh		
131	Tersedianya sarpras air bersih		
132	Tersedianya aparatur kebencanaan yang kompeten		
133	Tersedianya prasarana yang memadai		
134	Tersedianya sarana yang memadai		
135	Tersedianya sistem peringatan dini kebencanaan		
136	Terwujudnya masyarakat tangguh bencana		
137	Tertanganinya korban bencana Tertanganinya korban bencana secara terpadu		
138	Tersedianya sarana pendukung yang memadai		
139	Tersedianya tenaga yang terampil		
140	Terwujudnya masyarakat sadar lingkungan		
141	Tercegah semakin menurunnya daya dukung lingkungan		
142	Terwujudnya keamanan lingkungan strategis yang kondusif		
143	Tersedianya data/informasi SDA dan LH yang valid		
Sasaran pada Tujuan Nomor 40 - 45		Sasaran pada Tujuan 5	
144	Tersedianya aparatur yang berkompeten	12	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
145	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	13	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah
146	Tersedianya gedung kantor Bupati dan DPRD		
147	Tertatanya administrasi perkantoran		
148	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel		
149	terwujudnya perumusan kebijakan dan pengendalian kebijakan kepala daerah secara komprehensif		
150	Terwujudnya manajemen Apartur Sipil Negara		
151	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal		
152	Terwujudnya kapasitas keuangan daerah yang memadai		
153	Terwujudnya manajemen arsip yang berkualitas		
154	tersedianya tanah dan lahan untuk pembangunan fasilitas umum		

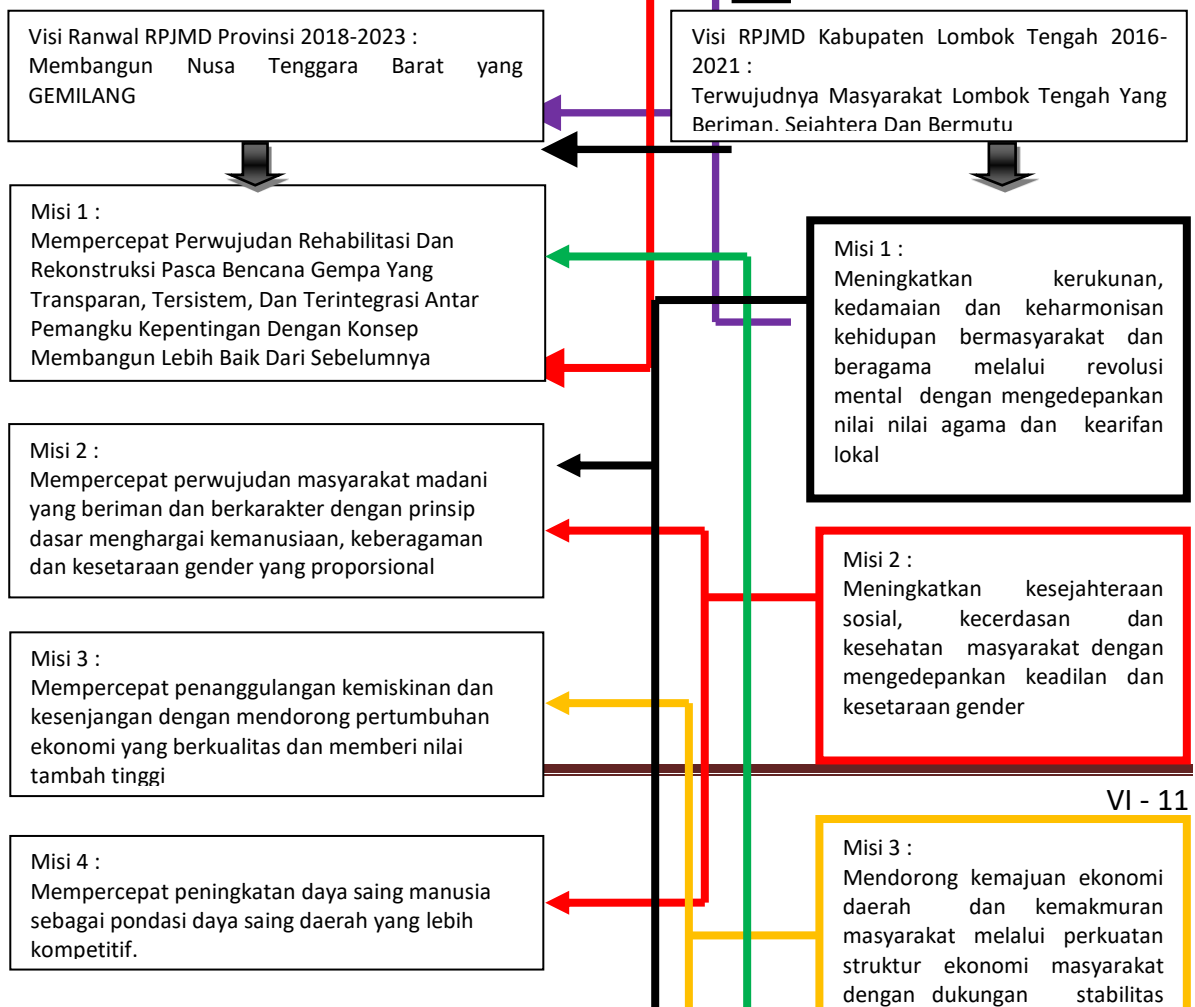
SASARAN SEBELUM PERUBAHAN		SASARAN SETELAH PERUBAHAN	
155	Terwujudnya peningkatan koordinasi pimpinan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		
156	Terwujudnya akses publik terhadap informasi pembangunan		
157	terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan		
158	Terwujudnya metode perencanaan daerah yang komprehensif dan partisipatif		
159	Terwujudnya penyediaan data yang valid dan berkualitas		
160	Terwujudnya kerjasama pembangunan yang sinergis		
161	Terwujudnya pelayanan publik kecamatan yang berkualitas		
162	Tercegah semakin maraknya pelanggaran perda		
163	Terwujudnya profesionalisme APIP dalam pengawasan tata kelola pemerintahan yang baik		
164	Terwujudnya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan		
165	Terpenuhinya kebutuhan administratif yang memadai dalam pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		

Penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang telah diuraikan sebelumnya disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018. Keterkaitan dukungan tersebut dijelaskan pada Gambar5.1 dan Gambar 5.2.

Gambar 5.1
Skema Keterkaitan Visi-Misi RPJMN Tahun 2015-2019 Dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021



Gambar 5.2
Skema Keterkaitan Visi-Misi Ranwal RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2023 Dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021



BAB VI **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM** **PEMBANGUNAN DAERAH**



6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian langkah terpadu untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD Kabupaten Lombok Tengah yang efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dipaparkan pada Bab V, selanjutnya dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel 6.1.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Lombok Tengah

VISI :			
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI KESATU:			
MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL			
1. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	1. Terpeliharanya stabilitas sosial	Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan
			Pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik
	2. Terpeliharanya kerukunan umat beragama	Pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal	Menurunkan Gangguan Keamanan Kenyamanan dan Ketertiban
			Peningkatan kualitas layanan keagamaan
			Menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal
MISI KEDUA:			
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN Keadilan dan Kesetaraan Gender			
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan PAUD
			Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun
			Pengembangan kurikulum pendidikan
			Peningkatan akses dan mutu pendidikan non formal
			Pendidikan inklusi pendidikan dasar
			Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan
			Pengembangan sistem informasi dan manajemen pendidikan
Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin			

VISI :
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pencapaian SPM Pendidikan dasar Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan Pembinaan olah raga prestasi Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan
	2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat	Pemenuhan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan Peningkatan pemenuhan standar dan kualitas layanan rumah sakit pariwisata Penyediaan obat dan vaksin Peningkatan SDM tenaga aparatur kesehatan Pembangunan/rehab puskesmas/pustu/polindes Pengembangan sistem informasi layanan kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Peningkatan promosi, kesehatan masyarakat dan lingkungan Peningkatan kesehatan ibu dan anak Perbaikan gizi masyarakat Layanan kesehatan masyarakat miskin Implementasi SPM pelayanan kesehatan Layanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana Pembinaan keluarga berencana Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak

VISI :			
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3. Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	Peningkatan perlindungan sosial dan kesempatan kerja	Meningkatkan cakupan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan korban bencana Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Peningkatan daya saing tenaga kerja lokal Penguatan sistem ketenagakerjaan daerah Pembinaan tranmigran
MISI KETIGA:			
MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS			
1. Meningkatnya Perekonomian Daerah	1. Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah	Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kemudahan berinvestasi	Peningkatan nilai tambah produk lokal dan unggulan Pemberdayaan koperasi dan UMKM Pengembangan koperasi syariah Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan barang Penataan kawasan kaki lima Pembinaan dan pengembangan IKM Peningkatan pengelolaan pariwisata Promosi Investasi Peningkatan Kualitas Layanan Investasi, Perijinan dan Non Perijinan
	2. Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan	Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor agraris	Penerapan panca usaha pertanian Peningkatan kapasitas petani Penataan kawasan pertanian unggulan Peningkatan kualitas layanan irigasi

VISI :				
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			Peningkatan Populasi Ternak Peningkatan produksi Perikanan Penataan kawasan perikanan unggulan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Peningkatan akses pangan, pengendalian distribusi dan diversifikasi pangan Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin	
MISI KEEMPAT:				
MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI				
1. Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan	1. Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan layanan Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ)	Peningkatan pengelolaan infrastruktur jalan	
			Penyediaan fasilitas dan pengamanan keselamatan jalan	
			Peningkatan layanan angkutan	
	2. Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Penataan ruang dan lingkungan hidup		Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
				Pengendalian dampak pencemaran lingkungan
				Perlindungan sumber mata air
				Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
	3. Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman	Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman		Pengembangan kawasan perumahan
				Peningkatan/Pembangunan Rumah Keluarga Miskin dan korban bencana
				Penyediaan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman
Penyediaan air bersih				
Penyediaan tanah untuk infrastruktur public				
			Peningkatan kualitas layanan persampahan	

VISI :			
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan ketangguhan menghadapi bencana
	4. Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri	Pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif	Pengembangan ekonomi perdesaan
			Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
			Peningkatan kapasitas pemerintahan desa
MISI KELIMA:			
MEWUJUDKAN KEPERINTAHAN YG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS			
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government	Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
			Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas pengawasan
			Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan
			Penyediaan data dan informasi pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan kedinasan kepala daerah
			Peningkatan layanan administrasi DPRD
			Peningkatan layanan kepegawaian
			Peningkatan kapasitas ASN
			Peningkatan kualitas kinerja aparatur
			Peningkatan kualitas manajemen ASN
			Peningkatan kapasitas dan layanan administrasi kecamatan
			Peningkatan kualitas layanan adminduk
			Koordinasi kepemilikan akte nikah
Penyediaan data dan informasi yang berkualitas			
Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah			
Pengamanan Informasi daerah			

VISI :
TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penguatan Sistem Inovasi Daerah
			Peningkatan sarana prasarana aparatur
			Pembangunan gedung pemerintahan
			Peningkatan kualitas pelayanan administratif
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD
2. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Peningkatan kualitas pengelolaan Pengelolaan Asli Daerah (PAD)		

Berdasarkan Tabel 6.1 diatas, rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut :

A. Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik

Kehidupan sosial politik yang kondusif merupakan kondisi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik merupakan tanggung jawab bersama warga dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Upaya yang dilakukan dalam menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik yaitu melalui peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik dan menurunkan gangguan keamanan kenyamanan dan ketertiban yang diarahkan pada pencegahan konflik antar etnis, peningkatan partisipasi pemilih, pencegahan konflik sosial, penurunan kejadian kriminal serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

B. Pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal

Pengamalan nilai-nilai agama dilaksanakan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Kearifan budaya lokal yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah perlu dilestarikan agar tidak punah.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal yaitu peningkatan kualitas layanan keagamaan serta pelestarian budaya dan kearifan lokal yang diarahkan pada peran aktif rumah ibadah dalam pemberdayaan masyarakat, peran aktif lembaga adat dan pelestarian tradisi dan situs budaya.

C. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga berperan penting sebagai pembentukan kepribadian manusia.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan yaitu melalui kebijakan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan PAUD, Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan

tahun, Pengembangan kurikulum pendidikan, Peningkatan akses dan mutu pendidikan non formal, Pendidikan inklusi pendidikan dasar, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, Pengembangan sistem informasi dan manajemen pendidikan, Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin, Pencapaian SPM Pendidikan dasar, peningkatan kualitas layanan perpustakaan, Pembinaan olah raga prestasi, Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan.

D. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat

Kesehatan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualitas layanan kesehatan dapat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakatnya. Upaya peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui kebijakan yang mengarah pada pemenuhan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan, pembangunan/rehab sarana kesehatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan promosi, kesehatan masyarakat dan lingkungan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, Layanan kesehatan masyarakat miskin, Implementasi SPM pelayanan kesehatan, Layanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana, pembinaan keluarga berencana, Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

E. Peningkatan perlindungan sosial dan kesempatan kerja

Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penanganan PMKS harus dilakukan secara tepat untuk mencegah semakin luasnya kesenjangan sosial. Perlindungan sosial diarahkan pada peningkatan cakupan layanan PMKS dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Kesempatan kerja yang luas dengan terciptanya lapangan usaha, memberikan dampak yang baik bagi penyerapan tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan dan bidang usaha. Upaya peningkatan kesempatan kerja

dilaksanakan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja lokal dan penguatan sistem ketenagakerjaan daerah, dan pembinaan transmigran.

F. Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kemudahan berinvestasi

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Lombok Tengah. Destinasi wisata yang cukup banyak didukung dengan fasilitas penunjang yang memadai merupakan modal besar pariwisata. Kabupaten Lombok Tengah sebagai pintu gerbang Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadikan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang memiliki daya tarik cukup besar baik yang berupa wisata alam maupun wisata budaya.

Pengembangan ekonomi kreatif merupakan strategi yang bertujuan untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja.

Kemudahan berinvestasi adalah upaya perbaikan pelayanan investasi kepada investor dalam mempermudah peluang investasi.

Upaya yang dilakukan dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kemudahan berinvestasi dilakukan melalui peningkatan pengelolaan pariwisata, peningkatan nilai tambah produk lokal dan unggulan, pemberdayaan UMKM dan IKM, promosi investasi dan peningkatan kualitas layanan investasi, perijinan dan non perijinan.

G. Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor agraris

Sektor agraris dalam arti luas selain pertanian, perkebunan dan peternakan termasuk didalamnya perikanan masih mendominasi perekonomian Kabupaten Lombok Tengah.

Upaya yang dilakukan dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sector agraris dilakukan melalui penerapan panca usaha pertanian, peningkatan kapasitas petani, peningkatan kualitas layanan irigasi, peningkatan populasi ternak, penataan kawasan pertanian dan perikanan unggulan, peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta peningkatan akses pangan, pengendalian distribusi dan diversifikasi pangan yang diarahkan pada produksi

pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), populasi ternak, produksi perikanan, serta konsumsi protein dan energy.

H. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan layanan LaLu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

Infrastruktur yang baik dan berkualitas akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan sector-sektor pembangunan lainnya. Upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan LLAJ dilakukan melalui peningkatan pengelolaan infrastruktur jalan, penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan peningkatan layanan angkutan.

I. Penataan ruang dan lingkungan hidup

Perkembangan daerah dan pertumbuhan penduduk akan membawa konsekuensi pada pemanfaatan lahan untuk berbagai kegiatan usaha maupun permukiman yang tentunya akan memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup. Strategi ini dilakukan dalam rangka pengendalian ruang agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang, untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Upaya yang dilakukan dalam penataan ruang dan lingkungan hidup dilakukan melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengendalian dampak pencemaran lingkungan, koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup dan perlindungan sumber mata air.

J. Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman

Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman dilakukan dalam rangka penyediaan kebutuhan masyarakat untuk dapat tinggal di lingkungan nyaman, aman dan sehat dan tahan bencana.

Upaya peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman dilakukan melalui pengembangan kawasan perumahan, peningkatan/pembangunan rumah keluarga miskin, penyediaan prasarana sarana

dan utilitas (PSU) kawasan permukiman, peningkatan kualitas layanan persampahan dan peningkatan ketangguhan bencana.

K. Pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif

Kawasan perdesaan merupakan daerah penyangga kawasan perkotaan. Pembangunan kawasan perdesaan harus dilakukan seiring dengan pembangunan kawasan perkotaan dalam rangka pemerataan pembangunan dan untuk mencegah kesenjangan antar kawasan.

Upaya yang dilakukan dalam pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif dilakukan melalui pengembangan ekonomi perdesaan, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

L. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government

Untuk meningkatkan good governance tentunya harus diiringi dengan peningkatan kualitas dan manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government dilakukan melalui pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan dan asset daerah, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, peningkatan kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Selain itu Kabupaten Lombok Tengah juga melakukan upaya peningkatan kualitas layanan adminduk, peningkatan layanan kepegawaian, peningkatan kapasitas dan layanan administrasi kecamatan serta penyediaan data dan informasi pembangunan daerah.

M. Peningkatan kualitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan

peningkatannya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam peningkatan kualitas pengelolaan PAD yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD.

Untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah, provinsi dan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018 maka strategi atau prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah telah diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam nawacitadan agenda pembangunan provinsi, agar dapat terlihat kesinambungan dan kesinergisan antara prioritas pembangunan pusat, provinsi dan daerah seperti yang tersaji pada table 6.2 dan table 6.3.

Tabel 6.2
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas
Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional)		Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah
1.	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik
2.	Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government
3.	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	
4.	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik
5.	Melakukan revolusi karakter bangsa	Pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya local
6.	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
		Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat
		Peningkatan perlindungan sosial dan kesempatan kerja
7.	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama	Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kemudahan berinvestasi

	bangsa –bangsa Asia lainnya	
8.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sector strategis ekonomi domestic	Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor agraris
		Peningkatan kualitas pengelolaan Pengelolaan Asli Daerah (PAD)
9.	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan layanan Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ)
		Penataan ruang dan lingkungan hidup
		Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
		Pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif

Tabel 6.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat
dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

Prioritas Pembangunan Ranwal RPJMD 2018-2023 Provinsi NTB		Prioritas Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah
1.	Budi Pekerti Luhur	Pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya local
2.	Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan	Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government
		Peningkatan kualitas pengelolaan Pengelolaan Asli Daerah (PAD)
		Menjaga kondusifitas kehidupan sosial politik
3.	Pendidikan Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
4.	Kesehatan Berkualitas	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat
5.	Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan perlindungan sosial dan kesempatan kerja
6.	Pembangunan dan Pemberdayaan Berbasis Gender	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat
7.	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif

		serta kemudahan berinvestasi
		Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor agraris
8.	Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan layanan Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ)
		Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
		Pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif
9.	Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Bencana Alam	Penataan ruang dan lingkungan hidup
		Peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman

6.2 Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Program pembangunan daerah menjadi prioritas pembiayaan yang wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Penetapan program prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Strategi : menjaga kondusifitas kehidupan sosial

Arah kebijakan : peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan

Program pembangunan meliputi Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Arah kebijakan : pendidikan politik bagi masyarakat dan partai politik

Program pembangunan meliputi Program Pendidikan Politik Masyarakat

Arah kebijakan : menurunkan gangguan keamanan kenyamanan dan ketertiban

Program pembangunan meliputi :

- Program Penanganan Konflik Sosial
- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Strategi : pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan budaya lokal
- Arah kebijakan : peningkatan kualitas layanan keagamaan
- Program pembangunan meliputi :
- Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah
 - Program Pemberdayaan Lembaga Adat Perdesaan
- Arah kebijakan : menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal
- Program pembangunan meliputi Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3. Strategi peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan
- Arah kebijakan : pembangunan sarana dan prasaran pendidikan PAUD
- Program pembangunan meliputi Program Pendidikan Anak Usia Dini

Arah kebijakan :

- Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun
- Pengembangan kurikulum pendidikan
- Pendidikan inklusi pendidikan dasar
- Pengembangan sistem informasi dan manajemen pendidikan
- Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin
- Pencapaian SPM Pendidikan dasar

Program pembangunan meliputi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Arah kebijakan : Peningkatan akses dan mutu pendidikan non formal

Program pembangunan meliputi Program Pendidikan Non Formal

Arah kebijakan : Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Arah kebijakan : peningkatan kualitas layanan perpustakaan

Program pembangunan meliputi Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Arah kebijakan :

- Pembinaan olahraga prestasi

- Pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan

Program pembangunan meliputi Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda dan Olahraga

4. Strategi : peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan masyarakat

Arah kebijakan :

- Pemenuhan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan
- Peningkatan pemenuhan standard an kualitas layanan rumah sakit pariwisata
- Penyediaan obat dan vaksin
- Peningkatan SDM tenaga aparatur kesehatan
- Pembangunan/rehab puskesmas/pustu/polindes
- Pengembangan sistem informasi layanan kesehatan
- Layanan kesehatan bagi penduduk terdampak bencana
- Layanan kesehatan masyarakat miskin
- Implementasi SPM pelayanan kesehatan

Program pembangunan meliputi :

- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
- Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

Arah kebijakan :

- Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
- Peningkatan promosi, kesehatan masyarakat dan lingkungan
- Peningkatan kesehatan ibu dan anak
- Perbaikan gizi masyarakat

Program pembangunan meliputi Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Arah kebijakan : pembinaan keluarga berencana

Program Pembangunan meliputi Program Keluarga Berencana

Arah kebijakan :

- Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak
- Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

5. Strategi : peningkatan perlindungan sosial dan kesempatan kerja
- Arah kebijakan : meningkatkan cakupan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Program pembangunan meliputi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
- Arah kebijakan : pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- Program pembangunan meliputi Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Arah kebijakan : peningkatan daya saing tenaga kerja lokal
- Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Arah kebijakan : penguatan sistem ketenagakerjaan daerah
- Program pembangunan meliputi Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- Arah kebijakan : pembinaan transmigran
- Program pembangunan meliputi Program Penyelenggaraan Transmigrasi
6. Strategi : memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif serta kemudahan berinvestasi
- Arah kebijakan : peningkatan nilai tambah produk lokal dan unggulan
- Program pembangunan meliputi Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Arah kebijakan :
- Pemberdayaan koperasi dan UMKM
 - Pengembangan koperasi syariah
- Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Kualitas Koperasi
- Arah kebijakan :
- Peningkatan kualitas sarana dan prasana perdagangan barang
 - penataan kawasan kaki lima
- Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Arah kebijakan : pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)
- Program pembangunan meliputi Program Pengembangan Industry Kecil dan Menengah

Arah kebijakan : peningkatan pengelolaan pariwisata

Program pembangunan meliputi Program Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan : promosi investasi

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Arah kebijakan : peningkatan kualitas layanan investasi, perijinan dan non perijinan

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

7. Strategi : intensifikasi dan ekstensifikasi sektor agraris

Arah kebijakan :

- Penerapan panca usaha pertanian
- Peningkatan kapasitas petani
- Penataan kawasan pertanian unggulan

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkembangan

Arah kebijakan : peningkatan kualitas layanan irigasi

Program pembangunan meliputi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Arah kebijakan : peningkatan populasi ternak

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Arah kebijakan :

- Peningkatan produksi perikanan
- Penataan kawasan perikanan unggulan

Program pembangunan meliputi :

- Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Arah kebijakan : pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Program pembangunan meliputi Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Hasil Perikanan

Arah kebijakan :

- Peningkatan akses pangan, pengendalian distribusi dan diversifikasi pangan

- Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin
- Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
8. Strategi : peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan layanan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
- Arah kebijakan : peningkatan pengelolaan infrastruktur jalan
- Program pembangunan meliputi :
- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Arah kebijakan : penyediaan fasilitas dan pengamanan keselamatan jalan
- Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Pengamanan, Penertiban dan Keselamatan Jalan
- Arah kebijakan : peningkatan layanan angkutan
- Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
9. Strategi : penataan ruang dan lingkungan hidup
- Arah kebijakan : perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang
- Program pembangunan meliputi Program Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
- Arah kebijakan :
- Pengendalian dampak pencemaran lingkungan
 - Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- Program pembangunan meliputi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- Arah kebijakan : perlindungan sumber mata air
- Program pembangunan meliputi Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
10. Strategi : peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
- Arah kebijakan :
- Pengembangan kawasan perumahan
 - Peningkatan/pembangunan rumah keluarga miskin
- Program pembangunan meliputi Program Pengembangan Perumahan
- Arah kebijakan : penyediaan prasarana sarana dan utilitas (PSU) kawasan permukiman

Program pembangunan meliputi Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan

Arah kebijakan : penyediaan air bersih

Program pembangunan meliputi Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum

Arah kebijakan : penyediaan tanah untuk infrastruktur public

Program pembangunan meliputi Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Arah kebijakan : peningkatan kualitas layanan persampahan

Program pembangunan meliputi Program Pelayanan Persampahan

Arah kebijakan : peningkatan ketangguhan bencana

Program pembangunan meliputi :

- Program Kesiapsiagaan Bencana
- Program Penanganan Bencana Kebakaran

11. Strategi : pembangunan kawasan perdesaan secara komprehensif

Arah kebijakan : pengembangan ekonomi perdesaan

Program pembangunan meliputi Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Arah kebijakan : pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Arah kebijakan : peningkatan kapasitas pemerintahan desa

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

12. Strategi : peningkatan kualitas manajemen pemerintahan daerah berbasis e-government

Arah kebijakan : pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan asset daerah

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah

Arah kebijakan : peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Program pembangunan meliputi Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan : peningkatan kualitas pengawasan

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Arah kebijakan : peningkatan kualitas administrasi pemerintahan

Program pembangunan meliputi Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Arah kebijakan : penyediaan data dan informasi pembangunan daerah

Program pembangunan meliputi Program Pengembangan Data/Informasi

Arah kebijakan : peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan kedinasan kepala daerah

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Arah kebijakan : peningkatan layanan administrasi DPRD

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Arah kebijakan : peningkatan layanan kepegawaian

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Daerah

Arah kebijakan :

- Peningkatan kapasitas ASN
- Peningkatan kualitas kinerja aparatur
- Peningkatan kualitas manajemen ASN

Program pembangunan meliputi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Arah kebijakan : peningkatan kapasitas dan layanan administrasi kecamatan

Program pembangunan meliputi Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan

Arah kebijakan :

- Peningkatan kualitas layanan adminduk
- Koordinasi kepemilikan akte nikah

Program pembangunan meliputi Program Penataan Administrasi Kependudukan

Arah kebijakan : penyediaan data dan informasi yang berkualitas

Program pembangunan meliputi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Arah kebijakan : peningkatan kualitas pengelolaan arsip

Program pembangunan meliputi :

- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Arah kebijakan : pengamanan informasi daerah

Program pembangunan meliputi Program Persandian Daerah

Arah kebijakan : penguatan sistem inovasi daerah

Program pembangunan daerah meliputi Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

13. Strategi : peningkatan kualitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arah kebijakan : intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD

Program pembangunan daerah meliputi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Selain penetapan program prioritas seperti yang dijabar diatas, ada program rutin yang merupakan program pendukung/penunjang yang selalu dilaksanakan setiap tahun yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
I	Misi 1 : Meningkatkan kerukunan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai nilai agama dan kearifan local																	
1.1	T-1	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup beragama	Indeks Toleransi	Poin	NA	3,41		3,42		3,43		3,44		3,45		3,45		
1.1.1	S-1	Terpeliharanya Stabilitas Sosial	Tingkat Kriminalitas	Kasus/100.000 penduduk	99,01	94,44		92,40		88,55		85,3		81,63		81,63		
	Program Peningkatan Stabilitas Sosial Politik:																	
		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Angka kejadian konflik antar etnis	Kejadian	0	0	138.564.000	0	165.895.000	0	117.150.000	0	118.322.000	0	119.506.000	0	659.437.000	OPD pelaksana urusan Ketentr Aman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Program pendidikan politik masyarakat	angka partisipasi pemilih	%	0	0	344.242.300	69	228.647.000	70	225.535.200	0	227.791.000	70	230.698.000	70	1.256.913.500	OPD pelaksana urusan

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		t	pada pilpres, pileg dan pilkada															Ketentr aman, keterti ban umum dan perli ndungan masyar akat
	Program Penangan an Konflik Sosial	konflik sosial yang terselesa ikan	%	100	100	1.050.99 2.200	100	1.032.50 5.000	100	1.039.09 5.000	100	1.049.48 6.000	100	1.059.98 1.000	100	5.232.05 9.200		OPD pelaksa na urusan Ketentr aman, keterti ban umum dan perli ndungan masyar akat
	Program peningkata n keamanan dan kenyamanan lingkungan	penyakit masyara kat	Kasus	57	81	3.315.69 8.000	49	4.234.52 9.000	36	4.812.43 5.000	36	4.860.56 0.000	36	4.909.16 6.000	36	22.132.3 88.000		OPD pelaksa na urusan Ketentr aman, keterti ban umum dan perli ndungan masyar akat

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp		
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
		Angka pelanggaran perdata dan Perkada	Kasus	288	283		278		273		270		270		270			
1.1.2	S-2	Terpeliharanya kerukunan umat beragama	Kasus	0	0		0		0		0		0		0			
		Program Peningkatan kerukunan umat beragama:																
		Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah	Persentase rumah ibadah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	2	2	3.297.008.000	7	7.522.794.576	10	6.579.879.500	14	6.645.679.000	19	6.712.136.000	19	30.757.497.076	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
		Program pengelolaan keragaman budaya	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan	%	5	5	1.176.621.250	5	966.624.475	5	932.564.500	5	941.891.000	5	951.310.000	5	4.969.011.225	OPD pelaksana urusan Kebudayaan
			Persentase situs budaya yang dilestari	%	10	10		10		10		10		10				

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp		
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
		kan																
II	Misi 2 : Meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan gender																	
2.1	T-2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat	IPM	point	63,22	64,36		65,41		66,36		67,19		67,87		67,87		
			Angka Kemiskinan	%	15,80	15,31		14,89		14,51		14,17		13,86		13,86		
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,90	2,90		2,87		2,85		2,84		2,83		2,83		
2.1.1	S-3	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,6	5,95		6,26		6,52		6,74		6,88		6,88		
			Harapan lama sekolah	Tahun	12,83	13,13		13,42		13,69		13,93		14,15		14,15		
			PAUD terakreditasi A	%	0,31	0,31		0,92		1,11		1,53		1,53		1,53		
			SD terakreditasi A	%	3,01	3,85		4,35		5,18		6,02		6,86		6,86		
			SMP terakreditasi A	%	1,68	6,7		8,38		10,06		11,73		13,97		13,97		
		Program Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan:																
		Program Pendidikan Anak Usia	APK PAUD	%	63,27	69,08	7.437.212.080	76,14	11.412.766.250	78,09	6.027.980.000	80,04	6.148.540.000	81,99	620.026.000	81,99	31.646.524.330	OPD pelaksana

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp		
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
		Dini															urusan Pendidikan	
		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	%	112,28	112,49	119.201.624.706	111,49	124.199.609.850	109,99	120.373.269.000	107,99	121.577.002.000	106,99	122.792.773.000	106,99	608.144.278.556	OPD pelaksana urusan Pendidikan
	APK SMP/MTs		%	104,66	102,69		101,75		101,25		100		100		100			
	APM SD/MI		%	95,71	96,76		97,81		98,86		99,91		100		100			
	APM SMP/MTs		%	96,42	96,42		97,52		98,75		99,25		100		100			
		Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi	%	64,98	76,27		77,29		79,3		85,5		85,5		85,5			
		Program Pendidikan Non Formal	Persentase melek huruf usia 15-55 tahun	%	79,67	80,17	2.217.159.200	83,94	1.319.500.000	88,82	3.293.439.000	90,3	3.326.374.000	92,8	3.359.638.000	92,8	13.516.110.200	OPD pelaksana urusan Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga	% PTK PAUD bersertifikasi	%	84,20	87,00	4.722.276.100	90,91	4.557.679.000	91,56	4.313.011.000	92,21	4.356.142.000	92,86	4.399.704.000	92,86	22.348.812.100	OPD pelaksana urusan Pendidikan
			% PTK SD	%	85,25	88,00		91,99		93,85		95,71		97,57		97,57		

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
	Kependidikan	bersertifikasi															
		% PTK SMP bersertifikasi	%	78,22	83,00		87,33		90,09		92,85		95,01		95,01		
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan ke perpustakaan	Orang/Tahun	22.149	23.853	501.775.050	25.556	923.858.500	27.260	3.487.963.250	28.964	3.522.843.000	29.964	3.558.072.000	29.964	11.994.511.800	OPD pelaksana urusan Perpustakaan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi (Provinsi, nasional dan internasional)	Orang	13	15	4.227.932.850	17	8.007.351.580	18	22.267.005.950	19	22.489.677.000	20	22.714.574.000	20	79.706.541.380	OPD pelaksana urusan Kepemudaan dan olahraga
		Jumlah pemuda berprestasi	Orang	3	3		5		5		5		5		23		
		Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	3	4		4		4		5		5		5		

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
							2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
							TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
2.1.2	S-4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,01	65,28		65,52		65,73		65,91		66,06		66,06			
		Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat																	
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks Kepuasan layanan kesehatan dasar	Poin	62,51	62,52	121.729.884.506	64,81	100.089.583.329	65,17	120.737.104.652	68,21	121.934.914.000	70,71	123.154.764.000	70,71	587.646.250.487	OPD pelaksana urusan Kesehatan	
		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks Kepuasan layanan kesehatan rujukan	Poin	62,52	62,54	36.031.472.098	63,94	109.826.883.890	64,23	60.299.385.492	66,68	60.902.380.000	68,02	61.511.404.000	68,02	328.571.525.480	OPD pelaksana urusan Kesehatan	
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka morbiditas	%	28,35	24,00	10.115.261.488	18,00	10.520.728.200	16,00	15.093.435.638	14,00	15.244.370.000	12,00	15.396.814.000	12,00	66.370.609.326	OPD pelaksana urusan Kesehatan	
		Program Keluarga Berencana	Rasio peserta KB dengan Pasangan Usia Subur	%	59,25	62,5	2.505.068.850	64,27	5.879.584.200	66,17	6.441.237.700	69,4	6.505.651.000	69,7	6.570.708.000	69,7	27.902.249.750	OPD pelaksana urusan Pendalian penduduk dan keluarga	

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
						2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp		
						TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
																	berencana		
			Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif	%	40	50		55		60		62,5		68		68			
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penangan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	426.504.155	100	408.092.000	100	567.154.500	100	572.827.000	100	578.556.000	100	2.553.133.655	OPD pelaksana urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2.1.3	5		Meningkatnya perlindungan sosial dan kesempatan kerja	Angka PMKS	orang	9.319	7.083		4.847		3.112		1.901		1.092		1.092		
				tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71,81	72,93		73,35		73,80		74,23		74,65		74,65		
				Pengeluaran per	Rp (ribu)/ta	9.079	9.319		9.568		9.802		10.030		10.252		10.252		

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
		kapita disesuaikan	hun														
	Program Peningkatan Perlindungan Sosial:																
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Penanganan PMKS	%	13,1	23,99	3.883.189.200	31,57	3.516.408.950	35,80	4.658.597.000	38,91	4.705.183.000	42,56	4.752.235.000	42,56	21.515.613.150	OPD pelaksana urusan Sosial
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Lembaga sosial yang aktif	%	30,96	34,86	299.068.550	39,45	278.350.850	44,04	191.620.000	48,62	193.537.000	50,20	195.473.000	50,2	1.158.049.400	OPD pelaksana urusan Sosial
	Program Peningkatan Tenaga Kerja:																
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pencari kerja terdaftar yang terserap	%	92,58	94,79	2.047.498.592	94,92	2.563.242.550	95,04	5.473.661.500	95,17	5.528.399.000	95,31	5.583.683.000	95,31	21.196.484.642	OPD pelaksana urusan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Sengketa ketenagakerjaan	Kasus	14	18	170.000.000	20	209.911.000	14	500.679.500	14	505.687.000	14	510.744.000	14	1.897.021.500	OPD pelaksana urusan Tenaga Kerja

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
						2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
						TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
		Program pengembangan dan Pembinaan transmigrasi	Jumlah keluarga transmigrasi yang difasilitasi	KK	25	230	148.361.201	230	92.746.500	235	102.200.000	234	103.222.000	39	104.255.000	39	550.784.701	OPD pelaksana urusan Transmigrasi
II	Misi 3 : Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas																	
3.1	T-3	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,67	6,42		6,47		6,53		6,56		6,61		6,61		
			Indeks Gini	Poin	0,352	0,348		0,344		0,340		0,336		0,332		0,332		
3.1.1	S-6	Meningkatnya nilai perdagangan, Jasa Unggulan dan Investasi Daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan		3,21	4,60		4,06		4,27		4,47		4,68		4,68		
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	9,54	7,01		7,44		8,18		8,24		8,81		8,81		
		Program peningkatan perekonomian daerah:																

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
						2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
						TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM	%	0,33	0,33	3.727.136.537	0,33	425.655.500	0,33	822.420.000	0,33	830.645.000	0,33	838.952.000	0,33	6.644.809.037	OPD pelaksana urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah
		Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Koperasi berkualitas dan sangat berkualitas	buah	116	127	638.914.900	138	422.189.100	149	357.930.000	160	361.510.000	171	365.126.000	171	2.145.670.000	OPD pelaksana urusan
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Nilai omset perdagangan/nilai transaksi	Rupiah	10.250.310	10.798.900	2.956.543.149	11.005.696	4.974.040.500	11.225.708	5.679.183.000	11.450.222	5.735.975.000	11.679.227	5.793.335.000	11.679.227	25.139.076.649	OPD pelaksana urusan Perdagangan
			Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang menempati ruang sesuai peruntukannya	%	13,8	14,5		15,3		16,1		16,9		17,8		17,8		
		Program	Nilai	Rupiah	40.550.4	45.061		47.315		49.681		52.165		54.773		54.773		OPD

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp		
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
		pengembangan industri kecil dan menengah	Produksi IKM		21	.512	3.809.693.100	.638	6.042.815.000	.420	16.825.562.500	.491	16.993.819.000	.765	17.163.758.000	.765	60.835.647.600	pelaksana urusan Perindustrian
		Program pengembangan pariwisata	angka kunjungan wisatawan asing	Orang/TAhun	59.148	81.898	6.517.703.404	90.088	4.165.581.125	99.097	2.242.088.000	109.006	2.264.509.000	119.907	2.287.155.000	119.907	17.477.036.529	OPD pelaksana urusan Pariwisata
			angka kunjungan wisatawan domestik	Orang/ta hun	49.769	57.224		62.946		69.241		76.165		83.782		83.782		
			Rata-rata lama tinggal	hari	3	3,25		3,5		3,75		4		4,25		4,25		
		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi PMA	US \$ 000	1.203.061	1.239.072	1.143.679.279	1.276.091	490.802.500	1.315.022	528.485.000	1.354.067	533.770.000	1.395.031	539.108.000	1.395.031	3.235.844.779	OPD pelaksana urusan Penanaman modal
			Nilai investasi PMDN	Rp (juta)	689.044	785.096		896.000		1.021.044		1.164.044		1.327.046		1.327.046	-	
		Program Peningkatan dan Pengembangan Penyeleng	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang	Poin	75,00	76,00	315.678.000	77,00	488.730.500	78,00	338.620.000	79,00	342.007.000	80,00	345.428.000	80	1.830.463.500	OPD pelaksana urusan Penanaman

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
						2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
						TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
			garaan Pelayanan Perizinan Terpadu	Perizinan													modal	
3.1.2	5-7	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	104,36	105,51		104,76		105,28		105,48		105,69		105,69		
			Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85	85,2		85,4		85,6		85,8		86		86		
		Program peningkatan produktivitas dan daya saing sektor agraris:																
		Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan				33.204.686.053		25.009.692.830		18.501.781.000		18.686.799.000		18.873.667.000		114.276.625.883	OPD pelaksana urusan Pertanian
			- Padi	Ton/tahun	475.000	482.123		489.357		496.697		504.147		511.597		511.597		
			- Jagung	Ton/tahun	39.322	40.108		40.910		41.728		42.562		43.396		43.396		
			- Kedelai	Ton/tahun	42.387	43.234		43.382		43.421		45.879		48.337		48.337		
			Produksi Hasil															

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
		Perkebunan Unggulan															
		- Tembakau Virginia	Ton/tahun	12.577	16.364		17.451		18.538		19.625		20.712		20.712		
		- Tembakau rajangan	Kw/tahun	547	673		799		924		1.050		1.176		1.176		
		- Melon	Kw/tahun	11.444	11.673		11.907		12.145		12.388		12.631		12.631		
		- Kopi	Ton/tahun	434,10	357,21		369,36		381,91		394,90		408,32		408,32		
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Ha	49.517	49.517	21.477.195.792	49.517	14.375.663.020	49.517	23.782.210.000	49.517	24.020.033.000	49.517	24.260.234.000	49.517	107.915.335.812	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	%	82,52	85,15		87,78		90,41		93,04		95,67		96		
		Program peningkatan produksi hasil peternakan sapi	Ekor	163.962	165.674	5.696.415.259	167.385	6.283.527.300	169.097	5.764.460.000	170.809	5.822.105.000	172.521	5.880.327.000	172.521	29.446.834.559	OPD pelaksana urusan Pertanian
		Program pengembangan Perikanan	Ton/tahun	33.792,53	34.129	3.812.28	34.470	1.846.48	34.815	1.651.10	35.163	1.667.61	35.515	1.684.28	35.515	10.661.7	OPD pelaksana

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp		
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
		ngan budidaya perikanan	n Budidaya – lkan			7.300		3.500		0.000		1.000		8.000		69.800	na urusan Kelautan dan Perikanan	
			Produksi Perikanan Budidaya - Rumput Laut	Ton/tahun	38.106,47	38.486		38.871		39.259		39.652		40.049		40.049		
		Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/tahun	2.363	2.390	2.106.497.200	2.419	2.356.523.000	2.448	4.076.825.000	2.477	4.117.621.000	2.482	4.158.798.000	2.482	16.816.264.200	OPD pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan
		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	ton/tahun	4.084,03	4.165,70	927.851.650	4.249,01	692.350.050	4.334,00	623.000.000	4.420,68	629.230.000	4.509,09	635.523.000	4.509,09	3.507.954.700	OPD pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan
			Produksi garam rakyat	Ton/tahun	1.214	3.178		3.242		3.307		3.373		3.407		3.407		
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Konsumsi Protein	gram/kapita/hari	83	83	1.495.733.337	82	1.341.505.920	82	2.308.199.000	81	2.331.281.000	81	2.354.594.000	81	9.831.313.257	OPD pelaksana urusan Pangan

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
						2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
						TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
		(Pertanian /Perkebunan)																
		Konsumsi Energi	kilokalori /kapita/ hari	2.436,00	2.408,80		2.381,60		2.354,40		2.327,20		2.300,00		2.300			
I	Misi 4 : Menjaga keselarasan, keserasian dan keterpaduan pembangunan kawasan dan antar kawasan dengan dukungan infra struktur yang memadai																	
V	4.1	T-4	Meningkatnya pemerataan pembangunan dan keterpaduan kawasan dan antar kawasan	Indeks Williams on	Poin	0,42	0,42		0,41		0,40		0,40		0,39		0,39	
	4.1.1	S-8	Meningkatnya infrastruktur dalam mendukung koneksitas wilayah	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	60,62	65,24		67,37		70,87		77,64		79,11		79,11	
		Program Peningkatan Infrastruktur Daerah:																
		Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang dibangun terhadap	%	76,92	78,02	169.554.485.266	79,22	90.087.407.936	80,32	69.468.521.150	81,42	70.163.207.000	82,52	70.864.839.000	83	470.138.460.352	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp		
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
																		dan Penataan Ruang
		Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang kondisinya baik (mantap)	%	72,47	68,24	6.669.315.053	70,62	5.587.014.200	71,85	8.892.223.050	74,32	8.981.146.000	75,79	9.070.958.000	75,79	39.200.656.303	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Pengamanan, Penertiban dan Keselamatan Jalan	Angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	184	166	983.920.050	158	10.304.314.500	150	15.675.099.000	130	15.831.850.000	110	15.990.169.000	110	58.785.352.550	OPD pelaksana urusan Perhubungan
		Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rasio kendaraan per jumlah penumpang	Ratio	1 : 40	1 : 40	9.127.417.330	1 : 40	1.063.325.900	1 : 40	832.197.700	1 : 40	840.520.000	1 : 40	848.926.000	1 : 40	12.712.386.930	OPD pelaksana urusan Perhubungan
4.1.2	S-9	Terwujudnya Tata ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	45,17	48,08		52		52,51		53		53,5		53,50		

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
						2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
						TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	
			Ketaatan terhadap RTRW	%	77,32	78,47		80,32		82,54		84,36		86,71		86,71		
			Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang:															
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR	%	8,33	20,83	594.828.620	25,00	934.680.000	25,00	1.022.780.000	29,17	1.033.008.000	33,33	1.043.339.000	33,33	4.628.635.620	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	45,17	48,08	726.079.300	52	2.482.860.000	52,51	4.657.232.000	53	4.703.805.000	53,5	4.750.844.000	53,50	17.320.820.300	OPD pelaksana urusan Lingkungan Hidup
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Sumber mata air yang debit airnya terjaga	Titik	4	4	657.054.500	6	1.096.045.500	8	777.980.000	10	785.760.000	12	793.618.000	12,00	4.110.458.000	OPD pelaksana urusan Lingkungan Hidup
4.1.3	S-10	Meningkatnya kualitas kawasan perumahan	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	110	60,14		48,02		35,90		23,77		11,65		11,65		

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp		
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
		n dan permukiman																
		Spot kawasan kumuh dan rawan bencana	Spot	13	7		5		3		2		1		1			
		Program peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman																
		Program Pengembangan Perumahan	Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Unit	236	781	687.978.200	2.105	8.436.905.000	1.000	34.676.330.000	1.000	35.023.094.000	1.000	35.373.325.000	5.986	114.197.632.200	OPD pelaksana urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
		Program Pengembangan, Pengelolaan Perumahan dan Lingkungan	Persentase kawasan permukiman yang PSU permuki	%	21,4	22,70	17.780.142.634	24,63	57.969.864.452	32,38	18.900.585.000	42,18	19.089.591.000	54,10	19.280.487.000	54,10	133.020.670.086	OPD pelaksana urusan Perumahan rakyat dan

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
		n															kawasa n permu kiman
		Program Pengembangan Pengelolaan n Air Minum	Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	%	67,5	75 30.531.8 36.338	76 17.888.8 46.750	78 22.012.1 68.250	80 22.232.2 90.000	82 22.454.6 13.000	82	115.119. 754.338	82	115.119. 754.338	OPD pelaksana n urusan Pekerja an Umum dan Penata an Ruang		
		Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan fasilitasi pembuatan sertifikat tanah	%	100	100 -	100 6.435.95 8.848	100 21.588.7 75.000	100 21.804.6 63.000	100 22.022.7 10.000	100	71.852.1 06.848	100	71.852.1 06.848	OPD pelaksana n urusan Perumahan rakyat dan kawasa n permu kiman		
		Program Pelayanan Persampahan	Jumlah sampah rumah tangga dan sampah	M3/hari	17,54	19,88 5.685.95 2.850	19,91 4.611.81 2.300	20,21 3.797.89 9.160	20,51 3.835.87 9.000	20,82 3.874.23 8.000	20,82	21.805.7 81.310	20,82	21.805.7 81.310	OPD pelaksana n urusan Lingku ngan		

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
		sejenis sampah rumah tangga yang di tangani															Hidup
	Program Kesiapsiagaan Bencana	Desa tangguh bencana	Desa	3	7	2.869.522.157	11	828.490.480	15	854.393.400	19	862.938.000	23	871.568.000	23	6.286.912.037	OPD pelaksana urusan Ketertarikan umum dan perlindungan masyarakat
		Persentase korban bencana yang tertangani	%	100	100		100		100		100		100		100		
	Program Penanganan Bencana Kebakaran	Rata-rata Kecepatan dan ketepatan waktu penanganan kebakaran	Menit	15	15	1.120.284.520	15	1.142.109.520	15	1.563.701.500	15	1.579.339.000	15	1.595.133.000	15	7.000.567.540	OPD pelaksana urusan Ketertarikan umum dan perlindungan

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
						2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
						TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
																	ungan masyarakat	
4.1.4	S-11	Terwujudnya kawasan perdesaan maju dan mandiri	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	15	17		20		24		29		35		35		
		Program Pembangunan Kawasan Perdesaan:																
		Program pengembangan ekonomi pedesaan	Rata-rata unit usaha BUMDes	Unit	NA	1,00	627.164.050	1,10	415.124.000	1,90	256.560.000	2,00	259.126.000	2,30	261.718.000	2,30	1.819.692.050	OPD pelaksana urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
			Jumlah desa wisata	desa	1	5		5		2		4		4		21		
		Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa aktif	lembaga	NA	11	4.397.712.055	13	7.657.643.750	15	7.179.713.000	30	7.251.511.000	45	7.324.027.000	45	33.810.606.805	OPD pelaksana urusan Pemberdayaan masyarakat dan

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp		
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
																		desa
		Jumlah lembaga adat aktif	lembaga	2	5		10		15		30		45		45			
		Peningkatan kapasitas pemerintahan desa	Penetapan APBDes Tepat waktu	%	3,15	7,87	1.344.884.825	12,60	8.232.096.000	17,32	1.285.351.750	22,05	1.298.206.000	26,77	1.311.189.000	26,77	13.471.727.575	OPD pelaksana urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa
		Rata-rata Realisasi APBDes	%	90,87	90,78		94,51		95,02		96,68		97,90		97,90			
V	Misi 5 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas																	
5.1	T-5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai EKPPD	Poin	3,1269	3,1313		3,1372		3,1431		3,1488		3,1545		3,1545		
5.1.1	S-12	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC		CC		B		B		B		B		
			Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	poin	2	2		2		2		2		2		2		2

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp		
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
		Program peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah:																
		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Poin	4	4	5.536.930.901	4	7.446.086.000	4	5.460.736.000	4	5.515.344.000	4	5.570.498.000	4	29.529.594.901	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Keuangan
			Indeks rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	Poin	3	3		3		3		3		3		3		
			Validitas data aset daerah	%	79	81,2		83,4		85,6		87,8		90		90		
		Program perencanaan pembangunan daerah	persentase kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan APBD	%	100	100	6.293.768.272	100	8.182.307.500	100	7.811.400.000	100	6.889.514.000	100	6.958.410.000	100	36.135.399.772	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Perencanaan
		Program peningkatan	Persentase	%	82	84	2.911.97	86	3.832.41	88	3.179.57	90	3.211.37	90	3.243.48	90	16.378.8	OPD pelaksana

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
	n sistem pengawasa n internal dan pengendali an pelaksanaa n kebijakan KDH	tindakla njut hasil temuan pengawa san				4.093		3.400		3.400		0.000		4.000		14.893	na Fungsi penunj ang urusan Penga wasan
	Kapabilit as APIP	level		2	3		3		3		3		3		3		
	Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaa n Kebijakan Kepala Daerah	Persenta se rekomen dasi hasil evaluasi kebijaka n yang ditindakl anjuti	%	100	100	16.792.589.142	100	13.175.489.005	100	9.156.064.985	100	9.247.626.000	100	9.340.103.000	100	57.711.872.132	OPD pelaksa na Fungsi penunj ang urusan Pemerintahan Umum
	Program pengemban gan data/infor masi	Persenta se data informas i dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	100	100	-	100	209.240.000	100	230.760.000	100	233.068.000	100	235.399.000	100	908.467.000	OPD pelaksa na urusan Statisti k
	Program peningkata n kapasitas lembaga perwakilan rakyat	Perda yang yang ditetapkan	%	36,84	38	23.208.561.554	50	20.708.143.000	53	12.757.754.000	56	12.885.332.000	57	13.014.186.000	57	82.573.976.554	OPD pelaksa na Fungsi penunj ang

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp		
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
		daerah															urusan Pemerintahan Umum	
		Program Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Daerah	Persentase PNS yang kompeten	%	58,7	60	1.567.383.269	61	1.012.261.000	62	1.680.855.000	64	1.697.664.000	66	1.714.641.000	66	7.672.804.269	OPD pelaksanaan Fungsi penunjang urusan Kepegawaian
		Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	%	61,51	62,52	1.917.833.708	64,81	2.114.412.900	67	1.696.252.000	68,21	1.713.215.000	70,71	1.730.348.000	70,71	9.172.061.608	OPD pelaksanaan Fungsi penunjang urusan Kepegawaian
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja pemerintah kecamatan yang dikoordinasikan	%	100	100	10.067.730.796	100	11.460.000.000	100	16.500.000.000	100	22.800.000.000	100	23.028.000.000	100	83.855.730.796	OPD pelaksanaan Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
		Program Administrasi Kependudukan	Tingkat kepemilikan KTP elektronik	%	70,96	76,93	2.049.263.150	81,93	5.132.223.300	86,93	3.551.057.500	91,93	3.586.569.000	96,93	3.622.435.000	96,93	17.941.547.950	OPD pelaksanaan urusan Admini

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
		Tingkat kepemilikan akta kelahiran	%	63,7	73,41		78,41		83,41		88,41		93,41		93,41		strasi kependudukan dan pencatatan sipil
		tingkat kepemilikan kartu keluarga	%	71,21	78,1		85,23		89,23		93,23		97,23		97,23		
		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	%	10	23	1.649.769.974	30	1.611.089.000	34	1.345.468.500	36	1.058.924.000	36,36	1.069.514.000	36,36	6.734.765.474	OPD pelaksana urusan Komunikasi dan informatika
		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Poin	3	3	170.199.808	3	142.137.500	3	167.612.500	3	169.289.000	3	170.982.000	3	820.220.808	OPD pelaksana urusan Kearsipan
		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	%	100	100	80.000.000	100	51.533.000	100	74.339.100	100	75.083.000	100	75.834.000	100	356.789.100	

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA	
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp		
					TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp				
		Program persandian daerah	Persentase pengamanan informasi daerah	%	100	100	-	100	-	100	-	100	300.000.000	100	303.000.000	100	603.000.000	OPD pelaksana urusan Persandian
		Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Hasil penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan	%	100	100	156.457.950	100	218.350.000	100	187.570.000	100	1.189.446.000	100	1.201.341.000	100	2.953.164.950	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Penelitian dan pengembangan
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100,00	100,00	25.879.796.464,00	100	30.310.840.087,54	100	28.366.318.216,00	100	28.649.982.000,00	100	28.936.482.000	100	142.143.418.768	Semua OPD
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100,00	100,00	27.993.412.063,00	100	15.069.979.622,00	100	7.585.034.100,00	100	7.660.885.000,00	100	7.737.494.000	100	66.046.804.785	Semua OPD
		Program peningkatan dokumen	Persentase dokumen	%	100,00	100,00	2.202.133.096,00	100	2.207.617.700,00	100	2.183.655.504,80	100	2.205.493.000,00	100	2.227.548.000	100	11.026.447.301	Semua OPD

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
						2017		2018		2019		2020		2021		TARGE T	Rp	
						TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp	TARGE T	Rp			
		pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	n laporan kinerja dilaksanakan akan tepat waktu															
		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tercukupinya kebutuhan kedinasan KDH	%	100,00	100,00 2.757.10 1.900,00	100 3.034.28 4.496,00	100 1.976.13 1.703,00	100 1.995.89 4.000,00	100 2.015.85 3.000,00	100 11.779.2 65.099						Semua OPD	
		Program penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan gedung pemerintahan sesuai standar	%	0 -	0 57.576.0 93.270	0 188.135. 399.800	42,86 74.046.5 80.000	71,43 80.000.0 00.000,0 0	100 80.800.0 00.000,0 0	100 480.558. 073.070						OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5.1.2	S-13	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	8,6	14,95	9,75	9,28	9,32	9,35	9,35							

NO	MISI/ TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSANA
					2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah:																
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	165.997.900.000	286.691.380.000	2.112.232.785	194.649.640.000	2.252.750.343	199.768.860.000	1.836.399.000	204.496.050.000	1.854.763.000	209.339.730.000	1.873.311.000	209.339.730.000	9.929.456.128	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan keuangan

Tabel 6.3
Pemetaan Perubahan Program Pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021

PROGRAM SEBELUM PERUBAHAN		PROGRAM SETELAH PERUBAHAN	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3	Program Pendidikan Luar Biasa		
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
5	Program Pendidikan Non Formal		
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3	Program Pendidikan Non Formal
7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD	4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		
10	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya		
11	Program Kebijakan dari manajemen pembangunan kesehatan		
12	Program Jaminan Kesehatan Nasional		
13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar
14	Program Pengawasan Obat dan Makanan		
15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
16	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		
17	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
18	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular		
19	Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan		
20	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		
21	Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan		
22	Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD		
23	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		
24	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		
25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		
26	Program pembangunan jalan dan jembatan	7	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan
27	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan		
28	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
		9	Program pembangunan jalan dan jembatan
		10	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

PROGRAM SEBELUM PERUBAHAN		PROGRAM SETELAH PERUBAHAN	
29	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan		
30	Program Perencanaan Tata Ruang	11	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
31	Program Pemanfaatan Ruang		
32	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
33	Program Pengembangan Keciptakarya	12	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum
34	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum		
35	Program Pengembangan Perumahan	13	Program Pengembangan Perumahan
36	Program Lingkungan Sehat Perumahan		
37	Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan	14	Program Pengembangan, Pengelolaan Permukiman dan Lingkungan
38	Program pembangunan sistem pendaftaran tanah	15	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
39	Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		
40	Program pengembangan sistem informasi pertanahan		
41	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	16	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
42	Program pendidikan politik masyarakat	17	Program pendidikan politik masyarakat
43	Program Penanganan Konflik Sosial	18	Program Penanganan Konflik Sosial
44	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	19	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
45	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		
46	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kebencanaan	20	Program Kesiapsiagaan Bencana
47	Program Pengadaan Sarana Prasarana Kebencanaan		
48	Program Pengembangan Sistem Kebencanaan		
49	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kebencanaan		
50	Program Penanganan Bencana	21	Program Penanganan Bencana Kebakaran
51	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	22	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
52	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	23	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
53	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	24	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
54	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	25	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
55	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		
56	Program pengembangan wilayah transmigrasi	26	Program pengembangan dan pembinaan transmigrasi
57	Program Keluarga Berencana	27	Program Keluarga Berencana
58	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		
59	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR		

PROGRAM SEBELUM PERUBAHAN		PROGRAM SETELAH PERUBAHAN	
60	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga		
61	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	28	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
62	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		
63	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		
64	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	29	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
65	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	30	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
66	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
67	Program peningkatan pengendalian polusi		
68	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	31	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
69	Program Pengelolaan Sampah	32	Program Pelayanan Persampahan
70	Program Penataan Administrasi Kependudukan	33	Program Penataan Administrasi Kependudukan
71	Program pengembangan Ekonomi pedesaan	34	Program pengembangan ekonomi pedesaan
72	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa		
73	Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	35	Program Peningkatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
74	Program Pemberdayaan lembaga adat perdesaan		
75	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	36	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
76	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	37	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan
77	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan		
78	Program peningkatan pelayanan angkutan	38	Program peningkatan pelayanan angkutan
79	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas		
80	Program Pengembangan Data Informasi	39	Program pengembangan data/informasi
81	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	40	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
82	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	41	Program persandian daerah
83	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	42	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
84	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
85	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	43	Program Peningkatan Kualitas Koperasi

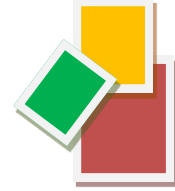
PROGRAM SEBELUM PERUBAHAN		PROGRAM SETELAH PERUBAHAN	
86	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	44	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
87	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	45	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
88	Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda dan Olahraga	46	Program Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Pemuda dan Olahraga
89	Program peningkatan peran serta kepemudaan		
90	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		
91	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	47	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
92	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	48	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
93	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	49	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
94	Program pengembangan budidaya perikanan	50	Program pengembangan budidaya perikanan
95	Program pengembangan perikanan tangkap	51	Program pengembangan perikanan tangkap
96	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	52	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
97	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	53	Program pengelolaan keragaman budaya
98	Program pengembangan pemasaran pariwisata	54	Program pengembangan pariwisata
99	Program pengembangan destinasi pariwisata		
100	Program pengembangan Kemitraan		
101	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	55	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
102	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		
103	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	56	Program peningkatan produksi hasil peternakan
104	Program peningkatan produksi hasil peternakan		
105	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		
106	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	57	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
107	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		
108	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan		
109	Program pengembangan industri kecil dan menengah	58	Program pengembangan industri kecil dan menengah
110	Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah	59	Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah
111	Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	60	Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

PROGRAM SEBELUM PERUBAHAN		PROGRAM SETELAH PERUBAHAN	
112	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		
113	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi		
114	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		
115	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
116	Program Penataan Daerah Otonomi Baru		
117	Program kerjasama informasi dengan media massa		
118	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		
119	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
120	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	61	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
121	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		
122	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		
123	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur		
124	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	62	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
125	Program kerjasama informasi dengan media massa		
126	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan	63	Program Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan Kecamatan
127	Program pengembangan data/informasi	64	Program perencanaan pembangunan daerah
128	Program Kerjasama Pembangunan		
129	Program perencanaan pembangunan daerah		
130	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	65	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah
131	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	66	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
132	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	67	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
133	Program Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Daerah	68	Program Peningkatan Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Daerah
134	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	69	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur
135	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	70	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
136	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	71	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
137	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	72	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
138	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	73	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
139	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		

PROGRAM SEBELUM PERUBAHAN		PROGRAM SETELAH PERUBAHAN	
140	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	74	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



Kabupaten Lombok Tengah Daerah yang beriman, sejahtera dan bermutu menjadi kekuatan utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian daerah serta memperkuat daya saing antar daerah secara regional maupun secara nasional. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah menjadi sangat penting dan fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan tetap mengutamakan nilai-nilai budaya dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi di Kabupaten Lombok Tengah, ditetapkan program-program pembangunan yang merupakan program prioritas didasarkan pada urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pada Bab ini memuat program prioritas beserta pagu indikatif program prioritas pada Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif untuk perodesasi RPJMD ini.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2016-2021, sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Indikasi rencana program dan kegiatan telah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang mendasari dilakukannya perubahan RPJMD ini serta telah menyesuaikan dengan OPD sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Rumusan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah, APBD Provinsi, APBN maupun sumber-sumber lain.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel 7.1 dan Indikasi program prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2016-2021 disajikan sebagaimana Tabel 7.2. Program, pagu indikatif dan target kinerja untuk tahun 2017 adalah berdasarkan realisasi. Sedangkan untuk tahun 2018 merupakan indikasi program, pagu indikatif dan target kinerja pada P-APBD Tahun Anggaran 2018. Indikasi program, pagu indikatif dan target kinerja tahun 2019 s/d 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021
Kabupaten Lombok Tengah

Kode	Belanja	Proyeksi Kerangka Belanja				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Belanja	1.930.401.187.345,90	2.176.365.857.905,96	2.216.978.950.000,00	2.239.650.933.000,00	2.285.197.784.000,00
5 1	Belanja Tidak Langsung	1.073.301.948.073,56	1.168.011.922.570,96	1.235.361.165.900,00	1.244.894.974.625,00	1.269.553.186.525,00
5 1 1	Belanja Pegawai	800.837.649.141,00	838.203.926.002,61	863.079.426.925,00	883.033.906.050,00	903.487.678.900,00
5 1 2	Belanja Bunga	338.219.116,00	0	5.597.130.000,00	4.767.063.000,00	3.452.011.000,00
5 1 4	Belanja Hibah	33.804.600.000,00	40.861.200.000,00	42.487.500.000,00	33.011.200.000,00	33.011.200.000,00
5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	826.686.989,00	13.639.640.846,00	6.561.191.000,00	1.048.691.000,00	1.048.691.000,00
5 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa	6.391.177.226,66	9.037.275.622,35	9.676.847.000,00	9.943.565.000,00	10.217.813.000,00
5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan	230.649.303.600,90	264.769.880.100,00	306.459.070.975,00	311.590.549.575,00	316.835.792.625,00
5 1 8	Belanja Tidak Terduga	454.312.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
5 2	Belanja Langsung	857.099.239.272,34	1.008.353.935.335,00	981.617.784.100,00	994.755.958.375,00	1.015.644.597.475,00

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2016-2021
Kabupaten Lombok Tengah

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
I	URUSAN WAJIB				706.171.4 44.181		853.874.8 47.770		801.888.0 00.233		734.994.3 11.000		735.738.8 24.700		3.832.667. 427.884	
A	URUSAN PELAYANA N DASAR				637.285.9 42.854		774.412.3 48.222		688.708.2 69.183		620.110.0 18.000		620.321.7 70.000		3.340.838. 348.259	
1	BIDANG URUSAN PENDIDIKA N				137.734.2 67.863		147.571.5 12.640		135.580.8 05.000		136.996.8 96.000		132.776.8 68.000		690.660.3 49.503	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	%	69,08	7.437.212 .080	76,14	11.412.76 6.250	78,09	6.027.980 .000	80,04	6.148.540. 000	81,99	6.210.026. 000	81,99	31.646.52 4.330	OPD pelaksana urusan Pendidika n
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	%	112,49	119.201.6 24.706	111,49	124.199.6 09.850	109,99	120.373.2 69.000	107,99	121.577.0 02.000	106,99	122.792.7 73.000	106,99	608.144.2 78.556	OPD pelaksana urusan Pendidika n
		APK SMP/MTs	%	102,69		101,75		101,25		100		100		100		
		APM SD/MI	%	96,76		97,81		98,86		99,91		100		100		

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		APM SMP/MTs	%	96,42		97,52		98,75		99,25		100		100		
		Persentase Anak Berkebutu han Khusus yang mendapatk an Layanan Pendidikan Inklusi	%	76,27		77,29		79,3		85,5		85,5		85,5		
	Program Pendidikan Non Formal	Persentase melek huruf usia 15-55 tahun	%	80,17	2.217.159 .200	83,94	1.319.500 .000	88,82	3.293.439 .000	90,3	3.326.374. 000	92,8	3.359.638. 000	92,8	13.516.11 0.200	OPD pelaksana urusan Pendidika n
	Program Peningkata n Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidik an	% PTK PAUD bersertifika si	%	87,00	4.722.276 .100	90,91	4.557.679 .000	91,56	4.313.011 .000	92,21	4.356.142. 000	92,86	4.399.704. 000	92,86	22.348.81 2.100	OPD pelaksana urusan Pendidika n
% PTK SD bersertifika si		%	88,00		91,99		93,85		95,71		97,57		97,57			
% PTK SMP bersertifika si		%	83,00		87,33		90,09		92,85		95,01		95,01			

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100,00	1.770.544.127,00	100	2.061.376.667,54	100	1.524.634.000,00	100	1.539.881.000,00	100	1.555.280.000,00	100	8.451.715.795	OPD pelaksana urusan Pendidikan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100,00	2.043.871.350,00	100	3.974.405.872,00	100	-	100	-	100	-	100	6.018.277.222	OPD pelaksana urusan Pendidikan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	341.580.300,00	100	46.175.000,00	100	48.472.000,00	100	48.957.000,00	100	49.447.000,00	100	534.631.300	OPD pelaksana urusan Pendidikan
2	BIDANG URUSAN KESEHATAN				172.104.170.324		225.531.193.574		200.442.232.183		202.446.657.000		204.471.127.000		1.004.995.380.081	
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks Kepuasan layanan kesehatan dasar	Poin	62,52	121.729.884.506	64,81	100.089.583.329	65,17	120.737.104.652	68,21	121.934.914.000	70,71	123.154.764.000	70,71	587.646.250.487	OPD pelaksana urusan Kesehatan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka morbiditas	%	24,00	10.115.26 1.488	18,00	10.520.72 8.200	16,00	15.093.43 5.638	14,00	15.244.37 0.000	12,00	15.396.81 4.000	12,00	66.370.60 9.326	OPD pelaksana urusan Kesehatan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100,00	2.184.253 .443,00	100	2.528.290 .655,00	100	2.310.805 .666,00	100	2.333.914. 000,00	100	2.357.254. 000,00	100	11.714.51 7.764	OPD pelaksana urusan Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100,00	1.261.220 .789,00	100	1.275.218 .500,00	100	40.037.38 0	100	50.000.00 0	100	50.000.00 0	100	2.676.476. 669	OPD pelaksana urusan Kesehatan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	120.390.3 00,00	100	146.155.0 00,00	100	147.706.3 54,80	100	149.184.0 00,00	100	150.676.0 00,00	100	714.111.6 55	OPD pelaksana urusan Kesehatan
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan	Indeks Kepuasan layanan kesehatan	Poin	62,54	36.031.47 2.098	63,94	109.826.8 83.890	64,23	60.299.38 5.492	66,68	60.902.38 0.000	68,02	61.511.40 4.000	68,02	328.571.5 25.480	OPD pelaksana urusan Kesehatan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Kesehatan Rujukan	rujukan														n
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100,00	200.647.700,00	100	247.579.000,00	100	1.246.685.000,00	100	1.259.152.000,00	100	1.271.744.000,00	100	4.225.807.700	OPD pelaksana urusan Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100,00	461.040.000,00	100	844.675.000,00	100	500.000.000,00	100	505.000.000,00	100	510.050.000,00	100	2.820.765.000	OPD pelaksana urusan Kesehatan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	-	100	52.080.000,00	100	67.072.000,00	100	67.743.000,00	100	68.421.000,00	100	255.316.000	OPD pelaksana urusan Kesehatan
3	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				287.866.696.570		318.664.749.856		281.808.086.000		209.080.535.000		211.171.345.000		1.308.591.412.426	

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Cakupan Layanan jaringan irigasi	Ha	49.517	21.477.19 5.786	49.517	14.375.66 3.020	49.517	23.782.21 0.000	49.517	24.020.03 3.000	49.517	24.260.23 4.000	49.517	107.915.3 35.806	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	%	85,15		87,78		90,41		93,04		95,67		96			
	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang dibangun terhadap rencana induk pengembangan jalan	%	78,02	169.554.4 85.266	79,22	90.087.40 7.936	80,32	69.468.52 1.150	81,42	70.163.20 7.000	82,52	70.864.83 9.000	83	470.138.4 60.352	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang kondisinya baik (mantap)	%	68,24	6.669.315 .053	70,62	5.587.014 .200	71,85	8.892.223 .050	74,32	8.981.146. 000	75,79	9.070.958. 000	75,79	39.200.65 6.303	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
																Ruang
	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR	%	20,83	594.828.620	25,00	934.688.000	25,00	1.022.780.000	29,17	1.033.008.000	33,33	1.043.339.000	33,33	4.628.635.620	OPD pelaksana urusan Lingkungan Hidup
	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	%	75	30.531.836.338	76	17.888.846.750	78	22.012.168.250	80	22.232.290.000	82	22.454.613.000	82	115.119.754.338	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan gedung pemerintahan sesuai standar	%	0	57.576.093.270	0	188.135.399.800	42,86	74.046.580.000	71,43	80.000.000.000,00	100	80.800.000.000,00	100	480.558.073.070	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	960.279.651,00	100,00	1.048.384.150,00	100	1.382.819.550,00	100	1.396.648.000,00	100	1.410.615.000,00	100,00	6.198.746.351	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
																Ruang
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	254.357.300,00	100,00	309.888.000,00	100	978.474.000,00	100	988.259.000,00	100	998.142.000,00	100,00	3.529.120.300	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100	248.305.280,00	100,00	297.466.000,00	100	263.310.000,00	100	265.944.000,00	100	268.604.000,00	100,00	1.343.629.280	OPD pelaksana urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKI MAN				21.556.384.047		67.907.627.152		54.932.640.000		55.481.969.000		55.636.790.000		255.515.410.199	
	Program Pengembangan	Rumah Tidak Layak Huni yang	Unit	781	687.978.200	2.105	8.436.905.000	1.000	34.676.330.000	1.000	35.023.094.000	1.000	35.373.325.000	5.986	114.197.632.200	OPD pelaksana urusan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Perumahan	tertangani														Perumah an rakyat dan kawasan permuki man
	Program Pengemban gan, Pengelolan an Peremukima n dan Lingkungan	Persentase kawasan permukima n yang PSU permukima nnya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, pju)	%	22,70	17.780.14 2.634	24,63	57.969.86 4.452	32,38	18.900.58 5.000	42,18	19.089.59 1.000	54,10	19.280.48 7.000	54,10	133.020.6 70.086	OPD pelaksana urusan Perumah an rakyat dan kawasan permuki man
	Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Persentase layanan administra si perkantora n	%	100	420.394.2 80,00	100,00	542.370.0 00,00	100	473.655.0 00,00	100	478.392.0 00,00	100	483.176.0 00,00	100,00	2.397.987. 280	OPD pelaksana urusan Perumah an rakyat dan kawasan permuki man
	Program Peningkata n Sarana dan	Persentase sarana prasarana kondisi	%	100	2.619.768 .100,00	100,00	894.067.7 00,00	100	792.360.0 00,00	100	800.284.0 00,00	100	808.287.0 00,00	100,00	5.914.766. 800	OPD pelaksana urusan Perumah

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Prasarana Aparatur	baik														an rakyat dan kawasan permuki man
	Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanak an tepat waktu	%	100	48.100.83 3,00	100,00	64.420.00 0,00	100	89.710.00 0,00	100	90.608.00 0,00	100	91.515.00 0,00	100,00	384.353.8 33	OPD pelaksana urusan Perumah an rakyat dan kawasan permuki man
5	BIDANG URUSAN KETENTRA MAN, KETERTIBA N UMUM DAN PERLINDU NGAN MASYARA KAT				12.757.93 1.175		10.058.59 0.000		10.249.41 9.000		10.351.92 0.000		10.456.07 6.000		53.873.93 6.175	
	Program kemitraan pengemba ngan wawas an	Angka kejadian konflik antar etnis	Keja dian	0	138.564.0 00	0	165.895.0 00	0	117.150.0 00	0	118.322.0 00	0	119.506.0 00	0	659.437.0 00	OPD pelaksana urusan Ketentra man,

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	kebangsaa n															ketertiba n umum dan perlindun gan masyarak at
	Program pendidikan politik masyarakat	angka partisipasi pemilih pada pilpres, pileg dan pilkada	%	0	344.242.3 00	69	228.674.0 00	70	225.535.2 00	0	227.791.0 00	70	230.069.0 00	70	1.256.311. 500	OPD pelaksana urusan Ketentra man, ketertiba n umum dan perlindun gan masyarak at
	Program Penangana n Konflik Sosial	konflik sosial yang terselesaik an	%	100	1.050.992 .200	100	1.032.505 .000	100	1.039.095 .000	100	1.049.486. 000	100	1.059.981. 000	100	5.232.059. 200	OPD pelaksana urusan Ketentra man, ketertiba n umum dan perlindun gan masyarak at

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100,00	269.965.754,00	100,00	266.993.500,00	100,00	312.727.800,00	100,00	315.856.000,00	100,00	319.015.000,00	100,00	1.484.558.054	OPD pelaksana urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100,00	695.071.116,00	100,00	108.263.500,00	100,00	41.300.000,00	100,00	41.713.000,00	100,00	42.131.000,00	100,00	928.478.616	OPD pelaksana urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Program peningkatan pengembangan sistem	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat	%	100,00	-	100,00	34.570.000,00	100,00	24.170.000,00	100,00	24.412.000,00	100,00	24.657.000,00	100,00	107.809.000	OPD pelaksana urusan Ketentraman, ketertiba

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	pelaporan capaian kinerja dan keuangan	waktu														n umum dan perlindun gan masyarak at
	Program peningkata n keamanan dan kenyamana n lingkungan	penyakit masyarakat	Kasu s	81	3.315.698 .000	49	4.234.529 .000	36	4.812.435 .000	36	4.860.560. 000	36	4.909.166. 000	36	22.132.38 8.000	OPD pelaksana urusan Ketentra man, ketertiba n umum dan perlindun gan masyarak at
		Angka pelanggara n perda dan Perkada	Kasu s	283		278		273		270		270		270		
	Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Persentase layanan administra si perkantora n	%	100,00	474.418.6 48,00	100	257.940.0 00,00	100	203.190.0 00,00	100	205.222.0 00,00	100	207.275.0 00,00	100	1.348.045. 648	OPD pelaksana urusan Ketentra man, ketertiba n umum dan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
																perlindun gan masyarak at
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100,00	1.387.540 .900,00	100,00	580.756.0 00,00	100,00	209.042.0 00,00	100,00	211.133.0 00,00	100,00	213.245.0 00,00	100,00	2.601.716. 900	OPD pelaksana urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	74.150.00 0,00	100,00	43.405.00 0,00	100,00	36.005.00 0,00	100,00	36.366.00 0,00	100,00	36.730.00 0,00	100,00	226.656.0 00	OPD pelaksana urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
	Program Kesiapsiagaan Bencana	Desa tangguh bencana	Desa	7	2.869.522 .157	11	828.490.4 80	15	854.393.4 00	19	862.938.0 00	23	871.568.0 00	23	6.286.912. 037	OPD pelaksana urusan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA	
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
																	Ketentra man, ketertiba n umum dan perlindun gan masyarak at
		Persentase korban bencana yang tertangani	%	100		100		100		100		100		100			
	Program Penangana n Bencana Kebakaran	Rata-rata Kecepatan dan ketepatan waktu penangana n kebakaran	Menit	15	1.120.284 .520	15	1.142.109 .520	15	1.563.701 .500	15	1.579.339. 000	15	1.595.133. 000	15	7.000.567. 540		OPD pelaksana urusan Ketentra man, ketertiba n umum dan perlindun gan masyarak at
	Program Pelayanan Administra si Perkantora	Persentase layanan administra si perkantora	%	100	456.211.5 80,00	100	569.762.0 00,00	100	583.464.1 00,00	100	589.299.0 00,00	100	595.192.0 00,00	100	2.793.928. 680		OPD pelaksana urusan Ketentra man,

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	n	n														ketertiba n umum dan perlindun gan masyarak at
	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	541.775.0 00,00	100	541.948.0 00,00	100	213.050.0 00,00	100	215.181.0 00,00	100	217.333.0 00,00	100,00	1.729.287. 000	OPD pelaksana urusan Ketentra man, ketertiba n umum dan perlindun gan masyarak at
	Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanak an tepat waktu	%	100	19.495.00 0,00	100	22.776.00 0,00	100	14.160.00 0,00	100	14.302.00 0,00	100	14.446.00 0,00	100,00	85.179.00 0	OPD pelaksana urusan Ketentra man, ketertiba n umum dan perlindun gan masyarak at

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
6	BIDANG URUSAN SOSIAL				5.266.492 .875		4.678.675 .000		5.695.087 .000		5.752.041. 000		5.809.564. 000		27.201.85 9.875	
	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Penanganan PMKS	%	23,99	3.883.189.200	31,57	3.516.408.950	35,80	4.658.597.000	38,91	4.705.183.000	42,56	4.752.235.000	42,56	21.515.613.150	OPD pelaksana urusan Sosial
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Lembaga sosial yang aktif	%	34,86	299.068.550	39,45	278.350.850	44,04	191.620.000	48,62	193.537.000	50,20	195.473.000	50,20	1.158.049.400	OPD pelaksana urusan Sosial
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	380.936.975,00	100	546.355.200,00	100	699.932.750,00	100	706.933.000,00	100	714.003.000,00	100	3.048.160.925	OPD pelaksana urusan Sosial
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	583.812.400,00	100	291.625.000,00	100,00	87.151.000,00	100,00	88.023.000,00	100	88.904.000,00	100,00	1.139.515.400	OPD pelaksana urusan Sosial

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100	119.485.750,00	100	45.935.000,00	100,00	57.786.250,00	100,00	58.365.000,00	100	58.949.000,00	100,00	340.521.000	OPD pelaksana urusan Sosial
B	URUSAN NON PELAYANAN DASAR				68.885.501.327		79.462.499.548		113.179.731.050		114.884.293.000		115.417.054.700		491.829.079.625	
1	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA				3.764.233.653		3.677.253.500		7.577.875.000		7.653.657.000		7.730.196.000		30.403.215.153	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pencari kerja terdaftar yang terserap	%	94,79	2.047.498.592	94,92	2.563.242.550	95,04	5.473.661.500	95,17	5.528.399.000	95,31	5.583.683.000	95,31	21.196.484.642	OPD pelaksana urusan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Sengketa ketenagakerjaan	Kasus	18	170.000.000	20	209.911.000	14	500.679.500	14	505.687.000	14	510.744.000	14	1.897.021.500	OPD pelaksana urusan Tenaga Kerja

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	rjaan															
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100,00	648.605.353,00	100	828.984.950,00	100	1.041.397.500,00	100	1.051.812.000,00	100	1.062.331.000,00	100	4.633.130.803	OPD pelaksana urusan Tenaga Kerja
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100,00	823.207.258,00	100	38.080.000,00	100,00	482.279.000,00	100	487.102.000,00	100	491.974.000,00	100,00	2.322.642.258	OPD pelaksana urusan Tenaga Kerja
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100,00	74.922.450,00	100	37.035.000,00	100,00	79.857.500,00	100	80.657.000,00	100	81.464.000,00	100,00	353.935.950	OPD pelaksana urusan Tenaga Kerja
2	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN				426.504.155,00		408.092.000,00				572.827.000,00		578.556.000,00		1.985.979.155	

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	ANAK															
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	426.504.155	100	408.092.000	100	567.154.500	100	572.827.000	100	578.556.000	100	2.553.133.655	OPD pelaksana urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3	BIDANG URUSAN PANGAN				2.471.734.772		1.751.073.000		2.653.045.000		2.679.577.000		2.706.375.000		12.261.804.772	
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Konsumsi Protein	gram/kapita/hari	83	1.495.733.337	82	1.341.505.920	82	2.308.199.000	81	2.331.281.000	81	2.354.594.000	81	9.831.313.257	OPD pelaksana urusan Pangan
		Konsumsi Energi	kilokalori/kapita/hari	2.408,80		2.381,60		2.354,40		2.327,20		2.300,00		2.300		
	Program Pelayanan Administrasi	Persentase layanan administrasi	%	100	315.795.585,00	100	240.911.080,00	100	194.184.000,00	100	196.126.000,00	100	198.088.000,00	100	1.145.104.665	OPD pelaksana urusan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	si Perkantora n	si perkantora n														Pangan
	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	610.224.6 00,00	100	119.631.0 00,00	100	101.612.0 00,00	100	102.629.0 00,00	100	103.656.0 00,00	100,00	1.037.752. 600	OPD pelaksana urusan Pangan
	Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksana kan tepat waktu	%	100	49.981.25 0,00	100	49.025.00 0,00	100	49.050.00 0,00	100	49.541.00 0,00	100	50.037.00 0,00	100,00	247.634.2 50	OPD pelaksana urusan Pangan
4	BIDANG URUSAN PERTANAH AN				-		6.435.958 .848,00		21.588.77 5.000		21.804.66 3.000		22.022.71 0.000		71.852.10 6.848	
	Program penataan, penguasaa n, pemilikan, penggunaa n dan pemanfaat	Cakupan fasilitasi pembuatan sertifikat tanah	%	100	-	100	6.435.958 .848	100	21.588.77 5.000	100	21.804.66 3.000	100	22.022.71 0.000	100	71.852.10 6.848	OPD pelaksana urusan Perumah an rakyat dan kawasan permuki

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	an tanah															man
5	BIDANG URUSAN LINGKUNG AN HIDUP				8.149.265 .589		9.045.006 .000		9.929.386 .000		10.028.68 3.000		10.128.97 3.000		47.281.31 3.589	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	48,08	726.079.300	52	2.482.860.000	52,51	4.657.232.000	53	4.703.805.000	54	4.750.844.000	54	17.320.820.300	OPD pelaksana urusan Lingkungan Hidup
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Sumber mata air yang debit airnya terjaga	Titik	4	657.054.500	6	1.096.045.500	8	777.980.000	10	785.760.000	12	793.618.000	12,00	4.110.458.000	OPD pelaksana urusan Lingkungan Hidup
	Program Pelayanan Persampahan	Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani	M3/hari	19,88	5.685.952.850	19,91	4.611.812.300	20,21	3.797.899.160	20,51	3.835.879.000	20,82	3.874.238.000	20,82	21.805.781.310	OPD pelaksana urusan Lingkungan Hidup
	Program Pelayanan Administra	Persentase layanan administra	%	100	543.453.939,00	100	320.376.200,00	100	298.982.840,00	100	301.973.000,00	100	304.993.000,00	100	1.769.778.979	OPD pelaksana urusan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	si Perkantora n	si perkantora n														Lingkung an Hidup
	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	503.075.0 00,00	100	485.867.0 00,00	100	353.417.0 00,00	100	356.952.0 00,00	100	360.522.0 00,00	100,00	2.059.833. 000	OPD pelaksana urusan Lingkung an Hidup
	Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksana kan tepat waktu	%	100	33.650.00 0,00	100	48.045.00 0,00	100	43.875.00 0,00	100	44.314.00 0,00	100	44.758.00 0,00	100,00	214.642.0 00	OPD pelaksana urusan Lingkung an Hidup
6	BIDANG URUSAN ADMINIST RASI KEPENDUD UKAN DAN PENCATAT AN SIPIL				4.644.021 .739,00		6.229.602 .700,00		4.267.571 .000,00		4.310.249. 000,00		4.353.353. 000,00		23.804.79 7.439	
	Program Penataan Administra	Tingkat kepemilika n KTP	%	76,93	2.049.263 .150	81,93	5.132.223 .300	86,93	3.551.057 .500	91,93	3.586.569. 000	96,93	3.622.435. 000	96,93	17.941.54 7.950	OPD pelaksana urusan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	si Kependudu kan	elektronik														Administ rasi kependud ukan dan pencatata n sipil
		Tingkat kepemilika n akta kelahiran	%	73,41		78,41		83,41		88,41		93,41		93,41		
		Tingkat kepemilika n kartu keluarga	%	78,10		85,23		89,23		93,23		97,23		97,23		
	Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Persentase layanan administra si perkantora n	%	100	638.132.0 89,00	100	368.320.2 00,00	100	284.046.0 00,00	100	286.887.0 00,00	100	289.756.0 00,00	100	1.867.141. 289	OPD pelaksana urusan Administra si kependud ukan dan pencatata n sipil
	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	1.925.410 .500,00	100	669.129.2 00,00	100	379.529.5 00,00	100	383.325.0 00,00	100	387.159.0 00,00	100,00	3.744.553. 200	OPD pelaksana urusan Administra si kependud ukan dan pencatata n sipil
	Program peningkata n	Persentase dokumen laporan	%	100	31.216.00 0,00	100	59.930.00 0,00	100	52.938.00 0,00	100	53.468.00 0,00	100	54.003.00 0,00	100,00	251.555.0 00	OPD pelaksana urusan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	kinerja dilaksana kan tepat waktu														Administ rasi kependud ukan dan pencatata n sipil
7	BIDANG URUSAN PEMBERDA YAAAN MASYARA KAT DAN DESA				8.461.376 .399		16.968.40 6.000		9.483.671 .000		9.578.511. 000		9.674.300. 000		54.166.26 4.399	
	Program pengemba ngan ekonomi pedesaan	Rata-rata unit usaha BUMDes	Unit	1,00	627.164.0 50	1,10	415.124.0 00	1,90	256.560.0 00	2,00	259.126.0 00	2,30	261.718.0 00	2,30	1.819.692. 050	OPD pelaksana urusan Pemberd ayaan masyarak at dan desa
		Jumlah desa wisata	desa	5		5		2		4		4		21		
	Program Peningkata n	Jumlah lembaga kemasyara	lem baga	11	4.397.712 .055	13	7.657.643 .750	15	7.179.713 .000	30	7.251.511. 000	45	7.324.027. 000	45	33.810.60 6.805	OPD pelaksana urusan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA	
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
	Pemberday aan lembaga kemasyara katan	katan desa aktif															Pemberd ayaan masyarak at dan desa
		Jumlah lembaga adat aktif	lem baga	5		10		15		30		45		45			
	Program Peningkata n kapasitas pemerintah an desa	Penetapan APBDes Tepat waktu	%	7,87	1.344.884 .825	12,60	8.232.096 .000	17,32	1.285.351 .750	22,05	1.298.206. 000	26,77	1.311.189. 000	26,77	13.471.72 7.575		OPD pelaksana urusan Pemberd ayaan masyarak at dan desa
		Rata-rata Realisasi APBDes	%	90,78		94,51		95,02		96,68		97,90		97,90			
	Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Persentase layanan administra si perkantora n	%	100	504.509.4 99,00	100	489.050.2 50,00	100	485.879.2 50,00	100	490.739.0 00,00	100	495.647.0 00,00	100	2.465.824. 999		OPD pelaksana urusan Pemberd ayaan masyarak at dan desa
	Program Peningkata	Persentase sarana	%	100	1.394.223 .800,00	100,00	126.992.0 00,00	100,00	226.167.0 00,00	100,00	228.429.0 00,00	100,00	230.714.0 00,00	100,00	2.206.525. 800		OPD pelaksana

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	n Sarana dan Prasarana Aparatur	prasarana kondisi baik														urusan Pemberd ayaan masyarak at dan desa
	Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksana kan tepat waktu	%	100	192.882.1 70,00	100,00	47.500.00 0,00	100,00	50.000.00 0,00	100,00	50.500.00 0,00	100,00	51.005.00 0,00	100,00	391.887.1 70	OPD pelaksana urusan Pemberd ayaan masyarak at dan desa
8	BIDANG URUSAN PENGENDA LIAN PENDUDU K DAN KELUARGA BERENCAN A				3.910.755 .424		7.168.358 .000		7.149.165 .500		7.220.659. 000		6.676.756. 700		32.125.69 4.624	
	Program Keluarga	Rasio peserta KB	%	62,5	2.505.068 .850	64,27	5.879.584 .200	66,17	6.441.237 .700	69,4	6.505.651. 000	69,7	6.570.708. 000	69,7	27.902.24 9.750	OPD pelaksana

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Berencana	dengan Pasangan Usia Subur														urusan Pengenda lian pendudu k dan keluarga berencan a
		Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif	%	50		55		60		62,5		68		68		
	Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Persentase layanan administra si perkantora n	%	100	459.559.8 74,00	100	679.333.8 00,00	100	671.077.8 00,00	100	677.789.0 00,00	100	68.456.70 0,00	100	2.556.217. 174	OPD pelaksana urusan Pengenda lian pendudu k dan keluarga berencan a
	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	909.784.7 00,00	100,00	571.750.0 00,00	100,00	10.000.00 0,00	100,00	10.100.00 0,00	100,00	10.201.00 0,00	100,00	1.511.835. 700	OPD pelaksana urusan Pengenda lian pendudu k dan keluarga berencan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
																a
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100	36.342.000,00	100,00	37.690.000,00	100,00	26.850.000,00	100,00	27.119.000,00	100,00	27.391.000,00	100,00	155.392.000	OPD pelaksana urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN				10.845.731.533		11.804.595.000		17.513.330.900		17.688.466.000		17.865.353.000		75.717.476.433	
	Program Peningkatan Pengamanan, Penertiban dan Keselamatan Jalan	Angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	166	983.920.050	158	10.304.314.500	150	15.675.099.000	130	15.831.850.000	110	15.990.169.000	110	58.785.352.550	OPD pelaksana urusan Perhubungan
	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Rasio kendaraan per jumlah penumpang	Ratio	1 : 40	9.127.417.330	1 : 40	1.063.325.900	1 : 40	832.197.700	1 : 40	840.520.000	1 : 40	848.926.000	1 : 40	12.712.386.930	OPD pelaksana urusan Perhubungan
	Program	Persentase	%	100	482.423.0	100	187.946.6	100	320.720.4	100	323.928.0	100	327.168.0	100	1.642.186.	OPD

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Pelayanan Administ rasi Perkantora n	layanan administ rasi perkantora n			03,00		00,00		00,00		00,00		00,00		003	pelaksana urusan Perhubun gan
	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	225.484.6 50,00	100,00	219.388.0 00,00	100,00	616.703.0 00,00	100,00	622.871.0 00,00	100,00	629.100.0 00,00	100	2.313.546. 650	OPD pelaksana urusan Perhubun gan
	Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksana kan tepat waktu	%	100	26.486.50 0,00	100,00	29.620.00 0,00	100,00	68.610.80 0,00	100,00	69.297.00 0,00	100,00	69.990.00 0	100	264.004.3 00	OPD pelaksana urusan Perhubun gan
10	BIDANG URUSAN KOMUNIK ASI DAN INFORMAT IKA				2.392.978 .988,00		1.979.320 .000,00		1.825.571 .000,00		1.543.828. 000,00		1.559.268. 000,00		9.300.965. 988	
	Program Pengemba ngan Komunikasi	Persentase OPD yang mengguna kan e-gov	%	23	1.649.769 .974	30	1.611.089 .000	34	1.345.468 .500	36	1.058.924. 000	36,36	1.069.514. 000	36,36	6.734.765. 474	OPD pelaksana urusan Komunika

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	, Informasi dan Media Massa	dalam penyeleng garaan kegiatan utama														si dan informati ka
	Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Persentase layanan administra si perkantora n	%	100	241.139.7 06,00	100	325.911.0 00,00	100	406.112.5 00,00	100	410.174.0 00,00	100	414.276.0 00,00	100	1.797.613. 206	OPD pelaksana urusan Komunika si dan informati ka
	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	453.070.4 08,00	100	-	100	-	100	-	100	-	100	453.070.4 08	OPD pelaksana urusan Komunika si dan informati ka
	Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksana kan tepat waktu	%	100	48.998.90 0,00	100	42.320.00 0,00	100	73.990.00 0,00	100	74.730.00 0,00	100	75.478.00 0,00	100	315.516.9 00	OPD pelaksana urusan Komunika si dan informati ka
11	BIDANG URUSAN				4.972.585 .677		1.324.622 .050		1.734.326 .000		1.751.672. 000		1.769.191. 000		11.552.39 6.727	

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGA H															
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan UMKM	%	0,33	3.727.136.537	0,33	425.655.500	0,33	822.420.000	0,33	830.645.000	0,33	838.952.000	0,33	6.644.809.037	OPD pelaksana urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah
	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Koperasi berkualitas dan sangat berkualitas	Buah	127	638.914.900	138	422.189.100	149	357.930.000	160	361.510.000	171	365.126.000	171	2.145.670.000	OPD pelaksana urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	425.225.740,00	100	295.095.450,00	100	361.164.000,00	100	364.776.000,00	100	368.424.000,00	100	1.814.685.190	OPD pelaksana urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	131.308.500,00	100,00	139.682.000,00	100,00	140.082.000,00	100,00	141.483.000,00	100,00	142.898.000,00	100	695.453.500	OPD pelaksana urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100	50.000.000,00	100,00	42.000.000,00	100,00	52.730.000,00	100,00	53.258.000,00	100,00	53.791.000,00	100	251.779.000	OPD pelaksana urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah
12	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL				5.617.099.384		1.472.650.000		1.386.075.000		1.399.846.000		1.413.847.000		11.289.517.384	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai investasi PMA	US \$ 000	1.239.072	1.143.679.279	1.276.091	490.802.500	1.315.022	528.485.000	1.354.067	533.770.000	1.395.031	539.108.000	1.395.031	3.235.844.779	OPD pelaksana urusan Penanaman modal

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		Nilai investasi PMDN	Rp (juta)	785.096		896.000		1.021.04 4		1.164.04 4		1.327.0 46		1.327.0 46	-	
	Program Peningkata n dan Pengemba ngan Penyeleng garaan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyaraka t di Bidang Perizinan	poin	76,00	315.678.0 00	77,00	488.730.5 00	78,00	338.620.0 00	79,00	342.007.0 00	80,00	345.428.0 00	80	1.830.463. 500	OPD pelaksana urusan Penanam an modal
	Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Persentase layanan administra si perkantora n	%	100	437.652.2 06,00	100	434.742.0 00,00	100	478.869.0 00,00	100	483.658.0 00,00	100	488.495.0 00,00	100	2.323.416. 206	OPD pelaksana urusan Penanam an modal
	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	501.366.9 00,00	100	14.150.00 0,00	100	10.000.00 0,00	100	10.100.00 0,00	100	10.201.00 0,00	100	545.817.9 00	OPD pelaksana urusan Penanam an modal
	Program peningkata n pengemba	Persentase dokumen laporan kinerja	%	100	18.750.00 0,00	100	44.225.00 0,00	100	30.101.00 0,00	100	30.311.00 0,00	100	30.615.00 0,00	100	154.002.0 00	OPD pelaksana urusan Penanam

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	dilaksana kan tepat waktu														an modal
13	BIDANG URUSAN KEPEMUD AAN DAN OLAHRAGA				9.744.906 .694		8.378.413 .000		22.665.27 5.000		22.891.93 0.000		23.120.85 1.000		86.801.37 5.694	
	Program Pembinaan dan Pengemba ngan Prestasi Pemuda dan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi (Provinsi, nasional dan internasion al)	Oran g	15	4.227.932 .850	17	8.007.351 .580	18	22.267.00 5.950	19	22.489.67 7.000	20	22.714.57 4.000	20	79.706.54 1.380	OPD pelaksana urusan Kepemud aan dan olah raga
		Jumlah pemuda berprestasi	Oran g	3		5		5		5		5		23		
		Jumlah organisasi kepemuda an yang aktif	Orga nisas i	4		4		4		5		5		5		
	Program Pelayanan Administra	Persentase layanan administra	%	100	256.926.8 44,00	100	346.246.4 20,00	100	374.387.5 50,00	100	378.132.0 00,00	100	381.914.0 00,00	100	1.737.606. 814	OPD pelaksana urusan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA	
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
	si Perkantora n	si perkantora n															Kepemud aan dan olah raga
	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	523.801.7 00,00	100	-	100	-	100	-	100	-	100	523.801.7 00		OPD pelaksana urusan Kepemud aan dan olah raga
	Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksana kan tepat waktu	%	100	22.030.00 0,00	100	24.815.00 0,00	100	23.881.50 0,00	100	24.121.00 0,00	100	24.363.00 0,00	100	119.210.5 00		OPD pelaksana urusan Kepemud aan dan olah raga
14	BIDANG URUSAN STATISTIK						209.240.0 00		230.760.0 00		233.068.0 00		235.399.0 00		908.467.0 00		
	Program pengemba ngan data/infor masi	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan	%	100	-	100	209.240.0 00	100	230.760.0 00	100	233.068.0 00	100	235.399.0 00	100	908.467.0 00		OPD pelaksana urusan Statistik

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		baik														
15	BIDANG URUSAN PERSANDI AN										300.000.0 00		303.000.0 00		603.000.0 00	
	Program persandian daerah	Persentase pengaman an informasi daerah	%	100	-	100	-	100	-	100	300.000.0 00	100	303.000.0 00	100	603.000.0 00	OPD pelaksana urusan Persandia n
16	BIDANG URUSAN KEBUDAYA AN				1.176.621 .250		966.624.4 75		932.564.5 00		941.891.0 00		951.310.0 00		4.969.011. 225	
	Program pengelolaa n keragaman budaya	Persentase tradisi budaya yang dilestarika n	%	5	1.176.621 .250	5	966.624.4 75	5	932.564.5 00	5	941.891.0 00	5	951.310.0 00	5	4.969.011. 225	OPD pelaksana urusan Kebudaya an
		Persentase situs budaya yang dilestarika n	%	10		10		10		10		10		10		
17	BIDANG URUSAN PERPUSTA				2.137.486 .262		1.501.147 .475		1.442.608 .650		1.457.037. 000		1.471.609. 000		8.009.888. 387	

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	KAAN															
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Orang/Tahun	23.853	507.775.050	25.556	923.858.500	27.260	3.487.963.250	28.964	3.522.843.000	29.964	3.558.072.000	29.964	11.994.511.800	OPD pelaksana urusan Perpustakaan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	162.965.312,00	100	299.783.500,00	100	483.704.150,00	100	488.542.000,00	100	493.428.000,00	100	1.928.422.962	OPD pelaksana urusan Perpustakaan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	793.354.700,00	100	203.820.000,00	100	-	100	-	100	-	100,00	997.174.700	OPD pelaksana urusan Perpustakaan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100	4.545.000,00	100	31.419.500,00	100	26.340.000,00	100	26.604.000,00	100	26.871.000,00	100,00	115.779.500	OPD pelaksana urusan Perpustakaan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	kinerja dan keuangan															
18	BIDANG URUSAN KEARSIPAN				170.199.8 08		142.137.5 00		2.799.731 .500		2.827.729. 000		2.856.007. 000		8.795.804. 808	
	Program perbaikan sistem administras i kearsipan	Indeks Kecepatan layanan perminta n kebutuhan arsip	Poin	3	170.199.8 08	3	142.137.5 00	3	167.612.5 00	3	169.289.0 00	3	170.982.0 00	3	820.220.8 08	OPD pelaksana urusan Kearsipan
	Program penyelama tan dan pelestarian dokumen/a rsip daerah	Persentase dokumen arsip yang terselamat kan	%	100	80.000.00 0	100	51.533.00 0	100	74.339.10 0	100	75.083.00 0	100	75.834.00 0	100	356.789.1 00	OPD pelaksana urusan Kearsipan
II	URUSAN PILIHAN				63.876.11 9.896		55.229.46 7.475		59.039.10 5.500		59.629.52 9.000		60.225.83 5.000		298.000.0 56.871	
1	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.815.052 .465		5.530.236 .000		7.050.954 .000		7.121.492. 000		7.192.711. 000		34.710.44 5.465	
	Program pengemba ngan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya – Ikan	ton/ tahu n	34.129	3.812.287 .300	34.470	1.846.483 .500	34.815	1.651.100 .000	35.163	1.667.611. 000	35.515	1.684.288. 000	35.515	10.661.76 9.800	OPD pelaksana urusan Kelautan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA	
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp		
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
	perikanan																dan Perikanan
		Produksi Perikanan Budidaya - Rumput Laut	ton/ tahu n	38.486		38.871		39.259		39.652		40.049		40.049			
	Program pengemba ngan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton/ tahu n	2.390	2.106.497 .200	2.419	2.356.523 .000	2.448	4.076.825 .000	2.477	4.117.621. 000	2.482	4.158.798. 000	2.482	16.816.26 4.200		OPD pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan
	Program Optimalisas i pengelolaa n dan pemasaran produksi perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton/ tahu n	4.165,7 0	927.851.6 50	4.249,01	692.350.0 50	4.334,00	623.000.0 00	4.420,68	629.230.0 00	4.509,0 9	635.523.0 00	4.509,0 9	3.507.954. 700		OPD pelaksana urusan Kelautan dan Perikanan
		Produksi garam rakyat	ton/ tahu n	3.178		3.242		3.307		3.373		3.407		3.407			
	Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Persentase layanan administra si perkantora n	%	100	658.271.8 15,00	100	567.179.4 50,00	100	637.429.0 00,00	100	643.804.0 00,00	100	650.243.0 00,00	100	3.156.927. 265		Dislutkan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	263.245.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.200.000,00	100	20.402.000,00	100,00	343.847.000	Dislutkan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100	46.899.500,00	100	47.700.000,00	100	42.600.000,00	100	43.026.000,00	100	43.457.000,00	100,00	223.682.500	Dislutkan
2	BIDANG URUSAN PARIWISATA				7.785.127.807		4.805.564.825		2.896.624.500		2.925.591.000		2.954.849.000		21.367.757.132	
	Program pengembangan pariwisata	angka kunjungan wisatawan asing	Orang/Tahun	81.898	6.517.703.404	90.088	4.165.581.125	99.097	2.242.088.000	109.006	2.264.509.000	119.907	2.287.155.000	119.907	17.477.036.529	OPD pelaksana urusan Pariwisata
		angka kunjungan wisatawan	Orang/tahun	57.224		62.946		69.241		76.165		83.782		83.782		

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
		domestik Rata-rata lama tinggal	hari	3,25		3,5		3,75		4		4,25		4,25		
	Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Persentase layanan administra si perkantora n	%	100	634.130.0 53,00	100	586.753.7 00,00	100	581.744.5 00,00	100	587.562.0 00,00	100	593.438.0 00,00	100	2.983.628. 253	OPD pelaksana urusan Pariwisat a
	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	580.246.2 00,00	100	10.000.00 0,00	100,00	27.792.00 0,00	100	28.070.00 0,00	100	28.351.00 0,00	100,00	674.459.2 00	OPD pelaksana urusan Pariwisat a
	Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksana kan tepat waktu	%	100	53.048.15 0,00	100	43.230.00 0,00	100,00	45.000.00 0,00	100	45.450.00 0,00	100	45.905.00 0,00	100,00	232.633.1 50	OPD pelaksana urusan Pariwisat a
3	BIDANG URUSAN PERTANIA N				40.501.36 7.160		33.225.36 1.150		25.834.99 1.000		26.093.34 3.000		26.354.27 9.000		152.009.3 41.310	
	Program peningkata	Produksi Tanaman			33.204.68		25.009.69		18.501.78		18.686.79		18.873.66		114.276.6	OPD

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	
	n produksi pertanian/ perkebuna n	Pangan dan Hortikultur a Unggulan			6.053		2.830		1.000		9.000		7.000		25.883	pelaksana urusan Pertanian
		- Padi	ton/ tahu n	482.123		489.357		496.697		504.147		511.597		511.597		
		- Jagung	ton/ tahu n	40.108		40.910		41.728		42.562		43.396		43.396		
		- Kedelai	ton/ tahu n	43.234		43.382		43.421		45.879		48.337		48.337		
		Produksi Hasil Perkebuna n Unggulan														
		- Tembakau virginia	ton/ tahu n	16.364		17.451		18.538		19.625		20.712		20.712		
		- Tembakau rajangan	kw/t ahu n	673		799		924		1.050		1.176		1.176		
		- Melon	ton/ tahu n	11.673		11.907		12.145		12.388		12.631		12.631		
		- Kopi	ton/ tahu n	357,21		369,36		381,91		394,9		408,32		408		
	Program peningkata	Populasi ternak sapi	ekor	165.674	5.696.415 .259	167.385	6.283.527 .300	169.097	5.764.460 .000	170.809	5.822.105. 000	172.521	5.880.327. 000	172.521	29.446.83 4.559	OPD pelaksana

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	n produksi hasil peternakan															urusan Pertanian
	Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Persentase layanan administra si perkantora n	%	100	879.159.8 54,00	100	1.112.979 .820,00	100	1.133.680 .000,00	100	1.145.017. 000,00	100	1.156.468. 000,00	100	5.427.304. 674	OPD pelaksana urusan Pertanian
	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	676.166.0 00,00	100	459.350.0 00,00	100	294.530.0 00,00	100	297.476.0 00,00	100	300.451.0 00,00	100,00	2.027.973. 000	OPD pelaksana urusan Pertanian
	Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksana kan tepat waktu	%	100	44.940.00 0,00	100	359.811.2 00,00	100	140.540.0 00,00	100	141.946.0 00,00	100	143.366.0 00,00	100,00	830.603.2 00	OPD pelaksana urusan Pertanian
4	BIDANG URUSAN PERDAGAN				3.816.518 .163		5.532.744 .000		6.328.773 .500		6.392.062. 000		6.455.983. 000		28.526.08 0.663	
	Program	Nilai omset	Rupi	10.798.	2.956.543	11.005.6	4.974.040	11.225.7	5.679.183	11.450.2	5.735.975.	11.679.	5.793.335.	11.679.	25.139.07	OPD

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	peningkata n efisiensi perdagang an dalam negeri	perdagang an/nilai transaksi	ah	900	.149	96	.500	08	.000	22	000	227	000	227	6.649	pelaksana urusan Perdagan gan
		Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang menempati ruang sesuai peruntuka nnya	%	14,5		15,3		16,1		16,9		17,8		17,8		
	Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Persentase layanan administra si perkantora n	%	100	416.632.3 14,00	100	498.836.0 00,00	100	534.353.0 00,00	100	539.697.0 00,00	100	545.094.0 00,00	100	2.534.612. 314	OPD pelaksana urusan Perdagan gan
	Program Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	394.542.7 00,00	100	10.000.00 0,00	100,00	10.000.00 0,00	100	10.100.00 0,00	100	10.201.00 0,00	100,00	434.843.7 00	OPD pelaksana urusan Perdagan gan
	Program peningkata n pengemba	Persentase dokumen laporan kinerja	%	100	48.880.00 0,00	100	49.867.50 0,00	100,00	105.237.5 00,00	100	106.290.0 00,00	100	107.353.0 00,00	100,00	416.628.0 00	OPD pelaksana urusan Perdagan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	dilaksanak an tepat waktu														gan
5	BIDANG URUSAN PERINDUST RIAN				3.809.693 .100		6.042.815 .000		16.825.56 2.500		16.993.81 9.000		17.163.75 8.000		60.835.64 7.600	
	Program pengemban gan industri kecil dan menengah	Nilai Produksi IKM	Rupi an	45.061. 512	3.809.693 .100	47.315.6 38	6.042.815 .000	49.681.4 20	16.825.56 2.500	52.165.4 91	16.993.81 9.000	54.773. 765	17.163.75 8.000	54.773. 765	60.835.64 7.600	OPD pelaksana urusan Perindust rian
6	BIDANG URUSAN TRANSMIG RASI				148.361.2 01		92.746.50 0		102.200.0 00		103.222.0 00		104.255.0 00		550.784.7 01	
	Program Pengemban gan dan pembinaan transmigra si	Jumlah keluarga transmigra si yang difasilitasi	KK	230	148.361.2 01	230	92.746.50 0	235	102.200.0 00	234	103.222.0 00	39	104.255.0 00	39	550.784.7 01	OPD pelaksana urusan Transmigra si
III	FUNGSI PENUNJAN G URUSAN				97.462.47 4.675		101.722.1 25.989		96.764.82 8.648		103.867.4 94.500		104.906.1 84.000		504.723.1 07.812	
1	PERENCAN AAN				7.899.775 .512		9.516.473 .000		9.237.800 .000		8.330.179. 000		8.413.483. 000		43.397.71 0.512	

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan APBD	%	100	6.293.768.272	100	8.182.307.500	100	7.811.400.000	100	6.889.514.000	100	6.958.410.000	100	36.135.399.772	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Perencanaan
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	701.508.177,00	100	817.649.000,00	100	771.250.000	100	778.963.000	100	786.753.000	100	3.856.123.177	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Perencanaan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	762.802.850,00	100	378.721.500,00	100	473.600.000	100	478.336.000	100	483.120.000	100	2.576.580.350	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Perencanaan
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100	141.696.213,00	100	137.795.000,00	100	203.000.000,00	100	205.031.000,00	100	207.082.000	100	894.604.213	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Perencanaan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	keuangan															
2	KEUANGA N				10.273.97 6.451		11.687.37 4.243		9.568.283 .000		9.663.970. 000		9.760.613. 000		50.954.21 6.694	
	Program peningkata n dan pengemba ngan pengelolaa n keuangan daerah	Ketepatan waktu penyusuna n pengangga ran dan pelaporan APBD	poin	4	5.536.930 .901	4	7.446.086 .000	4	5.460.736 .000	4	5.515.344. 000	4	5.570.498. 000	4	29.529.59 4.901	OPD pelaksana Fungsi penunjan g urusan Keuangan
		Indeks rata-rata kecepatan layanan perbendah araan	poin	3		3		3		3		3		3		
		Validitas data aset daerah	%	81,2		83,4		85,6		87,8		90		90		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantora n	Persentase layanan administrasi perkantora n	%	100	684.476.1 91,00	100	858.897.0 00,00	100	1.187.552 .000,00	100	1.199.428. 000,00	100	1.211.423. 000,00	100	5.141.776. 191	OPD pelaksana Fungsi penunjan g urusan Keuangan
	Program Peningkata n Sarana dan	Persentase sarana prasarana kondisi	%	100	512.061.7 50,00	100	178.799.0 00,00	100	184.324.0 00,00	100	186.168.0 00,00	100	188.030.0 00,00	100	1.249.382. 750	OPD pelaksana Fungsi penunjan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Prasarana Aparatur	baik														g urusan Keuangan
	Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksana kan tepat waktu	%	100	78.550.00 0,00	100	50.860.00 0,00	100	60.000.00 0,00	100	60.600.00 0,00	100	61.206.00 0,00	100	311.216.0 00	OPD pelaksana Fungsi penunjan g urusan Keuangan
	Program Peningkata n dan Pengemba ngan Pengelolaa n Pendapata n Asli Daerah	Target Pendapata n Asli Daerah	Rupi ah	286.691 .380.00 0	2.112.232 .785	194.649. 640.000	2.252.750 .343	199.768. 860.000	1.836.399 .000	204.496. 050.000	1.854.763. 000	209.339 .730.00 0	1.873.311. 000	209.339 .730.00 0	9.929.456. 128	OPD pelaksana Fungsi penunjan g urusan keuangan
	Program Pelayanan Administra si Perkantora n	Persentase layanan administra si perkantora n	%	100	685.443.3 24,00	100	596.944.4 00,00	100	567.302.4 00,00	100	572.976.0 00,00	100	578.706.0 00,00	100	3.001.372. 124	OPD pelaksana Fungsi penunjan g urusan keuangan
	Program	Persentase	%	100	614.489.0	100	255.945.0	100	221.701.0	100	223.919.0	100	226.159.0	100	1.542.213.	OPD

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Peningkata n Sarana dan Prasarana Aparatur	sarana prasarana kondisi baik			00,00		00,00		00,00		00,00		00,00		000	pelaksana Fungsi penunjan g urusan keuangan
	Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksana kan tepat waktu	%	100	49.792.50 0,00	100	47.092.50 0,00	100	50.268.60 0,00	100	50.772.00 0,00	100	51.280.00 0,00	100	249.205.6 00	OPD pelaksana Fungsi penunjan g urusan keuangan
3	KEPEGAW AIAN, PENDIDIKA N DAN PELATIHAN				5.641.554 .183		7.639.528 .500		7.992.807 .000		8.072.737. 000		8.153.467. 000		37.500.09 3.683	
	Program Peningkata n Kapasitas Pegawai Negeri Sipil Daerah	Persentase PNS yang kompeten	%	60	1.567.383 .269	61	1.012.261 .000	62	1.680.855 .000	64	1.697.664. 000	66	1.714.641. 000	66	7.672.804. 269	OPD pelaksana Fungsi penunjan g urusan Kepegaw aian
	Program Pembinaan dan Pengemba ngan	Indeks kepuasan layanan kepegawai an	%	62,52	1.917.833 .708	64,81	2.114.412 .900	67,00	1.696.252 .000	68,21	1.713.215. 000	70,71	1.730.348. 000	70,71	9.172.061. 608	OPD pelaksana Fungsi penunjan g urusan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	aparatur															Kepegaw aian
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	270.900.984,00	100	377.439.600,00	100	440.058.000,00	100	444.459.000,00	100	448.904.000,00	100	1.981.761.584	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Kepegaw aian
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	466.886.342,00	100	126.765.500,00	100	135.727.000,00	100	137.085.000,00	100	138.456.000,00	100	1.004.919.842	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Kepegaw aian
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100	29.390.000,00	100	46.870.000,00	100	41.587.000,00	100	42.003.000,00	100	42.424.000,00	100	202.274.000	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Kepegaw aian
4	PENGAWA SAN				4.371.232 .093		4.694.955 .000		4.097.073 .000		4.138.046. 000		4.179.428. 000		21.480.73 4.093	

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase tindak lanjut hasil temuan pengawasan	%	84	2.911.974.093	86	3.832.413.400	88	3.179.573.400	90	3.211.370.000	90	3.243.484.000	90	16.378.814.893	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pengawasan
		Kapabilitas APIP	level	3		3		3		3		3		3		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	580.809.500,00	100	659.422.000,00	100	602.227.000,00	100	608.250.000,00	100	614.333.000,00	100	3.065.041.500	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pengawasan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	846.938.500,00	100	157.009.600,00	100	282.819.600,00	100	285.648.000,00	100	288.505.000,00	100	1.860.920.700	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pengawasan

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100	31.510.00 0,00	100	46.110.00 0,00	100	32.453.00 0,00	100	32.778.00 0,00	100	33.106.00 0,00	100	175.957.0 00	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pengawasan
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				156.457.9 50		218.350.0 00		209.020.0 00		1.211.111. 000		1.223.223. 000		3.018.161. 950	
	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Hasil penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan	%	100	156.457.9 50	100	218.350.0 00	100	187.570.0 00	100	1.189.446. 000	100	1.201.341 000	100	2.953.164. 950	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Penelitian dan pengembangan
6	PEMERINTAHAN UMUM				69.119.47 8.486		67.965.44 5.246		65.659.84 5.648		72.451.45 1.500		73.175.97 0.000		348.372.1 90.880	

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program Pemberdayaan Berbasis Rumah Ibadah	Persentase rumah ibadah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	2	3.297.008.000	7	7.522.794.576	10	6.579.879.500	14	6.645.679.000	19	6.712.136.000	19	30.757.497.076	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
	Program Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	%	100	16.792.589.142	100	13.175.489.005	100	9.156.064.985	100	9.247.626.000	100	9.340.103.000	100	57.711.872.132	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Tercukupinya kebutuhan kedinasan KDH	%	100	2.757.101.900,00	100	3.034.284.496,00	100	1.976.131.703,00	100	1.995.894.000,00	100	2.015.853.000,00	100	11.779.265.099	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	5.904.507.844,00	100	7.938.436.495,00	100	4.900.475.460,00	100	4.949.481.000,00	100	4.998.976.000,00	100	24.237.343.899	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	3.404.302.050,00	100	84.716.750,00	100	150.144.000,00	100	151.646.000,00	100	153.163.000,00	100	3.943.971.800	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100	52.500.000,00	100	84.400.000,00	100	73.110.000,00	100	73.842.000,00	100	74.581.000,00	100	358.433.000	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Perda yang ditetapkan	%	38	23.208.56 1.554	50	20.708.14 3.000	53	12.757.75 4.000	56	12.885.33 2.000	57	13.014.18 6.000	57	82.573.97 6.554	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%	100	2.229.915 .100,00	100	3.410.550 .000,00	100	2.875.308 .000,00	100	2.904.062. 000,00	100	2.933.103. 000,00	100	14.352.93 8.100	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	828.962.0 00,00	100	1.979.335 .500,00	100	391.960.0 00,00	100	395.880.0 00,00	100	399.839.0 00,00	100	3.995.976. 500	OPD pelaksana Fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum
	Program peningkatan pengembangan	Persentase dokumen laporan	%	100	63.615.00 0,00	100	47.275.00 0,00	100	53.335.00 0,00	100	53.869.00 0,00	100	54.408.00 0,00	100	272.502.0 00	OPD pelaksana Fungsi

KO DE	BIDANG URUSAN PEMERINT AHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANG UNAN	INDIKATO R KINERJA PROGRAM (OUTCOM E)	SAT UAN	TARGET KINERJA										KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)		PELAKSA NA
				2017		2018		2019		2020		2021		TARGET	Rp	
				TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	kinerja dilaksanak an tepat waktu														penunjan g urusan Pemerint ahan Umum
	Program Peningkata n dan Pengemba ngan Pembangu nan Kecamatan	Rata-rata capaian kinerja pemerinta han kecamatan yang dikoordina sikan	%	100	10.067.73 0.796	100	11.460.00 0.000	100	16.500.00 0.000	100	22.800.00 0.000	100	23.028.00 0.000	100	83.855.73 0.796	OPD pelaksana Fungsi penunjan g urusan Pemerint ahan Umum



KINERJA PENYELenggaraAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan yang ada.

Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 mengklasifikasikan indikator kinerja daerah berdasarkan fokus-fokus:

1. Aspek Masyarakat, terdiri dari :
 - Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - Fokus Kesejahteraan Sosial
 - Fokus Seni Budaya dan Olah raga
2. Aspek Pelayanan Umum, terdiri dari :
 - Fokus Pelayanan Urusan Wajib
 - Fokus Pelayanan Urusan Pilihan
3. Aspek Daya Saing Daerah, yang menjelaskan kemampuan ekonomi daerah, terdiri dari
 - Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

- Fokus Iklim Investasi dan Sumber Daya Manusia

Penetapan Indikator Kinerja Utama disajikan pada Tabel 8.1, sedangkan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dapat dilihat pada Tabel 8.2.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	Indeks Toleransi	Poin	NA	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,45
2	Tingkat Kriminalitas	Kasus/100.000 penduduk	99,01	94,44	92,4	88,55	85,3	81,63	81,63
3	IPM	Poin	63,22	64,36	65,41	66,36	67,19	67,87	67,87
4	Angka Kemiskinan	%	15,80	15,31	14,89	14,51	14,17	13,86	13,86
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,67	6,42	6,47	6,53	6,56	6,61	6,61
6	Indeks Gini	Poin	0,352	0,348	0,344	0,340	0,336	0,332	0,332
7	Indeks Wiliamson	Poin	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39
8	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	60,62	65,24	67,37	70,87	77,64	79,11	79,11
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	45,17	48,08	52	52,51	53	53,5	53,50
10	Ketaatan terhadap RTRW	%	77,32	78,47	80,32	82,54	84,36	86,71	86,71
11	Nilai EKPPD	Poin	3,1269	3,1313	3,1372	3,1431	3,1488	3,1545	3,1545
12	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	CC	B	B	B	B
13	Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	2	2	2	2	2	2	2

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Tahun 2016-2021

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
A	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,67	6,42	6,47	6,53	6,56	6,61	6,61
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	3,21	4,60	4,06	4,27	4,47	4,68	4,68
	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	9,54	7,01	7,44	8,18	8,24	8,81	8,81
	Angka Kemiskinan	%	15,80	15,31	14,89	14,51	14,17	13,86	13,86
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,90	2,90	2,87	2,85	2,84	2,83	2,83
	Indeks Gini	Poin	0,352	0,348	0,344	0,340	0,336	0,332	0,332
	Indeks Wiliamson	Poin	0,42	0,42	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39
B	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL								
	IPM	Poin	63,22	64,36	65,41	66,36	67,19	67,87	67,87
	Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,6	5,95	6,26	6,52	6,74	6,88	6,88
	Harapan lama sekolah	Tahun	12,83	13,13	13,42	13,69	13,93	14,15	14,15
	Persentase melek huruf usia 15-55 tahun	%	79,67	80,17	83,94	88,82	90,3	92,8	92,8
	PAUD terakreditasi A	%	0,31	0,31	0,92	1,11	1,53	1,53	1,53
	SD terakreditasi A	%	3,01	3,85	4,35	5,18	6,02	6,86	6,86
	SMP terakreditasi A	%	1,68	6,7	8,38	10,06	11,73	13,97	13,97
	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,01	65,28	65,52	65,73	65,91	66,06	66,06
	Angka PMKS	Orang	9.319	7.083	4.847	3.112	1.901	1.092	1.092
C	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA								
	Persentase tradisi budaya yang dilestarikan	%	5	5	5	5	5	5	5
	Jumlah atlet berprestasi (Provinsi, nasional dan internasional)	Orang	13	15	17	18	19	20	20
ASPEK PELAYANAN UMUM									
I	URUSAN WAJIB								

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
A	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR								
1	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN								
	APK PAUD	%	63,27	69,08	76,14	78,09	80,04	81,99	81,99
	APK SD/MI	%	112,28	112,49	111,49	109,99	107,99	106,99	106,99
	APK SMP/MTs	%	104,66	102,69	101,75	101,25	100	100	100
	APM SD/MI	%	95,71	96,76	97,81	98,86	99,91	100	100
	APM SMP/MTs	%	96,42	96,42	97,52	98,75	99,25	100	100
	Persentase Anak Berkebutuhan Khusus yang mendapatkan Layanan Pendidikan Inklusi	%	64,98	76,27	77,29	79,3	85,5	85,5	85,5
	% PTK PAUD bersertifikasi	%	84,20	87,00	90,91	91,56	92,21	92,86	92,86
	% PTK SD bersertifikasi	%	85,25	88,00	91,99	93,85	95,71	97,57	97,57
	% PTK SMP bersertifikasi	%	78,22	83,00	87,33	90,09	92,85	95,01	95,01
2	BIDANG URUSAN KESEHATAN								
	Indeks Kepuasan layanan kesehatan dasar	Poin	62,51	62,52	64,81	65,17	68,21	70,71	70,71
	Angka morbiditas	%	28,35	24,00	18,00	16,00	14,00	12,00	12,00
	Indeks Kepuasan layanan kesehatan rujukan	Poin	62,52	62,54	63,94	64,23	66,68	68,02	68,02
3	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
	Infrastruktur jalan yang umurnya sesuai dengan umur teknis	%	60,62	65,24	67,37	70,87	77,64	79,11	79,11
	Cakupan Layanan jaringan Irigasi	Ha	49.517	49.517	49.517	49.517	49.517	49.517	49.517
	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	%	82,52	85,15	87,78	90,41	93,04	95,67	96
	Persentase jalan yang dibangun terhadap rencana induk pengembangan jalan	%	76,92	78,02	79,22	80,32	81,42	82,52	83
4	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	Luasan Kawasan Kumuh	Ha	110	60,14	48,02	35,90	23,77	11,65	11,65
	Spot kawasan kumuh dan rawan bencana	Spot	13	7	5	3	2	1	1
	Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Unit	236	781	2.105	1.000	1.000	1.000	5.986

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	Persentase kawasan permukiman yang PSU permukimannya dalam kondisi baik (jalan lingkungan, drainase, pju)	%	21,4	22,70	24,63	32,38	42,18	54,10	54,10
5	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
	Indeks Toleransi	Poin	NA	3,41	3,42	3,43	3,44	3,45	3,45
	Konflik berlatar belakang agama	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
	Angka kejadian konflik antar etnis	Kejadian	0	0	0	0	0	0	0
	Angka partisipasi pemilih pada pilpres, pileg dan pilkada	%	0	0	69	70	0	70	70
	Konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Penyakit masyarakat	Kasus	57	81	49	36	36	36	36
	Angka pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus	288	283	278	273	270	270	270
	Desa tangguh bencana	Desa	3	7	11	15	19	23	23
	Persentase korban bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata Kecepatan dan ketepatan waktu penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	15
6	BIDANG URUSAN SOSIAL								
	Penanganan PMKS	%	13,1	23,99	31,57	35,80	38,91	42,56	42,56
	Lembaga sosial yang aktif	%	30,96	34,86	39,45	44,04	48,62	50,20	50,2
B	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
1	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA								
	Pencari kerja terdaftar yang terserap	%	92,58	94,79	94,92	95,04	95,17	95,31	95,31
	Sengketa ketenagakerjaan	Kasus	14	18	20	14	14	14	14
2	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Persentase penanganan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100
3	BIDANG URUSAN PANGAN								
	Konsumsi Protein	Gram/kapita/hari	83	83	82	82	81	81	81

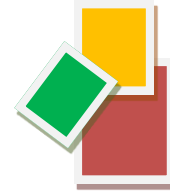
KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	Konsumsi Energi	Kilokalori/kapita/hari	2.436,00	2.408,80	2.381,60	2.354,40	2.327,20	2.300,00	2.300
4	BIDANG URUSAN PERTANAHAN								
	Cakupan fasilitasi pembuatan sertifikat tanah	%	100	100	100	100	100	100	100
5	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	45,17	48,08	52	52,51	53	53,5	53,50
	Sumber mata air yang debit airnya terjaga	Titik	4	4	6	8	10	12	12,00
	Jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang di tangani	M3/hari	17,54	19,88	19,91	20,21	20,51	20,82	20,82
6	BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
	Tingkat kepemilikan KTP elektronik	%	70,96	76,93	81,93	86,93	91,93	96,93	96,93
	Tingkat kepemilikan akta kelahiran	%	63,7	73,41	78,41	83,41	88,41	93,41	93,41
	tingkat kepemilikan kartu keluarga	%	71,21	78,1	85,23	89,23	93,23	97,23	97,23
7	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
	Desa berkembang menjadi desa cepat berkembang	Desa	15	17	20	24	29	35	35
	Rata-rata unit usaha BUMDes	Unit	NA	1,00	1,10	1,90	2,00	2,30	2,30
	Jumlah desa wisata	Desa	1	5	5	2	4	4	21
	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa aktif	Lembaga	NA	11	13	15	30	45	45
	Jumlah lembaga adat aktif	Lembaga	2	5	10	15	30	45	45
	Penetapan APBDes Tepat waktu	%	3,15	7,87	12,60	17,32	22,05	26,77	26,77
	Rata-rata Realisasi APBDes	%	90,78	90,78	94,51	95,02	96,68	97,90	97,90
8	BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	Rasio peserta KB dengan Pasangan Usia Subur	%	59,25	62,5	64,27	66,17	69,4	69,7	69,7
	Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif	%	40	50	55	60	62,5	68	68
9	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN								
	Angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	184	166	158	150	130	110	110
	Rasio kendaraan per jumlah penumpang	Ratio	1 : 40	1 : 40	1 : 40	1 : 40	1 : 40	1 : 40	1 : 40
10	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	Persentase OPD yang menggunakan e-gov dalam penyelenggaraan kegiatan utama	%	10	23	30	34	36	36,36	36,36
11	BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
	Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil	%	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Koperasi berkualifikasi berkualitas dan sangat berkualitas	Buah	116	127	138	149	160	171	171
12	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL								
	Nilai investasi PMA	US \$ 000	1.203.061	1.239.072	1.276.091	1.315.022	1.354.067	1.395.031	1.395.031
	Nilai investasi PMDN	Rp (juta)	689.044	785.096	896.000	1.021.044	1.164.044	1.327.046	1.327.046
13	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	Jumlah pemuda berprestasi	Orang	0	3	5	5	5	5	23
	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	3	4	4	4	5	5	5
14	BIDANG URUSAN STATISTIK								
	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100
15	BIDANG URUSAN PERSANDIAN								
	Persentase pengamanan informasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
16	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN								
	Persentase situs budaya yang dilestarikan	%	10	10	10	10	10	10	10
17	BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN								
	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	Orang/Tahun	22.149	23.853	25.556	27.260	28.964	29.964	29.964
18	BIDANG URUSAN KEARSIPAN								
	Indeks Kecepatan layanan permintaan kebutuhan arsip	Poin	3	3	3	3	3	3	3
	Persentase dokumen arsip yang terselamatkan	%	100	100	100	100	100	100	100
II	URUSAN PILIHAN								
1	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	Produksi Perikanan Budidaya - Ikan	ton/tahun	33.792,53	34.129	34.470	34.815	35.163	35.515	35.515
	Produksi Perikanan Budidaya - Rumput Laut	ton/tahun	38.106,47	38.486	38.871	39.259	39.652	40.049	40.049
	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	2.363	2.390	2.419	2.448	2.477	2.482	2.482
	Produksi Olahan Hasil Perikanan	ton/tahun	4.084,03	4.165,70	4.249,01	4.334,00	4.420,68	4.509,09	4.509,09
	Produksi garam rakyat	ton/tahun	1.214	3.178	3.242	3.307	3.373	3.407	3.407
2	BIDANG URUSAN PARIWISATA								
	Angka kunjungan wisatawan asing	Orang/Tahun	59.148	81.898	90.088	99.097	109.006	119.907	119.907
	Angka kunjungan wisatawan domestik	Orang/tahun	49.769	57.224	62.946	69.241	76.165	83.782	83.782
	Rata-rata lama tinggal	hari	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,25
3	BIDANG URUSAN PERTANIAN								
	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Unggulan								
	- Padi	Ton/tahun	475.000	482.123	489.357	496.697	504.147	511.597	511.597
	- Jagung	Ton/tahun	39.322	40.108	40.910	41.728	42.562	43.396	43.396
	- Kedelai	Ton/tahun	42.387	43.234	43.382	43.421	45.879	48.337	48.337
	Produksi Hasil Perkebunan Unggulan								
	- Tembakau virginia	Ton/tahun	12.577	16.364	17.451	18.538	19.625	20.712	20.712
	- Tembakau rajangan	Kw/tahun	547	673	799	924	1.050	1.176	1.176
	- Melon	Kw/tahun	11.444	11.673	11.907	12.145	12.388	12.631	12.631
	- Kopi	Ton/tahun	434,10	357,21	369,36	381,91	394,9	408,32	408
	Populasi ternak sapi	Ekor	163.962	165.674	167.385	169.097	170.809	172.521	172.521
4	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN								
	Nilai omset perdagangan/nilai transaksi	Rupiah	10.250.310	10.798.900	11.005.696	11.225.708	11.450.222	11.679.227	11.679.227
	Persentase pedagang kaki lima dan asongan yang menempati ruang sesuai peruntukannya	%	13,8	14,5	15,3	16,1	16,9	17,8	17,8
5	BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN								
	Nilai Produksi IKM	Rupiah	40.550.421	45.061.512	47.215.638	49.681.420	52.165.491	54.773.765	54.773.765
6	URUSAN TRANSMIGRASI								
	Jumlah keluarga transmigrasi yang difasilitasi	KK	25	230	230	235	234	39	39
III	URUSAN FUNGSI PENUNJANG								
1	PERENCANAAN								

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	persentase kesesuaian program dan kegiatan RKPD dengan APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
2	KEUANGAN								
	Nilai Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	2	2	2	2	2	2	2,00
	Ketepatan waktu penyusunan penganggaran dan pelaporan APBD	Poin	4	4	4	4	4	4	4
	Indeks rata-rata kecepatan layanan perbendaharaan	Poin	3	3	3	3	3	3	3
	Validitas data aset daerah	%	79	81,2	83,4	85,6	87,8	90	90
	Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah	%	8,6	14,95	9,75	9,28	9,32	9,35	9,35
	Target Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	165.997.900.000	286.691.380.000	194.649.640.000	199.768.860.000	204.496.050.000	209.339.730.000	209.339.730.000
3	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	Persentase PNS yang kompeten	%	58,70	60	61	62	64	66	66
	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	%	61,51	62,52	64,81	67,00	68,21	70,71	70,71
4	PENGAWASAN								
	Persentase tindaklanjut hasil temuan pengawasan	%	82	84	86	88	90	90	90
	Kapabilitas APIP	level	2	3	3	3	3	3	3
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
	Hasil penelitian dan pengembangan yang diaplikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	PEMERINTAHAN UMUM								
	Nilai EKPPD	Poin	3,1269	3,1313	3,1372	3,1431	3,1488	3,1545	3,1545
	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	CC	B	B	B	B
	Persentase rumah ibadah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	%	2	2	7	10	14	19	19
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
	Tercukupinya kebutuhan kedinasan KDH	%	100	100	100	100	100	100	100
	Perda yang ditetapkan	%	36,84	38	50	53	56	57	57
	Rata-rata capaian kinerja pemerintahan kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100

KODE	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2016)	TARGET KINERJA					KONDISI KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD (2021)
				2017	2018	2019	2020	2021	
				TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
	yang dikoordinasikan								
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
A	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH								
	Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp (ribu)/tahun	9.079	9.319	9.568	9.802	10.030	10.252	10.252
	Rata-rata Nilai Tukar Petani	Poin	104,36	105,51	104,76	105,28	105,48	105,69	105,69
	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	85,00	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00	86,00
B	FOKUS FASILITAS WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR								
	Persentase jalan yang kondisinya baik (mantap)	%	72,47	68,24	70,62	71,85	74,32	75,79	75,79
	Pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR	%	8,33	20,83	25,00	25,00	29,17	33,33	33,33
	Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	%	67,5	75	76	78	80	82	82
C	FOKUS IKLIM INVESTASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA								
	Tingkat Kriminalitas	Kasus/100.000 penduduk	99,01	94,44	92,40	88,55	85,30	81,63	81,63
	Ketaatan terhadap RTRW	%	77,32	78,47	80,32	82,54	84,36	86,71	86,71
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Bidang Perizinan	poin	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	80
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	71,81	72,93	73,35	73,80	74,23	74,65	74,65



BABIX PENUTUP

1.6. Pedoman Transisi

Sebagai upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, maka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

1.7. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 selanjutnya menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RKPD Tahunan dan perencanaan penganggaran. Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2019 hingga penyusunan RKPD tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

3. Seluruh SKPD KabupatenLombok Tengah wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021;
4. Penyusunan RKPD berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dalam rangka menyusun RAPBD;
5. RKPD Kabupaten Lombok Tengah harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
6. Target RKPD tahun 2021 disamakan dengan target tahun 2020 dengan penyesuaian (kaidah transisi);
7. Bappeda berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021;
8. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021.